

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
DI KELURAHAN LABESSI KECAMATAN MARIO-RIWAWO
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SOPPING**



OLEH ;

**ASRIANY P.M. RIDWAN
45 87 020 136**

**Skripsi sebagai salah satu syarat
Untuk menempuh ujian sarjana negara
Jurusan Ilmu Administrasi**

Pada

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas "45" Ujung Pandang
1992**

HALAMAN PENGESAHAN

Pada hari Selasa Tanggal 24, Bulan November Tahun 1992
Skripsi dengan judul : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI
KELURAHAN LABESSI KECAMATAN MARIO-
RIWAWO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SOPPENG.

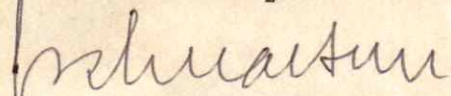
Nama Mahasiswa : ASRIANY P.M. RIDWAN
Nomor Stambuk/Nirm : 45 87 020 136
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk diujikan pada Tanggal 24 November 1992

Menyetujui :

Pembimbing I


Pembimbing II



Drs. H.P.S. Rahim


Drs. Guntur Karnaeni

Mengetahui




Dekan
FISIPOL Universitas "45"

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Drs. H. Mohammad Thala



Drs. Guntur Karnaeni

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini Selasa tanggal 24 November 1992 Skripsi dengan
Judul : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KELURAHAN
LABESSI KECAMATAN MARIO-RIWAWO KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SOPPENG.

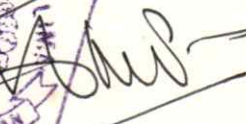
Nama : ASRIANY PM. RIDWAN
Nomor STB/Nirm : 4587020136/871130956
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung
Pandang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Negara pada Jurusan Administrasi Negara
Program (SI).


PENGAWAS UMUM

 
Prof. Mr. Dr. H.A. Zaenal Abidin Farid Prof. Drs. H. Sadly AD, MPA

PANITIA UJIAN


Drs. Mohammad Thala

TIM PENGUJI


Drs. Guntur Karnaeni

1. Prof. Dr. H.A. Anwar Arifin
2. Drs. La Nafie, M.Ed.Adm
3. Drs. H.P.S. Rahim
4. Drs. Guntur Karnaeni


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadiran Allah Subhana Wata'alah atas limpahan rahmat dan taufiq-Nyalah, sehingga do'a yang disertai segala jerih-payah untuk merampungkan karya ilmiah ini yang berjudul "PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KELURAHAN LABESSI KECAMATAN MARIO-RIWAWO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SOPPENG", mampu terselesaikan sesuai rencana. Walaupun demikian dalam bobot pembahasan yang penulis sajikan melalui karya ilmiah ini sungguh amat sederhana.

Di lain pihak penulisan karya ilmiah skripsi ini adalah untuk menempuh ujian akhir dalam memperoleh gelar Dra (Sarjana) dalam bidang Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.

Tidak kalah dari maksud terdahulu, penulis selaku insan akademis senantiasa di tuntut untuk melatih kemampuan intelektualitasnya yang merupakan suatu konsekuensi logis dari Tri Dharma Perguruan Tinggi di Indonesia, hal mana dalam memecahkan masalah diperlukan kematangan analisis dan mampu menggambarkan secara sistematis, seperti yang dibentangkan di atas skripsi ini. Sehubungan dengan itu, penulis juga tetap menyadari akan keterbatasan-keterbatasan manusia, olehnya itu tanpa dukungan dan tuntunan dari berbagai pihak, maka karya ilmiah ini tidak mungkin rampung dalam waktu yang relatif terbatas.

Dengan demikian, penulis pada kesempatan ini mengucapkan seluas-luasnya rasa terima kasih kepada Ayahanda **Drs. M. Ridwan Tang, SH** dan Ibunda **Asia Herawati, terCinta** yang telah mengasuh penulis sejak kecil dengan segala pengorbanan, dana dan daya hingga penulis dewasa, dan dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Ucapan terima kasih pula penulis tujuan kepada :

1. Bapak Prof. Mr. DR. H.A. Zainal Abidin Farid, sebagai Rektor pada Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Bapak Drs. H.M. Thala, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.
3. Bapak Drs. Guntur Karnaeni, sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.
4. Bapak Drs. H.P.S. Rahim dan Bapak Drs. Guntur Karnaeni, masing-masing sebagai pembimbing, Atas kritikan-kritikannya yang bersifat konstruktif serta nasehat-nasehat dan motivasi yang diberikan sampai skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak-Bapak dan Ibi-Ibu Dosen serta seluruh Staf Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.
6. Bapak Kepala Kelurahan Lambesi serta seluruh responden yang meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam pengadaan data selama penulisan skripsi ini.
7. Kepada suami terCinta **M. Agus Syarifuddin Anis** dan anak

tersayang Putri Regia serta kakak Drs. Asriadi Ridwan, Asrianti Ridwan SH, serta adik Asriawan Rinwan yang selama ini menjadi pendorong utama dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

8. Kakak Drs. Nursultan dan Rekan Yusnaini yang telah memberikan petunjuk dalam pengolahan data.

Semoga segala bantuan dan fasilitas dari berbagai pihak serta mendapat imbalan dari Allah S.W.T. akhirnya penulis senantiasa berlapang dada untuk menerima kritikan-kritikan dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Amin ...!

Ujung Pandang, September 1992

P E N U L I S,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Dasa/Kelurahan	12
B. Pengertian Pembangunan Desa	15
C. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa	19
BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Geografis dan Demografis	26
B. Struktur Organisasi	36
C. Keadaan Sarana dan Prasarana	44
BAB IV. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Pelaksanaan Pembangunan	47

B. Kendala-Kendala Yang Menjadi Faktor Penghambat	59
1. Terbatasnya dana	59
2. Kurang Berfungsinya Lembaga-Lembaga Desa	64
3. Kurangnya Tenaga Terampil	68
C. Langkah-Langkah Pemecahan Faktor-Faktor Kendala Pembangunan	70
1. Mengatasi Keterbatasan dana	70
2. Mengfungsikan Lembaga/Organisasi Masyarakat Desa	72
3. Meningkatkan tenaga Terampil	73

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan	75
B. Saran-Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL :	HALAMAN
I. PEMBAGIAN LUAS WILAYAH KELURAHAN LABESSI MENURUT LINGKUNGAN DAN BANYAKNYA RW DAN RT SERTA KK.....	27
II. LUAS WILAYAH MENURUT JENIS PENGUNAAN TANAH DI KELURAHAN LABESSI TAHUN 1992	28
III. TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK KELURAHAN LABESSI PERLINGKUNGAN, TAHUN 1992.....	29
IV. KEADAAN PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DI KELURAHAN LABESSI KECAMATAN MARIO-RIWARO TAHUN 1992	30
V. KEADAAN PENDUDUK MENURUT UMUR DI KELURAHAN LABESSI KECAMATAN MARIO-RIWAWO TAHUN 1992....	31
VI. KEADAAN PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DI KELURAHAN LABESSI TAHUN 1992	33
VII. KEADAAN PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN DI KELURAHAN LABESSI TAHUN	35
VIII. JUMLAH ANGGARAN PROYEK PEMBANGUNAN DESA DI KELURAHAN LABESSI KECAMATAN MARIO-RIWAWO TAHUN ANGGARAN 1987-1992 MENURUT BIDANG PEMBIYAAAN	48
IX. RATA-RATA PERSENTASE REALISASI PENCAPAIAN TARGET DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KELURAHAN LABESSI PER BIDANG PROYEK DI TAHUN ANGGARAN 1987/1988 - 1991/1992	51
X. TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK SELURUH ANGGARAN PROYEK PEMBANGUNAN DI KELURAHAN LABESSI	54
XI. TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG SWADAYA DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT DALAM MEREALISASIKAN PROYEK/PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	56
XII. BENTUK SWADAYA DAN PARTISIPASI YANG TERBANYAK DIBERIKAN OLEH RESPONDEN DALAM PELAKSANAAN	

TABEL :

TIAP BIDANG PEMBANGUNAN PADA TAHUN ANGGARAN 1991/1992	61
XIII. TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KEMAMPUAN DANA YANG TERSEDIA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN LABESSI	63
XIV. TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP TINGKAT PELAK- SANAAN FUNGSI LEMBAGA-LEMBAGA MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN LABESSI	66
XV. TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KEMAMPUAN TENAGA TERAMPIL YANG MENGELOLA POTENSI PEMBANGUNAN DI KELURAHAN LABESSI	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini adalah pembangunan yang multi dimensional dalam arti pembangunan menyeluruh ke seluruh tanah air sampai di daerah pedesaan sehingga dengan demikian pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, bahkan dapat dikatakan bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan/berlokasi di daerah pedesaan.

Diorientasikannya pembangunan di daerah pedesaan, karena sebagian besar penduduk Indonesia (83,2%) bermukim di daerah pedesaan dan juga potensi alam Indonesia berada di pedesaan, sehingga pembangunan desa/kelurahan benar-benar mampu memperkuat kedudukan bukan saja sebagai obyek dalam pembangunan, akan tetapi merupakan subjek pembangunan.

Perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa sangat besar, sebagaimana dikemukakan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1988 dari sektor pembangunan desa adalah sebagai berikut :

"Perhatian yang sebesar-besarnya perlu diberikan kepada peningkatan pembangunan pedesaan, terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat desa serta memanfaatkan

secara maksimal dana yang langsung diperuntukkan bagi pembangunan pedesaan seperti Inpres Bantuan Desa dan sebagainya", (TAP MPR 1988 : 72).

Dengan demikian pembangunan desa merupakan letak sentral dari pembangunan nasional. Semua jenis pembangunan baik sektoral, program regional, maupun program khusus atau Inpres, semuanya difokuskan ke daerah pedesaan.

Kenyataan-kenyataan tersebut di atas, tidaklah mengherankan, kalau pembangunan pedesaan sangat diprioritaskan antara lain disebabkan karena :

- "1. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari 13.677 pulau besar dan kecil yang didalamnya tergabung 58.164 buah desa.
2. Sebahagian besar penduduk Indonesia yang jumlahnya kurang 82,2 % terdiri dari masyarakat yang mendiami wilayah pedesaan.
3. Untuk mengukur sampai dimana tingkat kemajuan dan perkembangan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia dalam pembangunan dan tentu tidak dapat diukur dengan melihat wilayah-wilayah tertentu saja yang lebih maju, tetapi yang lebih utama harus diperhatikan ialah sebagian besar dari wilayah serta penduduk terbanyak yaitu : yang berdiam di desa-desa.
4. Income nasional harus mencerminkan pembagian dan pendapatan yang merata terhadap masyarakat pedesaan.
5. Desa merupakan dasar dan landasan pembangunan bagi bangsa dan negara, desa dengan potensinya atau alam dan manusia merupakan faktor yang dominan dalam pembangunan". (Zainal Wali Amrullah, 1975 : 3).

Jadi jelaslah bahwa pembangunan desa adalah mencakup seluruh masyarakat yang pada suatu negara yang berhasrat membangun. Oleh karena itu dalam pembangunan desa tidak hanya dilaksanakan oleh satu pihak tanpa koordinasi kerja dan integral dengan semua pihak, baik

Pemerintah maupun masyarakat, dari pusat sampai ke desa-desa.

Khususnya dalam pembangunan desa di Desa Labessi, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis terdorong untuk mengadakan penelitian yang berjudul : "PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KELUARAHAAN LABESSI KECAMATAN MARIO-RIWAWO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SOPPENG)", dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan pembangunan nasional, pembangunan desa/kelurahan sudah menjadi bagian integral dan merupakan titik sentral. Pembangunan desa/kelurahan memungkinkan terwujudnya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
2. Setiap suatu aktivitas mutlak dipengaruhi oleh berbagai faktor, demikian pula halnya pelaksanaan pembangunan di desa Labessi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : faktor terbatasnya dana, kurangnya tenaga ahli dan faktor tradisi yang negatif dan faktor partisipasi masyarakat itu sendiri.
3. Usaha untuk lebih mengefektifkan pencapaian tujuan pembangunan Desa/Kelurahan Labessi perlu mendapat perhatian khusus antara lain melalui penelitian yang akan memberikan input dalam peningkatan berbagai aspek yakni meningkatkan penggalan sumber-sumber dana pembangunan, memanfaatkan tenaga ahli dan mengatasi tradisi negatif masyarakat yang menghambat pelaksanaan

pembangunan dapat lebih lancar.

4. Kendatipun secara administratif Kelurahan Labessi telah berstatus Kelurahan, namun apabila dilihat sistem sosial yang dianut masyarakat masih bercirikan masyarakat pedesaan. Untuk itulah istilah pembangunan pedesaan tidaklah merubah makna pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Labessi, dimana pembangunan yang dilaksanakan adalah oleh dari dan untuk masyarakat sendiri.
5. Penulis sebagai Mahasiswa sering bepergian di daerah ini sehingga ingin mengetahui sekaligus memberikan suatu wujud pengabdian di samping itu dapat lebih mudah untuk memperoleh data sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Untuk lebih efektifnya penelitian ini, penulis membatasi orientasi permasalahan yang akan disoroti dalam penelitian itu sendiri.

Dalam proses pembangunan Desa/Kelurahan, terdapat berbagai bentuk kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tindak lanjutnya, namun penelitian ini penulis pada aspek proses pelaksanaan pembangunan. Di samping itu dalam penelitian ini penulis hanya menyoroti khusus proses pelaksanaan pembangunan di bidang fisik saja, meliputi aspek pembangunan di bidang



sarana produksi, prasarana perhubungan, prasarana-pemasaran dan prasarana sosial serta prasarana pemerintahan desa. Jadi penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pembangunan proyek-proyek pedesaan saja (yang dibiayai melalui Anggaran Pembangunan Desa/Kelurahan bukan anggaran rutin).

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan menyoroti beberapa masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut ?
3. Apakah langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif lagi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan di Desa/Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi

dalam pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo Kabupaten Dati II Soppeng.

- c. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam mengatasi kendala-kendala yang ada.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat memberikan buah pikiran kepada Pemerintah Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng.
- b. Bagi Desa Labessi Kecamatan Mario-Riwawo Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng, dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa alternatif yang dapat ditempuh untuk mengatasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pembangunan Desa.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan type penelitian

Jenis penelitian dalam proses penyusunan skripsi ini adalah study kasus, dimana dengan jenis penelitian ini penulis berusaha mempertahankan keutuhan objek penelitian dan menjawab dengan tuntas dan mendalam setiap idem-idem dalam rumusan masalah.

Sedangkan type penelitian ini adalah

"Deskriptif" yang sebagai salah satu type penelitian yang berusaha menggambarkan karakteristik-karakteristik permasalahan yang disoroti.

2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian meliputi seluruh unsur yang ada di wilayah Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng. Populasi adalah seluruh kepala keluarga sebanyak 599 kepala keluarga.

Jumlah responden yang dipilih dari jumlah kepala keluarga sebanyak 5 % yakni 28 orang, ditambah sebanyak 32 orang dari berbagai unsur baik dari unsur pemerintah maupun organisasi dalam Desa, jadi jumlah responden seluruhnya 60 orang. Adapun responden tersebut sebagai berikut :

- Unsur Pemerintah Kecamatan Mario-Riwawo = 3 orang
 - Unsur Pemerintah Desa Labessi sebanyak = 5 orang
 - Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat
Desa (LKMD) = 14 orang
 - Pengurus Lembaga/Organisasi Desa = 5 orang
 - Tokoh Masyarakat = 5 orang
 - Masyarakat biasa = 28 orang
- Jumlah = 60 orang

3. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini terdiri :

a. Data Sekunder

Data sekunder dalam penulisan ini merupakan data baku yang masih perlu dianalisis lebih lanjut untuk menarik kesimpulan dalam setiap data. Jenis data ini antara lain keadaan geografis dan demografis, jumlah target pembangunan yang direncanakan dan realisasi pelaksanaannya termasuk laporan-laporan pelaksanaan pembangunan. Untuk memperoleh data tersebut penulis mengadakan pencatatan data.

b. Data Primer

Data primer adalah merupakan data yang dianggap telah menjadi informasi sehingga mudah untuk menarik kesimpulan. Jenis data ini antara lain: informasi yang langsung diterima dari hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung di lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk efektifitas penelitian ini, dalam pengumpulan data, penulis memilih beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Dalam pelaksanaan teknik pengumpulan data ini penulis mengadakan pengamatan langsung, yakni mengadakan pengamatan langsung di lapangan terutama pada proyek-proyek pembangunan, baik yang sedang

dilaksanakan maupun yang selesai dilaksanakan antara lain : pembangunan jalan, jembatan.

b. Interview

Dalam pelaksanaan teknik pengumpulan data dalam study kasus, maka penulis mengadakan wawancara langsung dan terbuka kepada 60 orang responden yang telah dipilih sebagai sampel dari seluruh populasi yang terdiri dari unsur pemerintah Kecamatan, unsur pemerintah Desa Labessi, Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, dan pengurus Lembaga-lembaga desa dan tokoh masyarakat sebagian masyarakat yang telah dipilih pada pembahasan sub D.2..

5. Analisa Data

a. Kwalitatif

Data kuantitatif yang diperoleh adalah bersumber dari pengamatan dan wawancara dengan memberikan kategori sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif dan tidak efektif atau dalam analisa lain digunakan istilah berfungsi, kurang berfungsi, tida berfungsi.

b. Kwantitatif

Dalam menganalisa seluruh data yang diperoleh penulis menganalisa dengan menggunakan metode sederhana yakni metode perhitungan presentase.

Untuk menarik kesimpulan penulis menggunakan

kerangka berfikir deduktif dan induktif, yakni seluruh hasil wawancara dari idem-idem kategori disimpulkan berdasarkan presentase yang dominan dan terdapat beberapa persoalan khusus disimpulkan secara keseluruhan dengan permasalahan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara global tentang isi skripsi ini, penulis menyusun dalam lima bab sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian desa/kelurahan, pengertian pembangunan desa, tujuan dan sasaran pembangunan desa.

Bab ketiga adalah gambaran umum lokasi penelitian dalam bab ini penulis menguraikan tentang letak geografis dan demografis, keadaan sarana dan prasarana, struktur organisasi.

Bab keempat adalah pembahasan hasil penelitian, dalam bab ini penulis menguraikan tentang pelaksanaan pembangunan, kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat yang terdiri dari terbatasnya dana, kurang

berfungsinya lembaga-lembaga desa, kurangnya tenaga terampil. Langkah-langkah pemecahan masalah yang terdiri dari mengatasi keterbatasan dana, mengfungsikan lembaga/organisasi masyarakat desa, mengatasi tenaga terampil.

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Desa/Kelurahan

Desa dan Kelurahan adalah merupakan dua istilah yang mempunyai persamaan dan perbedaan. Dalam hubungannya dengan judul skripsi ini telah tegas istilah pembangunan pedesaan menjadi topik pembahasan, di pihak lain wilayah penelitian berlokasi di Kelurahan. Untuk itu sebelum lebih jauh mengemukakan kensepsi tentang Desa dan Kelurahan, dan pembangunan pedesaan itu sendiri.

Menurut I Nyoman Beratha adalah sebagai berikut :

"Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu "badan hukum" dan ada pula Badan Peemerintah yang merupakan bagian wilayah Kecamatan atau wilayah yang melindunginya", (1985 : 27).

Dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 309/IX/1973, Bab I Pasa 1 ayat (1) bahwa "yang dimaksud dengan Desa adalah suatu kesatuan wilayah Pemerintahan terendah tingkatannya dalam hirarki administratif berada di dalam Daerah Otonom Tingkat II.

Mennurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 1977 tentang Penetapan jumlah desa di seluruh Indonesia dinyatakan bahwa "Desa adalah suatu kesatuan wilayah pemerintah terendah tingkatannya dalam hirarki administratif berada di dalam Daerah otonom Tingkat II".

Selanjutnya pengertian desa menurut undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan Desa dalam arti luas yang meliputi Desa dan Kelurahan. Yang dimaksud dengan Desa dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa dalam pengertian desa terdapat adanya unsur-unsur sebagai berikut :

1. Sebagai satu wilayah dalam arti teritorial.
2. Ditempati oleh sejumlah penduduk.
3. Mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat.

Pengertian penyelenggaraan rumah tangganya sendiri sebagai dimaksud dalam Undang-Undang No.5 tahun 1979, tidaklah sama dengan pengertian mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang No.5

tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Hal ini sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun yang mengemukakan bahwa :

"Hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri bukanlah hak otonomi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah".(H.Soemarno, 1984: 40)

Dari penjelasan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1979 dimaksudkan, jelas bahwa Desa mempunyai hak otonomi, namun hak otonomi Desa berbeda dengan hak otonomi Daerah, letak perbedaannya adalah :

1. Otonomi Desa pada hakekatnya tumbuh di dalam masyarakat dan diperoleh secara tradisional dengan bersumber dari hukum adat, misalnya menjalankan pemerintahan desa, pengeluaran memilih kepala desanya, menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran desa dan lain sebagainya.
2. Otonomi daerah pada hakekatnya sebagai pendistribusian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan prinsip desentralisasi, yang pelaksanaannya secara formil oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan Peraturan perundang-undangan.

Dalam perjalanan sejarah bisa terjadi, dan memang ada terjadi perubahan-perubahan bobot otonomi Desa sedemikian rupa, sehingga pada suatu waktu dapat dikemukakan satuan-satuan masyarakat yang tidak



lagimenjadi otonomi Desa, dengan perkataan lain sebagian atau seluruh hak-hak dan kewenangannya sebagai masyarakat hukum tidak berfungsi lagi. Pada umumnya hal itu terjadi apabila :

1. Penduduk suatu Desa semakin heterogen sehingga sukar ditentukan, hukum adat di mana yang dapat berlaku dalam masyarakat bersangkutan.
2. Aspek-aspek kehidupan masyarakat yang selama ini, diselenggarakan oleh Desa, oleh satu dan lain alasan berdasarkan ketentuan yang lebih tinggi diselenggarakan oleh Pemerintah yang lebih atas.
3. Kegiatan ekonomi sekunder dan tertier semakin besar sehingga diperlukan penataan kembali terhadap tata ruang fisik dan tata masyarakat Desa yang bersangkutan menurut norma-norma yang lebih tinggi.

Perubahan bobot otonomi Desa mengakibatkan desa-desa yang bersangkutan tidak lagi memiliki otonomi Desa, sehingga status otonomi Desa berubah menjadi Desa Administratif. Desa administratif inilah yang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dikenal dengan sebutan "Kelurahan".

B. Pengertian Pembangunan Desa

Pada uraian di atas telah diberikan pengertian tentang Desa/Kelurahan, untuk itu perlu diberikan pengertian mengenai istilah "Pembangunan dan Pembangunan Desa".

Berbicara tentang pembangunan Desa, maka hendaknya yang kita pikirkan adalah pembangunan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dan Pembangunan masyarakat desa sebagai suatu istilah yang berbeda dan dapat dijelaskan bahwa kedua istilah tersebut juga dikenal di dunia internasional yaitu pembangunan masyarakat desa sebagai "Community Development" yang mengandung dengan pendekatan kemasyarakatan, partisipasi masyarakat dan pengorganisasian masyarakat.

Dalam hubungan ini, pendekatan, pengorganisasian dan pelaksanaannya berorientasikan sepenuhnya pada inisiatif dan kereasi masyarakat. Sedangkan pembangunan desa sebagai "rural development" mempunyai arti yang lebih luas dimana pengertian pembangunan masyarakat desa sudah tercakup di dalamnya, bahkan sekaligus terintegrasi di dalamnya, bahkan terintegrasi pada usaha Pemerintah dan masyarakat yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan.

Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian/istilah pembangunan desa adalah lebih luas dan lebih tepat. Pembangunan desa dapat dikatakan sudah menjadi metode yang merupakan suatu kebulatan, terdiri dari komponen-komponen satu sama lain yang saling berkaitan, dimana pembangunan masyarakat salah satu komponen yang penting dan menentukan yang harus dibangun secara utuh bersama-sama dengan lingkungan fisik maupun lingkungan hidupnya.

Selanjutnya untuk mengetahui apa pengertian Pembangunan Desa, maka ada baiknya penulis akan mengemukakan secara berturut-turut mengenai pengertian tentang pembangunan, desa dan pembangunan desa sebagai berikut :

"Pembangunan tidak lain dari pada suatu usaha perubahan dan pembangunan dari suatu keadaan dan kondisi-kondisi kemasyarakatan tertentu kepada suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan yang lebih baik", (1967 : 23).

Kemudian menurut S.P. Siagian, dalam bukunya yang berjudul "Administrasi Pembangunan" adalah sebagai berikut:

"Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan Pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa nation building", (1981 : 13).

Dari pengertian pembangunan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pembangunan merupakan suatu proses, proses berarti suatu kegiatan yang terus-terusan dilakukan meskipun proses itu dibagi menjadi tahap-tahap.
2. Pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dilakukan.
3. Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi pada pertumbuhan perubahan.
4. Pembangunan mengarah kepada modernisasi.
5. Pembangunan mengarah kepada multi dimensial yang

mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa, negara terutama aspek politik ekonomi, kultural dan administrasi.

Sebelum dikemukakan pengertian tentang pembangunan dan Desa, maka sampailah penulis pada pengertian tentang Pembangunan Desa.

Adapun pengertian pembangunan desa sebagaimana dikemukakan oleh R. Agusthoka Kuswata, adalah sebagai berikut :

"Pembangunan Desa adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat yang dalam penyelenggaraannya harus secara menyeluruh terpadu dan terkoordinasikan", (1985 : 6).

Kemudian menurut catatan resmi dalam pola gerak operasional Pembangunan Desa (Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 1964) menyatakan bahwa :

"Pembangunan Desa dalam usaha pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintahan yang terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus-menerus sistematis dan terarah sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan Negara sebagai usaha menyeluruh", (I nyoman Beratha, 1985 : 72).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa pembangunan Desa/Kelurahan adalah pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat desa diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan didasarkan pada tugas dan kewajiban masyarakat desa secara keseluruhan. Pemerintah Kelurahan dalam hubungan ini berkewajiban memberikan bimbingan,

fasilitas, pembinaan dan bantuan sesuai dengan kemampuan yang tersedia dengan arat dan kebijaksanaan pembangunan nasional, sebagaimana digariskan pada Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahun. Sedangkan wujud kewajiban masyarakat adalah peranan dan partisipasinya berbentuk swakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan, oleh karenanya baik pembangunan desa itu dilaksanakan secara terkoordinasikan dengan sebaiknya sehingga sasarnya dapat benar-benar berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan rakyat banyak.

.1h20

C. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa

1. Tujuan Pembangunan Desa

1h16

Berbicara tentang tujuan pembangunan desa, maka kita tidak dapat terlepas dalam hubungannya dengan Pembangunan Nasional, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa pembangunan desa merupakan bagian yang integral dari pembangunan-pembangunan nasional, tidak ada perbedaan antara tujuan pembangunan Desa/Kelurahan, dengan tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional secara lengkap tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai berikut :

"Pembangunan Nasional bertujuan untuk

mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai", (GBHN : 15).

Dengan demikian setiap usaha pembangunan termasuk pembangunan desa harus bertitik tolak pada tujuan pembangunan Desa, masalahnya terletak pada tujuan dan kemampuan melaksanakan pada wujud yang praktis. Bertolak dari tujuan tersebut, maka untuk ruang lingkup dari masyarakat desa yang ingin dicapai adalah:

- a. Bagaimana desa sebagai bagian masyarakat Indonesia, mencapai tingkat adil dan makmur.
- b. Keadilan dan kemakmuran desa meliputi bidang material dan spiritual.
- c. Kesadaran bahwa desa merupakan bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Pandangan hidup di desa harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan melihat tujuan tersebut di atas, maka tujuan pembangunan desa dapat dibagi atas 2 (dua) bagian, yaitu : tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan dalam pokok-pokok pengertian tentang kebijaksanaan Pembangunan Masyarakat Desa :

- a. Tujuan jangka pendek adalah untuk menaikkan taraf

penghidupan dan kehidupan rakyat (khususnya rakyat desa).

- b. Tujuan jangka panjang adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang di ridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam hubungannya dengan sasaran antara pembangunan masyarakat desa yang ditujukan untuk menaikkan produksi yang potensial yang dimiliki oleh desa, meningkatkan kesejahteraan dalam rangkaian pembangunan ekonomi. Kegiatan dan tindakan yang lebih intensif dan terarah bagi pembangunan desa akan mewujudkan pula nilai otonomi reel bebas dari segala penghidupan dan menentukan bagi suksesnya pelaksanaan pembangunan Nasional.

Dengan demikian jelas bahwa pembangunan Desa yang sedang giat-giatnya dilaksanakan hingga dewasa ini merupakan langkah nyata dalam usaha pencapaian tujuannya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dengan tujuan jangka pendek yang telah ditetapkan tersebut merupakan usaha yang dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan tujuan jangka panjang, sehingga dengan demikian tujuan jangka pendek ini merupakan tahap-tahap untuk mencapai tujuan pembangunan Desa, (jangka Panjang), yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Sasaran Pembangunan Desa

Di dalam tujuan dan aras pembangunan itu terkandung usaha untuk membangun manusia Pembangunan yaitu manusia Indonesia yang sadar akan perlunya membangun hari esok yang lebih baik dari hari ini yang percaya pada dirinya bahwa dia dapat memperbaiki kehidupan dan memiliki kemampuan serta sikap yang diperlukan dalam mengubah nasibnya.

Sehubungan dengan itu bahwa pembangunan Desa dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang sarannya seperti apa yang dikatakan dalam buku "Rencana Pembangunan Lima Tahun ke dua bahwa :

"Sasaran utamanya adalah tercapainya landasan yang kuat bagi masyarakat desa untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri mesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai penghasil bahan pangan, bahan mentah untuk keperluan industri serta tenaga kerja, maka pembangunan desa itu dititik beratkan pada sektor pertanian", (Repelita II dan III, 1975 : 81)

Oleh karena Pembangunan Desa merupakan bagian dari Pembangunan Nasional, juga terdiri dari beberapa aspek kehidupan dan kehidupan masyarakat yang mempunyai arah atau sasaran tertentu. Untuk jelasnya sasaran tersebut, dikemukakan sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis

Kalau sasaran strategis pembangunan Nasional

meliputi seluruh ruang lingkup wilayah Negara dalam berbagai tingkatan atau namanya ditinjau dari segi pembagian tingkatan atau namanya ditinjau dari segi pembagian wilayah pemerintahan, maka khususnya untuk Desa yang merupakan wilayah pemerintahan yang terendah dalam hirarkhi administrasi pembangunannya ditujukan kepada seluruh masyarakat dalam wilayah yang bersangkutan, yaitu yang berdiam di daerah pedesaan.

Penentuan sasaran terhadap masyarakat di daerah pedesaan ini bagi pelaksanaan pembangunan terutama disebabkan karena adanya ciri khusus yang terdapat di daerah pedesaan dibandingkan dengan wilayah lainnya yang justru memerlukan pula adanya ciri khusus pembangunan yang berbeda dengan wilayah lainnya seperti perkotaan sebagai akibat dari adanya perbedaan struktur daerah pedesaan dengan struktur daerah perkotaan dengan masalah yang berbeda pula. Dengan keadaan dan masalah inilah yang juga sekaligus menyebabkan pembagian/penyebaran atau perbedaan jenis pembangunan menurut sasaran wilayahnya itu daerah pedesaan dan daerah perkotaan.

Untuk itu, maka jelas bahwa sasaran strategi pembangunan desa sesuai dengan nama dan istilahnya resminya yaitu masyarakat di daerah pedesaan atau

dengan istilah resminya yaitu "Desa" (meliputi fisik desa dan manusianya). Dengan kata lain bahwa pembangunan desa ditujukan untuk membangun masyarakat yang berbeda atau berdiam di desa-desa dan sekaligus pula sebagai pelaksana pembangunan untuk kepentingan sendiri.

Dengan demikian dari segi ruang lingkup dan sasaran pembangunan desa meliputi seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dimaklumi karena desa yang setingkat dengan kelurahan seluruh wilayah negara, sehingga dengan demikian pada dasarnya pembangunan yang dilaksanakan dimanapun di seluruh wilayah Indonesia adalah termasuk yang dilaksanakan di Kelurahan yang merupakan Desa di daerah perkotaan hanya berbeda dari segi keadaan dan diantara wilayah tersebut.

b. Sasaran Aspek

Di samping adanya sasaran strategi pembangunan yaitu Desa dan Masyarakat, maka dikenal pula adanya sasaran aspek yang merupakan bidang-bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat yang harus dibangun melalui pembangunan desa tersebut.

Dengan bertitik tolak pada hakekatnya pembangunan itu yang akan membentuk manusia seutuhnya, maka maksud dan tujuan pembangunan inti ditujukan pada usaha pembangunan terhadap seluruh



aspek kehidupan. Dengan demikian ~~secara~~ bersama-sama kita dapat lihat dari pada aspek-aspek yang meliputi baik aspek fisik materiil maupun non materiil, bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, politik dan bidang kehidupan lainnya yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan.

Pembangunan berbagai aspek/bidang ini harus pula dilakukan secara serasi, selaras dan seimbang, karena dengan keserasian, keselarasan dan keseimbangan yang dapat mewujudkan masusia Indonesia sebagaimana yang diharapkan.

Sehubungan dengan itulah, maka jelas kiranya mengenai sasaran pembangunan desa yaitu meliputi, seluruh kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Sasaran pembangunan pada umumnya, juga dengan jelas dikemukakan dalam ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan bahwa :

"sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kenyataannya sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sedangkan titik berat pembangunan jangka panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, yang berarti sebagian besar dari usaha pembangunan diarahkan kepada pembangunan di bidang lainnya menunjang dan melengkapi bidang ekonomi", (GBHN, 1988 : 56).

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan Demografis

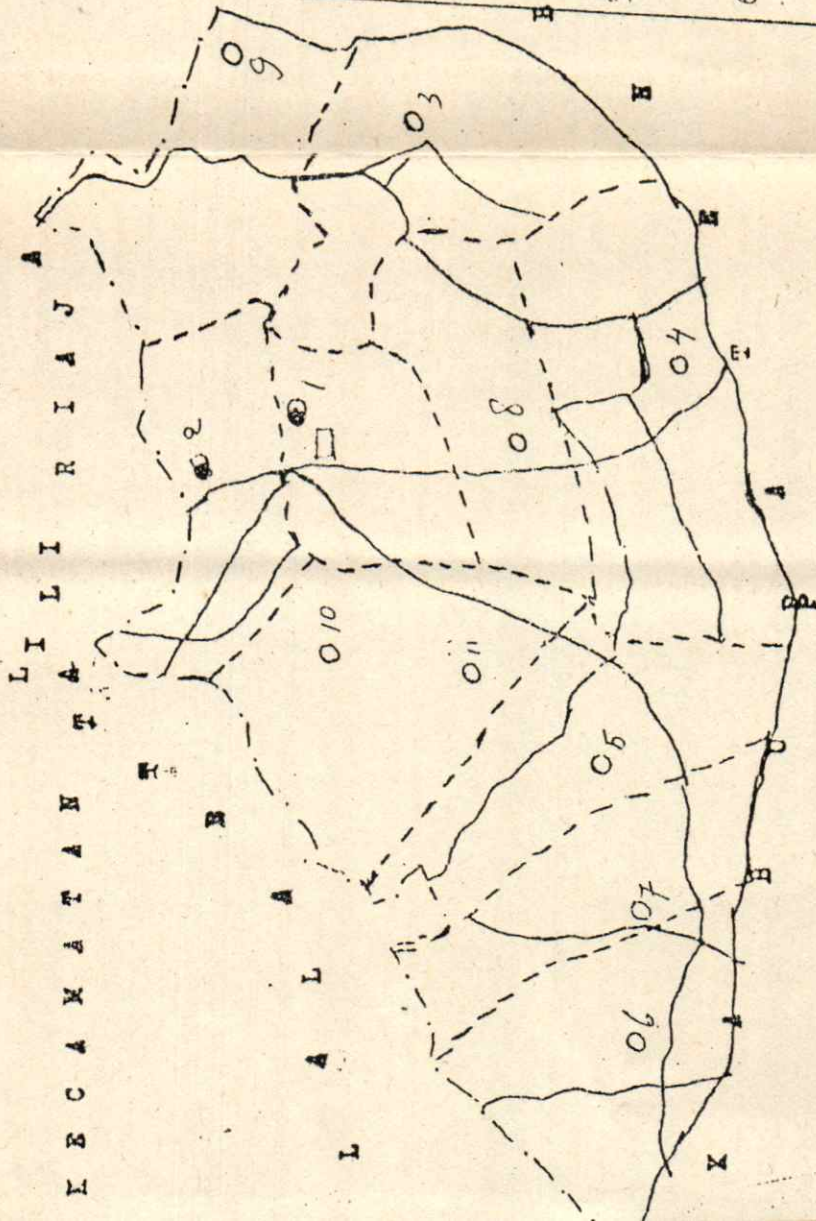
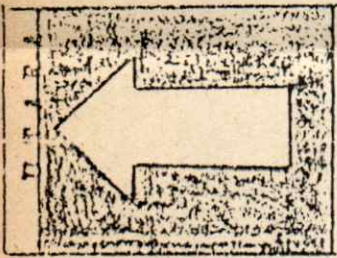
Secara geografis Kelurahan Labessi adalah salah satu diantara 5 (lima) Desa/Kelurahan di KEcamatan Mario-Riwawo Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng yang terletak sekitar 150 km di sebelah utara Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan atau 16 km dari Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng.

Daerah ini berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan air laut, dan secara astronomi berada pada koordinat $4^{\circ} 42'$ - BT dan $129^{\circ} - 06.13'$ BT.

Kelurahan Labessi merupakan daerah strategis dengan mudah dijangkau oleh peneliti, karena terletak tepat dalam jalan lalu lintas angkutan darat (jalan propinsi) terutama jalur angkutan bagi pedagang yang akan ke Ujung Pandang yaitu pedagang dari Kabupaten Wajo, Soppeng dan sebagian dari Kabupaten Luwu.

Secara administratif pembagian wilayah Kelurahan Labessi, mempunyai luas sebanyak $1.602,28 \text{ km}^2$ dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan JennaE Kecamatan Liliriaja.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mariorilau Kecamatan Mario-Riwawo.



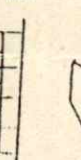
1. KELURAHAN KARORANING
2. KELURAHAN KARORANING
3. DESA KARORANING
4. DESA KARORANING
5. DESA KARORANING
6. DESA KARORANING
7. DESA KARORANING
8. DESA KARORANING
9. DESA KARORANING
10. DESA KARORANING
11. DESA KARORANING

- : BATAS KABUPATEN
- : BATAS KECAMATAN
- : BATAS KELURAHAN
- : IBUKOTA KECAMATAN
- : IBUKOTA DESA
- : IBUKOTA KELURAHAN

PROYEK : ... / ... / ...

KEPERINGAN GAMBAR PROJEK

PROYEK PEMB. PONDOK ...



OLEH :

Handwritten signature and name of the drafter.

DISTINGGSI OLEH :

Handwritten signature and name of the reviewer.

PROYEK PEMULUTAN ...

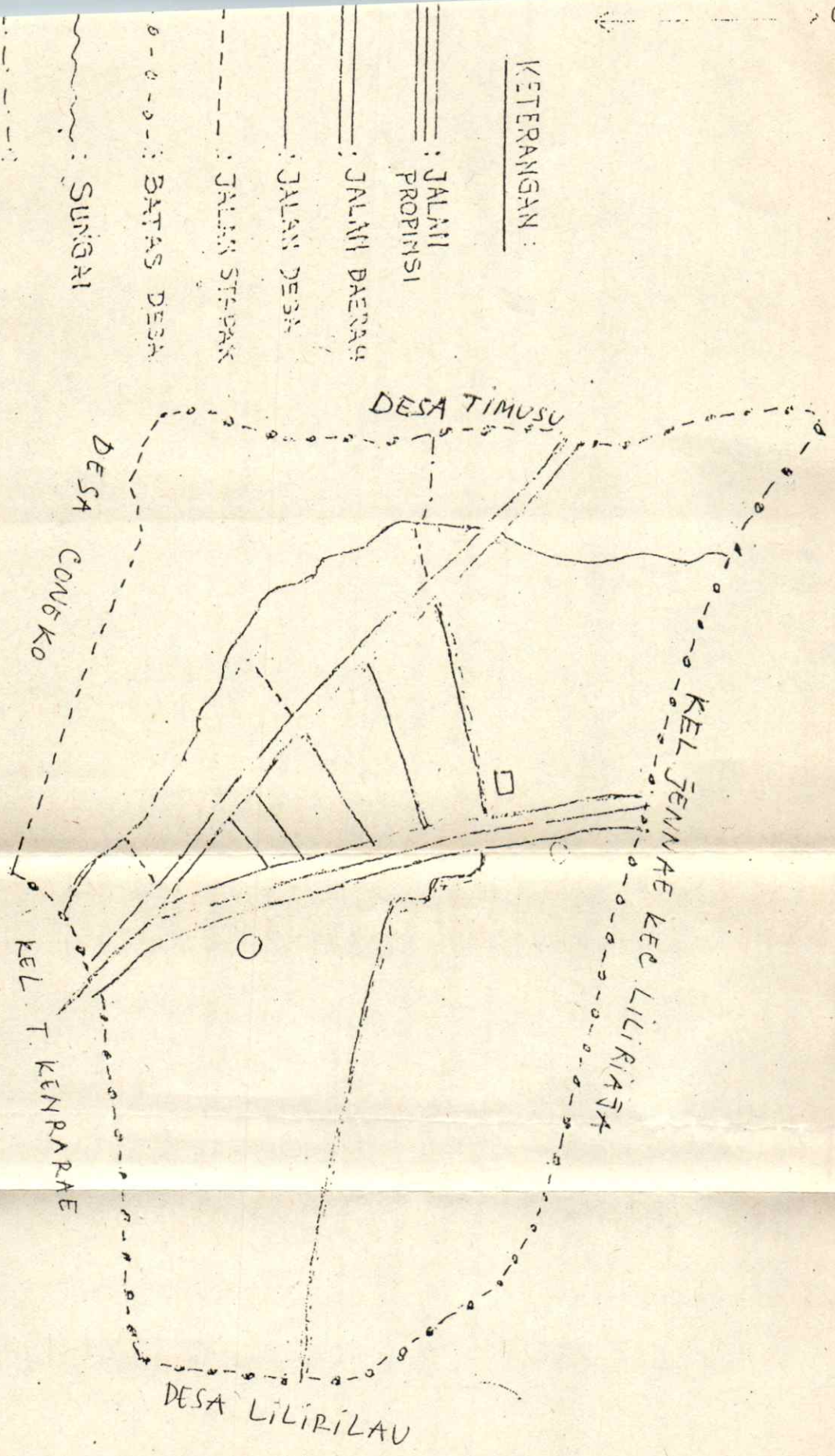
PROYEK PEMULUTAN ...

PROYEK PEMULUTAN ...

PROYEK PEMULUTAN ...

PETA KELURAHAN LABESSI

SKALA: 1:25.000



KETERANGAN:

- : JALAN PROPINSI
- : JALAN DAERAH
- : JALAN DESA
- : JALAN STRIPAK
- - - - - BATAS DESA
- ~ ~ ~ SUNGAI

78

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tettikenrarde.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Timusu.

Kelurahan Labessi mempunyai luas sebanyak 1.602,28 km², yang terbagi dalam 2 (dua) Lingkungan dan 6 (enam) Rukun Warga (RW), 18 Rukun Tetangga (RT) dengan perincian pada tabel berikut ini :

TABEL I

PEMBAGIAN LUAS WILAYAH KELURAHAN LABESSI MENURUT LINGKUNGAN DAN BANYAKNYA RW DAN RT SERTA KK

No.	Lingkungan	RW	RT	KK	Luas	
					(Ha)	%
1.	Labessi	3	9	297	637,42	39,78
2.	Taleng Benteng	3	9	262	964,86	60,22
Jumlah		6	18	559	1.602,28	100,0

Sumber : Kantor Kelurahan Labessi, tahun 1992

Pada tabel tersebut diatas terlihat adanya jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang sama dari dua lingkungan di wilayah Kelurahan Labessi yakni masing-masing 3 (tiga) dan 9 (sembilan) Rukun Kampung.

Keseluruhan luas wilayah Kelurahan Labessi sebanyak

1.602,28 Ha terbagi dalam dua lingkungan, untuk lingkungan Laleng Benteng yang merupakan lingkungan yang terluas mencapai sebanyak 964,86 Ha (60,22 %). Sedangkan untuk lingkungan Labessi mencapai sebanyak 637,42 Ha

atau 39,78 % dari seluruh luas wilayah yang ada.

Apabila ditinjau dari segi penggunaan tanah seluruh wilayah Kelurahan Labessi, terlihat adanya sebagian besar dimanfaatkan untuk perkebunan rakyat dan yang lainnya dimanfaatkan untuk persawahan, perumahan dan hutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL II
LUAS WILAYAH MENURUT JENIS PENGGUNAAN TANAH DI
KELURAHAN LABESSI TAHUN 1992

NO. ! Jenis Penggunaan Tanah	L u a s	
	(Ha	! %
1 ! Persawahan	271	! 16,91
2. ! Perkebunan Rakyat	1.147	! 71,59
3. ! Perumahan	44,28!	2,76
4. ! Hutan	140	! 8,77
! J u m l a h	1.602,28!	100,00

Sumber : Kantor Kelurahan Labessi, 1992

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa luas wilayah Kelurahan yang dimanfaatkan untuk perkebunan rakyat sebanyak 1.147 Ha atau 71,59 % dari seluruh luas wilayah, jenis tanaman perkebunan yang ditanami oleh masyarakat pada umumnya tanaman coklat di samping itu tanaman buah-buahan yaitu pisang, mangga dan kelapa. Selain itu dimanfaatkan pula untuk persawahan seluas 271 Ha (16,91). Hutan sebanyak 140 Ha (8,74) dan perumahan, jalan dan lapangan serta prasarana lainnya sebanyak 426 Ha atau

2,76 %. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa potensi wilayah Kelurahan Labessi merupakan daerah perkebunan.

Selanjutnya apabila dilihat keadaan luas wilayah yang dihubungkan dengan keadaan penduduk akan nampak kepadatan penduduk Kelurahan Labessi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-riwawo masih tergolong sedang, dimana tingkat kepadatan penduduk rata-rata 0,58 orang setiap Ha atau sekitar 1,71 orang per Ha. Untuk jelasnya tingkat kepadatan penduduk Kelurahan Labessi, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL III
TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK KALURAHAN LABESSI
PERLINGKUNGAN, TAHUN 1992

No	Lingkungan	Luas	Banyaknya (orang)	Kepadatan per-Ha
1.	Labessi	637,42	1.579	2,47
2.	Laleng Benteng	964,86	1.154	1,19
Jumlah		1.602,28	2.733	4,66

Sumber Data : Kantor Kelurahan Labessi, tahun 1992

Pada tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa tingkat kepadatan penduduk setiap lingkungan di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-riwawo tidak sama. Untuk lingkungan Labessi merupakan lingkungan yang terpadat penduduknya yakni 2,47 orang/Ha. Sedangkan untuk lingkungan Laleng Benteng hanya mencapai kepadatan

penduduk 1,19 orang/Ha.

Keseluruhan jumlah penduduk Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-riwawo dapat digambarkan pada beberapa aspek antara lain keadaan penduduk menurut jenis kelamin, menurut umur, dan tingkat pendidikan, menurut mata pencaharian, menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keadaan jumlah penduduk ini dianggap perlu, dimana dapat dihubungkan dengan pelaksanaan pembangunan.

Jumlah penduduk Kelurahan Labessi sebanyak 2.733 orang. Apabila dilihat dari jenis kelamin nampaknya tingkat sex ratio masih tergolong sedang, dimana jumlah penduduk perempuan cenderung lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki, kendatipun tidak terlalu jauh perbandingannya. Namun untuk lebih jelasnya keadaan penduduk menurut jenis kelamin di Kelurahan Labessi, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL IV

KEADAAN PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DI
KELURAHAN LABESSI KECAMATAN MARIO-RIWAWO
TAHUN 1992

No.	Jenis Kelamin	Banyaknya.	Persen (%)
1.	Laki-laki	1.263	46,28
2.	Perempuan	1.470	53,79
J u m l a h		2.733	100,00

Sumber : Kantor Kelurahan Labessi, Tahun 1992

Pada Tabel tersebut di atas nampak bahwa jumlah penduduk Perempuan sebanyak 1.470 orang atau 532,79 % dari seluruh jumlah penduduk. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.263 orang (46,21 %). Apabila dihitung sex ratio dapat dinyatakan bahwa setiap 100 orang perempuan terdapat sebanyak 85,9 orang laki-laki.

Ditinjau aspek umur dari keadaan jumlah penduduk dapat digambarkan mengenai jumlah usia produktif dan non produktif, sekaligus menjadi dasar dalam melihat potensi pengembangan umur penduduk dimasa yang akan datang, dimana untuk umur 1 - 9 tahun akan menjadi usia produktif dimana harus di usahakan perluasan kesempatan kerja termasuk pembinaan pemuda dalam kategori 15 - 25 tahun. Untuk lebih jelasnya keadaan penduduk menurut tingkatan umur di Kelurahan Labesi. dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL V
KEADAAN PENDUDUK MENURUT UMUR DI KELURAHAN
LABESSI KECAMATAN MARIO-RIWAWO
TAHUN 1992

No. ;	Kemompok umum	Banyaknya	Persen(%)
1. ;	1 - 9 tahun	464	16,98
2. ;	10 - 14 tahun	236	8,64
3. ;	15 - 24 tahun	542	19,83
4. ;	25 - 54 tahun	1.142	41,79
5. ;	55 tahun ke atas	349	12,76
Jumlah		2.733	100,00

Sumber : Kantor Kelurahan Labessi, Tahun 1992

Pada tabel tersebut di atas nampaknya jumlah penduduk anak-anak dalam kelompok umur 1 - 9 tahun sebanyak 464 orang atau 16,98 % dari seluruh jumlah penduduk, untuk umum 10 - 14 tahun sebanyak 236 orang atau 8,64 %. Kemudian untuk kelompok umur remaja 15 - 24 tahun sebanyak 542 orang atau 19,83 %. Sedangkan untuk kelompok umur 25 - 54 tahun sebanyak 1.142 orang (41,79 %) dan kelompok umur 55 tahun ke atas 349 orang atau 12,76 %.

Dalam kenyataan yang ada jumlah umur produktif yaitu 15 - 54 tahun sebanyak 1.648 orang atau 61,62 % dari seluruh jumlah penduduk, sedangkan kelompok umur non produktif yaitu 0 - 14 tahun dan 55 tahun ke atas sebanyak 1.049 orang atau 38,38 %. Dengan demikian tingkat dependency ratio masih rendah dimana jumlah penduduk usia produktif masih jauh lebih tinggi dari jumlah penduduk usia non produktif.

Di tinjau dari segi lain setiap daerah dapat pula digambarkan mengenai keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan, dimana dapat diketahui kemampuan penduduk dari segi pendidikan formal.

Khususnya di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo, nampaknya tingkat pendidikan masyarakat relatif masih rendah, dimana pada umumnya pada umumnya masih tamat Sekolah Dasar, bahkan masih ada yang tidak tamat Sekolah Dasar.

Selanjutnya bila dilihat keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan, dapat dinyatakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng masih rendah hal ini terlihat dengan adanya sebagian besar penduduk yang masih tamat Sekolah Dasar (SD), ditambah dengan adanya penduduk yang belum pernah tamat Sekolah Dasar (SD). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

TABEL VI

KEADAAN PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
DI KELURAHAN LABESSI TAHUN 1992

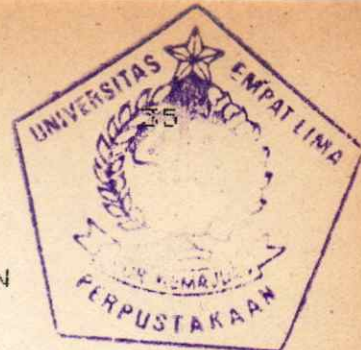
No.	Tingkat Pendidikan	Banyaknya (orang)	Persen(%)
1.	Tidak tamat Sekolah Dasar (SD)	523	19,14
2.	Tamat Sekolah Dasar	1.570	57,44
3.	Tamat Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP)	367	13,43
4.	Tamat Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA)	254	9,29
5.	Tamat Sarjana Muda	6	0,22
6.	Sarjana	13	0,48
Jumlah		2.733	100,00

Sumber : Kantor Kelurahan Labessi, Tahun 1992

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, nampak bahwa jumlah penduduk Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo yang masih tamat Sekolah Dasar sebanyak 1.570 orang atau 57,44 %, ditambah dengan 523 orang (19,14 %) yang tidak tamat sekolah Dasar. Untuk penduduk yang tamat Sekolah Menengah Tingkat Pertama sebanyak 367 orang atau 13,43 %. Sedangkan yang tamat Sekolah Menengah Tingkat Atas sebanyak 254 orang atau 9,29 % dan yang tamat Sarjana Muda sebanyak 6 orang atau 0,22 % dan yang tamat Sarjana sebanyak 13 orang 0,48 %.

Di pihak lain keadaan penduduk ditinjau dari segi sumber mata pencaharian, hal ini dapat menggambarkan jumlah tenaga kerja yang potensial sebagai alternatif pengembangan potensi manusia sebagai sumber utama pembangunan.

Jumlah tenaga kerja yang ada di Kelurahan Labessi sebanyak 1.427 orang, yang terbagi dalam berbagai jenis mata pencaharian, mulai dari pertanian, industri kecil dan kerajinan, buruh, pedagang termasuk angkutan, pegawai dan pensiunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :



TABEL VII

KEADAAN PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN
DI KELURAHAN LABESSI TAHUN 1992

No. :	Jenis Mata Pencaharian	Banyaknya (orang)	Persen (%)
1. :	Petani	1.200	81,52
2. :	Pengrajin Industri Kecil	89	6,05
3. :	Buruh Bangunan	60	4,08
4. :	Perdagangan	26	1,77
5. :	Pegawai Negeri Sipil	87	5,91
6. :	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	4	0,27
7. :	Pensiunan	6	0,40
Jumlah		1.472	100,00

Sumber : Kantor Kelurahan Labessi, Tahun 1992

Apabila jumlah penduduk yang bekerja pada tabel VII tersebut di atas dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada tabel V, yakni umur 15 - 54 tahun dapat dinyatakan bahwa tingkat pengangguran masih relatif rendah, dimana jumlah tenaga kerja mencapai sebanyak 81,52 % dari jumlah angkatan kerja.

Keseluruhan jumlah tenaga kerja produktif tersebut terdapat sebanyak 1.200 orang yang bekerja sebagai petani atau 81,52 % dari seluruh jumlah tenaga kerja. Kemudian yang bekerja sebagai pengrajin Industri Kecil sebanyak 89 orang atau 6,05 % dan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 60

orang atau 4,08 %. Sedangkan yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 26 orang atau 1,77 %, Pensiunan sebanyak 6 orang dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebanyak 4 orang atau 0,27 %.

Di pihak lain keadaan penduduk Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo, dilihat dari sudut agama dan kepercayaan, nampaknya tidak dapat dibedakan, dimana secara keseluruhan jumlah penduduk memeluk agama Islam, ini berarti dalam pembangunan di bidang spiritual sasaran dan kerangka berfikir yang mendasar diterapkan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam dalam kontek Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

C. Struktur Organisasi

Dalam uraian tentang organisasi Pembangunan Desa/Kelurahan di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo, sudah barang tentu hanya diuraikan keadaan struktur organisasi itu sendiri. Untuk itu sebelum diuraikan, struktur organisasi Pemerintahan Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo perlu diberikan pengertian organisasi dan struktur organisasi itu sendiri.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, dinyatakan bahwa : "Organisasi adalah suatu bentuk kerja sama orang-orang berdasarkan suatu perjanjian untuk bekerja sama guna mencapai tujuan bersama yang tertentu", (1982 : 87)

Dari pengertian organisasi tersebut, dipetik makna bahwa apabila kelompok orang-orang yang bekerja sama sudah cukup kompleks, seperti halnya organisasi pemerintah Labessi, perlu ada kejelasan dari pada tugas-tugas dan kewajiban para orang-orang yang bekerja sama tersebut seperti :

"Struktur organisasi adalah rangka yang menunjukkan segenap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi, hubungan antara fungsi-fungsi serta wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap anggota yang memikul tiap-tiap tugas pekerjaan", (The Liang Gie, 1983 : 71).

Dengan adanya struktur organisasi, maka setiap anggota memahami apa yang menjadi tugasnya, sejauh mana hubungan antara fungsi-fungsi dengan fungsi dari satuan organisasi lainnya dalam rangka usaha pencapaian tujuannya. Dengan demikian akan membantu Pimpinan dalam mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di kemukakan bahwa "Pemerintah Kelurahan, Perangkat Kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan, Kepala-kepala Lingkungan dan Kepala-kepala Urusan". Dengan demikian, maka struktur organisasi Pemerintahan Kelurahan terdiri dari 3 Unsur yaitu :

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Kelurahan
2. Unsur Pelayan, terdiri atas :
 - a. Sekretaris Kelurahan

b. Kepala-Kepala Urusan

3. Unsur Pelaksana Tugas wilayah adalah kepala-kepala Lingkungan

Untuk menegaskan pola/tata pembagian dan hubungan kerja bagi unit-unit organisasi pemerintahan Kelurahan, maka kedudukan, tugas dan fungsi unit-unit kerja dalam struktur organisasi Pemerintahan Kelurahan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kedudukan tugas pokok dan fungsi Kepala Kelurahan

a. Kepala Kelurahan

Kepala Kelurahan berkedudukan sebagai alat Pemerintahan yang berada langsung di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupa/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.

Sesuai dengan kedudukan dimaksud, maka Kepala Kelurahan mempunyai tugas pokok sebagai penyelenggaraan dan penanggung jawab di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, melaksanakan tugas dari pemerintah

atasannya, melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan, melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, di bidang pembangunan dan melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban.

b. Sekretaris Kelurahan

Sekretaris Kelurahan berkedudukan sebagai unsur pelayan/staf di bidang ketata-usahaan Kepala Kelurahan dan memimpin sekretariat Kelurahan.

Sesuai dengan kedudukan dimaksud, sekretaris Kelurahan mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan pembinaan dan melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan di bidang ketata-usahaan kepada Kepala Kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan, melaksanakan urusan keuangan dan urusan administrasi umum, dan melaksanakan tugas Kepala Kelurahan apabila Kepala Kelurahan berhalangan melaksanakan tugasnya.

c. Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Kelurahan untuk memberikan pelayanan ketata-usahaan kepada Kepala Kelurahan

sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Sesuai dengan kedudukannya, maka kepala urusan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ketata-usahaan dalam bidang tugasnya masing-masing.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Kepala Urusan mempunyai fungsi melaksanakan pencatatan, pengumpulan data/informasi yang menyangkut bidang tugasnya masing-masing.

d. Kepala Lingkungan

Kepala Lingkungan berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya.

Sesuai dengan kedudukannya, maka Kepala Lingkungan mempunyai tugas pokok untuk menjalankan kegiatan pemerintahan Kelurahan dalam kepemimpinan Kepala Kelurahan di wilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Lingkungan mempunyai fungsi untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, di samping itu juga melaksanakan kebijaksanaan Kepala Kelurahan di wilayah kerjanya.

Dengan melihat struktur organisasi tersebut, jelas terlihat pihak pemerintah di wilayah Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng, yang berkompeten dalam

wilayah pelaksanaan pembangunan desa. Akan tetapi mengingat bahwa yang bertindak sebagai pelaksana dari pada pembangunan tersebut adalah masyarakat, maka penting pula kiranya mengetahui organisasi yang menjadi wadah masyarakat di Kelurahan Lambessi untuk memberikan partisipasinya dalam pembangunan.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980, maka organisasi yang bersangkutan adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yaitu lembaga kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan yang tumbuh dan untuk masyarakat serta merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Adapun kedudukan, tugas pokok dan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 1984, bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat DEsa mempunyai kedudukan sebagai partner Kepala Desa/Kelurahan dalam perencanaan di Desa/Kelurahan. Kedudukan tersebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) mempunyai tugas

1. Membantu Kepala Kelurahan di bidang penerangan

pemangunan.

2. Menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat.
3. Menumbuhkan kondisi dinamik masyarakat dalam rangka mengembangkan ketahanan masyarakat desa/kelurahan.

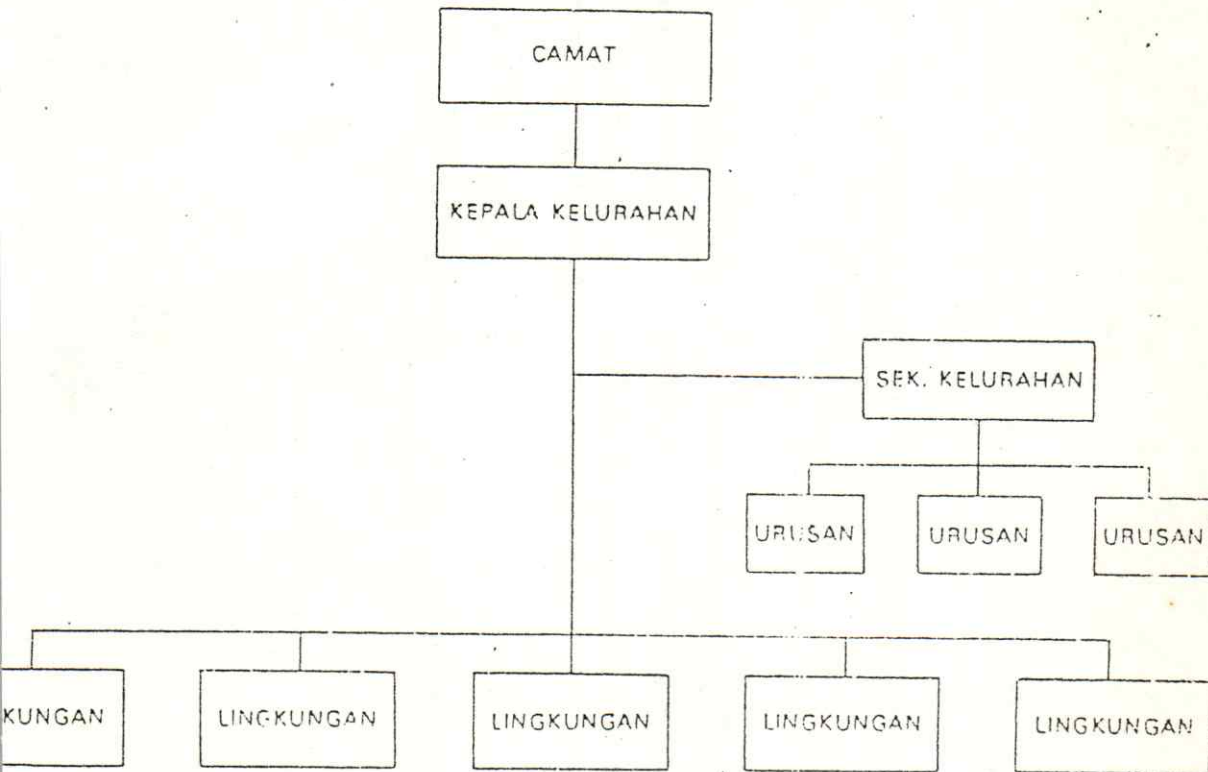
Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
2. Menanamkan pengertian dan kesadaran penghayatan dan pengamalan Pancasila.
3. Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat untuk pembangunan.
4. Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta antara warga masyarakat itu sendiri.
5. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat.
6. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan.

Untuk jelasnya struktur organisasi pemerintahan Kelurahan Labessi, dapat dilihat pada skema berikut ini :

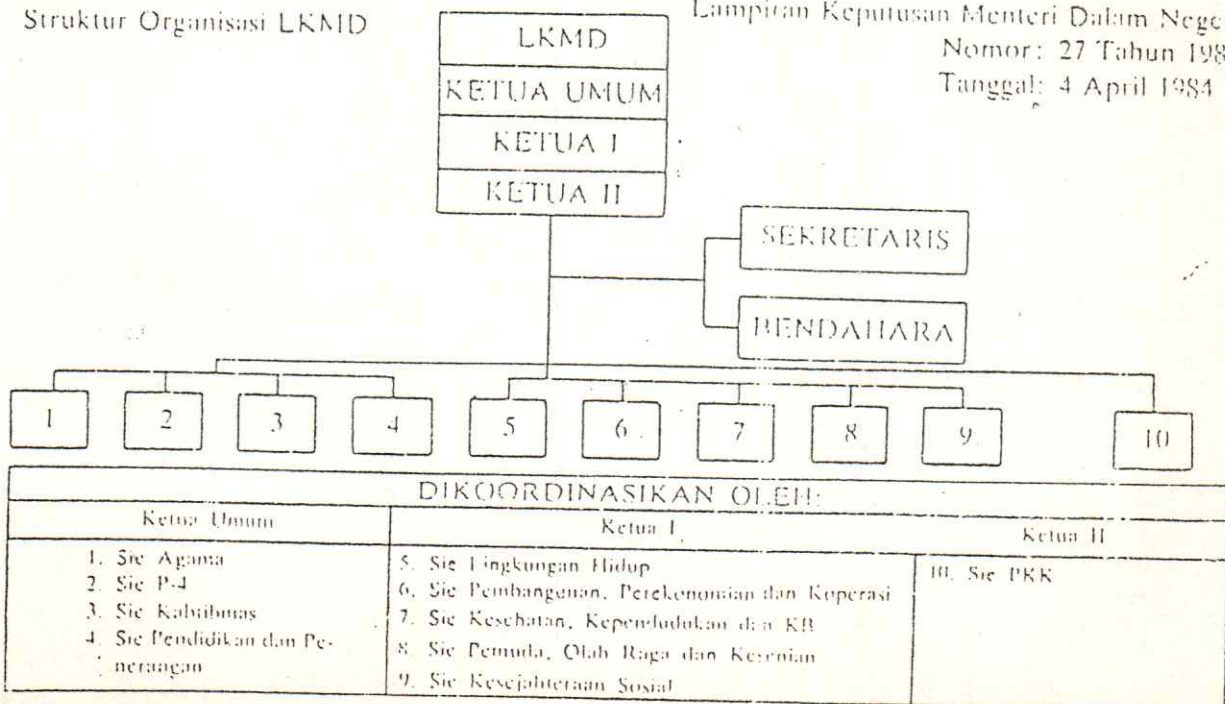
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN

Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 44 tahun 1980



Struktur Organisasi LKMD

Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri
 Nomor: 27 Tahun 1984
 Tanggal: 4 April 1984



B. Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam menggambarkan keadaan sarana dan prasarana Kantor Kelurahan Labessi, akan digambarkan keadaan sarana dan prasarana produksi pemasaran, sarana dan prasarana sosial pemerintahan desa dan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi.

1. Sarana dan Prasarana Produksi dan Pemasaran

Sarana dan prasarana produksi di daerah ini, khususnya padi/beras nampaknya masih relatif hampir kurang dimana untuk prasarana pengairan hanya tersedia pengairan setengah teknis, 3 buah dan pengairan tadah hujan sebanyak 2 buah. Prasarana tersebut mengairi sawah sebanyak 271 Ha.

Selanjutnya untuk prasarana pemasaran terutama pasar nampaknya belum ada sehingga semua penduduk yang akan membeli atau membutuhkan dan menjual barang harus menggunakan pasar pada Kelurahan tetangganya yaitu Takalala, kecuali yang ada hanya toko. Organisasi Koperasi Unit Desa yang diharapkan dapat menjadi wadah untuk membeli dan memasarkan hasil produksi nampaknya belum dibentuk, dengan demikian di Kelurahan Labessi belum tersedia sarana-sarana tetap untuk memasarkan baik membeli maupun menjual barang hasil produksi.

2. Sarana dan Prasarana Sosial

Sarana dan prasarana sosial disini digolongkan mulai dari sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan



prasarana keagamaan, sarana dan prasarana kesehatan, serta sarana dan prasarana perhubungan.

Untuk prasarana pendidikan yang tersedia sebanyak 3 buah Sekolah Dasar dan 1 buah Taman Kanak-Kanak, dengan penyediaan sarana guru sebanyak 30 orang dan murid sebanyak 306 orang. Selanjutnya untuk sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia di daerah ini hanya 4 buah posyandu atau Pusat pelayanan terpadu dan 2 orang suster.

Untuk sarana dan prasarana sosial bidang keagamaan hanya tersedia 2 buah masjid. Sedangkan sarana dan prasarana sosial lainnya yang dapat digolongkan di sini adalah Kantor Kepala Desa sebanyak 1 buah, Balai Pertemuan Masyarakat 1 buah, Pos ronda sebanyak 6 buah.

Untuk sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi, telah tersedia jalan propinsi sepanjang 3 km, jalan kabupaten 1 km dan jalan desa sebanyak 5 km. Sepanjang jalan tersebut, terdapat 6 buah jembatan. Adapun sarana perhubungan yang dimiliki masyarakat adalah kendaraan roda empat 18 buah, sepeda motor sebanyak 76 buah, sepeda 32 buah dan dokar sebanyak 32 buah.

Disamping sarana dan prasarana perhubungan darat tersebut, di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo tersedia sarana telekomunikasi yang terdiri dari

televisi sebanyak 142 buah dan radio sebanyak 45 buah serta Hendo satu buah.

Dalam pemanfaatan seluruh sarana dan prasarana tersebut telah dikoordinasikan melalui berbagai lembaga yang tersedia dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa 1 buah, kelompok tani sebanyak 8 buah, kelompok pendengar dan pemirsa 1 buah, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)/Kelompok Kerja sebanyak 18 buah dan Kejar Usaha sebanyak 20 buah, organisasi pemuda satu buah, lembaga pendidikan sebanyak 3 buah, lembaga keagamaan sebanyak 9 buah, lembaga pemerintah sebanyak 7 buah terdiri dari Rukun Warga dan Rukun Tetangga serta lembaga sosial lainnya sebanyak 4 buah.

Perlu dijelaskan bahwa seluruh lembaga-lembaga yang ada dalam proses pelaksanaan pembangunan pedesaan, masing-masing memanfaatkan seluruh sarana dan prasarana yang tersedia untuk memperlancar kegiatan kelembagaan/organisasi masyarakat desa, dimana lembaga/organisasi tersebut dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat desa itu sendiri.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam pembahasan ini dianalisis tentang pelaksanaan pembangunan desa yakni sejauh mana setiap kegiatan-kegiatan pembangunan dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk itu sebelum lebih jauh menganalisis realisasi pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo terlebih dahulu dibahas rencana kegiatan pembangunan di tinjau dari rencana tahunan mulai tahun anggaran 1987/1988 sampai dengan 1991/1992.

Selama lima tahun anggaran terakhir ini nampaknya bila dilihat total anggaran setiap tahun menunjukkan angka yang berfluktuasi, bahkan terjadi penurunan anggaran akan tetapi bila dilihat setiap bidang pembangunan, terjadi adanya perbedaan alokasi anggaran. Sedangkan untuk anggaran pembangunan bidang prasarana sosial dan prasarana Desa cenderung mengalami kenaikan. Sedangkan untuk anggaran pembangunan bidang prasarana produksi dan perhubungan cenderung menunjukkan angka yang berfluktuasi.

Namun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL VIII

JUMLAH ANGGARAN PROYEK PEMBANGUNAN DESA DI KELURAHAN LABESSI
KECAMATAN MARIO-RIMAWO TAHUN ANGGARAN 1987 - 1992
MENURUT BIDANG PEMBIAYAAN

No. Tahun anggaran 199..	Prasarana Produksi	Jenis proyek (Anggaran (Rp))				Prasarana Desa	Jumlah (Rp)
		Prasarana Perhubungan	Prasarana Pasar	Prasarana Sosial	Prasarana Pemerintahan		
1. 1987/1988	5.450.000	10.300.000	-	12.450.000	204.000	28.404.000	
2. 1988/1989	4.000.000	9.300.000	-	24.591.000	935.321	38.826.325	
3. 1989/1990	4.900.000	3.500.000	-	16.225.000	-	24.625.000	
4. 1990/1991	3.100.000	3.400.000	-	26.327.450	350.000	33.177.450	
5. 1991/1992	3.100.000	4.900.000	-	27.668.200	-	35.668.200	
Jumlah	20.550.000	31.400.000	-	107.261.650	1.489.325	159.700.975	

Sumber data : Lampiran

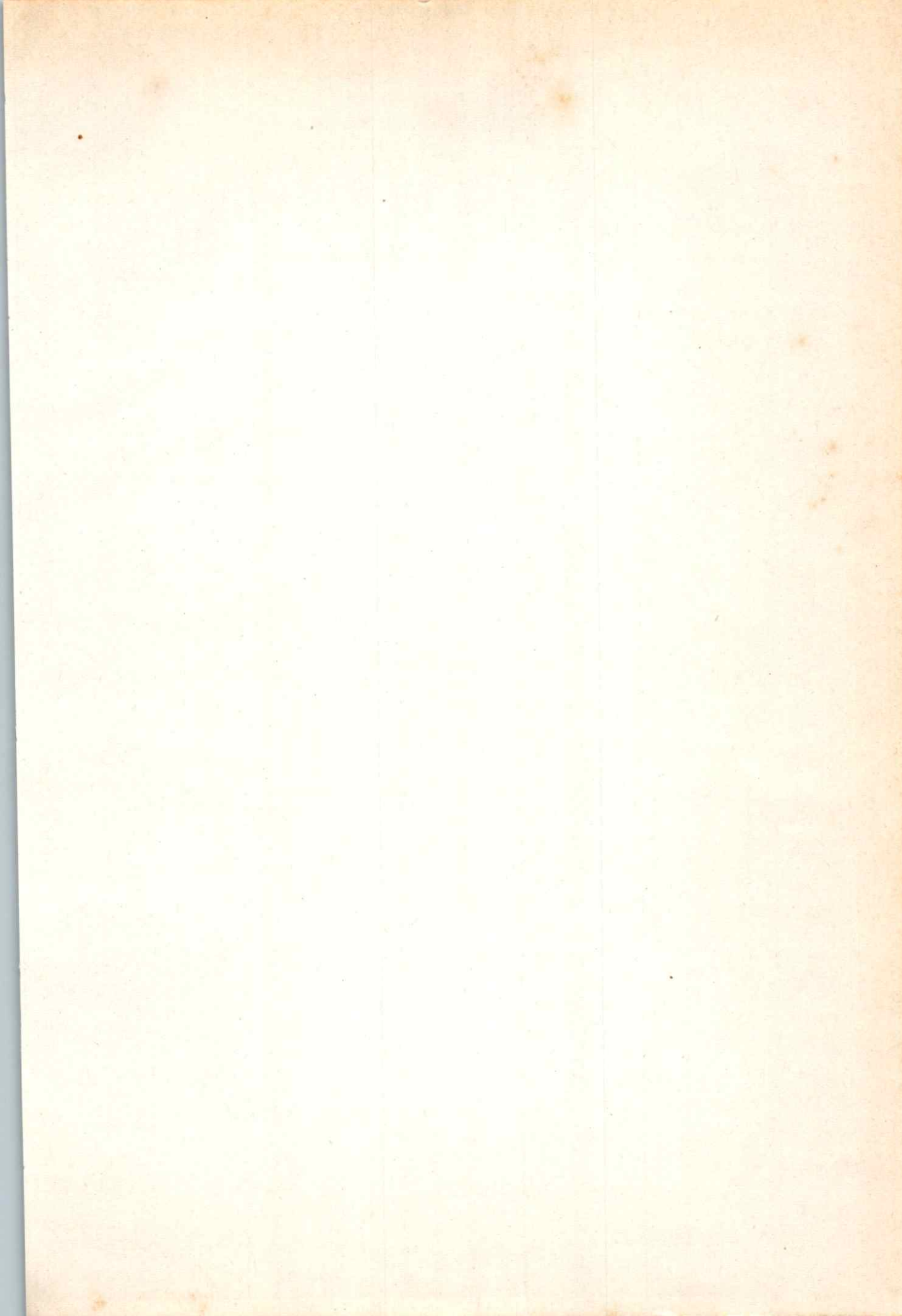
Pada Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa selama lima tahun anggaran terakhir ini total jumlah anggaran pembangunan di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo sebanyak Rp. 159.700.975, yang terdiri dari empat pos anggaran yaitu bidang proyek prasarana produksi, prasarana perhubungan dan prasarana pemerintahan Desa. Keempat bidang prasarana pembangunan tersebut yang paling besar anggarannya adalah pembangunan prasarana sosial yakni total sebanyak Rp. 107.261.650 atau 67,16 %, dari pelaksanaan jumlah anggaran pembangunan selama lima

tahun, kemudian anggaran pembangunan bidang perhubungan yakni mencapai Rp. 31.400.000,- atau 19,67 % dari jumlah anggaran pembangunan bidang produksi sebanyak Rp.20.550.000,- atau 12,87 % serta anggaran pembangunan bidang prasarana pemerintahan Desa sebanyak Rp.1.489.325,- dari keseluruhan jumlah anggaran.

Ditinjau dari segi perkembangannya, maka jumlah anggaran pembangunan di Kelurahan Labessi cenderung mengalami kenaikan setiap tahun, walaupun dalam tahun tertentu jumlah anggaran menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi.

Pada tahun anggaran 1987/1988 jumlah anggaran belanja pembangunan di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo mencapai sebesar Rp. 28.404.000,-
Selanjutnya pada tahun anggaran 1988/1989 jumlah anggaran pembangunan di Kelurahan Labessi mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan merupakan jumlah anggaran pembangunan terbesar selama lima tahun terakhir ini yakni mencapai sebesar Rp. 38.826.325,- pada tahun anggaran 1989/1990 jumlah anggaran pembangunan masyarakat Desa di Kelurahan Labessi mengalami penurunan secara dramatis yakni sebesar Rp. 24.625.000,-.

Dalam tahun anggaran 1990/1991 nampaknya jumlah anggaran pembangunan di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo mengalami kenaikan yakni sebesar Rp.33.177.450,- dan pada tahun anggaran 1991/1992 jumlah



anggaran mengalami kenaikan lagi sebesar Rp. 35.668.200,-

Apabila diamati perkembangan jumlah anggaran pembangunan masyarakat Desa di Kelurahan Labessi tersebut khususnya pada tahun anggaran 1988/1989 dimana jumlah anggaran pembangunan mencapai jumlah terbesar, hal ini dipengaruhi dengan adanya perkiraan jumlah swadaya gotong royong masyarakat pada proyek pembangunan sangat rendah yakni mencapai Rp. 22.300.000,- jumlah tersebut termasuk tenaga masyarakat yang dinilai dengan uang antara lain kegiatan gotong royong dalam melaksanakan proyek yang direncanakan. Demikian pula sebaliknya pada anggaran 1992 jumlah perkiraan swadaya gotong royong masyarakat sudah tinggi.

Setelah dibahas keadaan rencana anggaran pembangunan di Kelurahan Labessi, dapatlah dianalisis mengenai aspek pelaksanaan pembangunan. Untuk mengetahui secara nyata pelaksanaan pembangunan tersebut, penulis menganalisis setiap bidang pembangunan yang diprogramkan oleh masyarakat di Kelurahan Labessi, dimana dalam mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pembangunan, didasarkan atas perhitungan perbandingan antara target dengan realisasi pelaksanaan pembangunan masing-masing bidang.

Dari keseluruhan aspek pembangunan di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo, dapat dinyatakan bahwa tingkat pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Labessi

tergolong sudah efektif, hal ini terlihat dengan adanya rata-rata prosentasi realisasi target selama lima tahun terakhir mencapai hampir 100 %.

Di Kelurahan Labessi hanya tiga bidang pembangunan yang masih dimasukkan dalam rencana tiap tahun, sehingga pelaksanaannya-pun hanya tiga bidang juga yaitu : bidang produksi, bidang perhubungan dan bidang sosial. Ketiga bidang tersebut nampaknya tingkat efektivitas pelaksanaan relatif sama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL IX
RATA-RATA PERSENTASE REALISASI PENCAPAIAN TARGET DALAM PELAKSANAANNYA
PEMBANGUNAN DESA DI KELURAHAN LABESSI PER BIDANG
PROYEK DI TAHUN ANGGARAN 1987/1988-1991/1992

No. Tahun anggaran 199..	Bidang pembangunan (Persen) realisasi				Rata-rata
	Prasarana Produksi	Prasarana Perhubungan	Prasarana Pemasaran	Parasarana Sosial	
1. 1987/1988	99.37	100.00	Tidak ada	100.00	99.72
2. 1988/1989	94.75	98.00	-	100.00	97.00
3. 1989/1990	100	100.00	-	100.00	100.00
4. 1990/1991	100	100	-	100.00	100.00
5. 1991/1992	100	100	-	100.00	100
Jumlah	98.43	99.60	-	100.00	99.44

Sumber data : Lampiran

Kenyataan menunjukkan bahwa apabila dilihat realisasi target pembangunan desa setaiap tahun mencapai 99,34 % pada tahun anggaran 1987/1988 persentase rata-

rata realisasi target pelaksanaan pembangunan desa mencapai 99,72 % dan tahun anggaran 1988/1989 realisasi pencapaian target juga hanya mencapai 97,00 %.

Selanjutnya pada tahun anggaran 1989/1990 nampaknya realisasi pencapaian target rata-rata telah mampu direalisasikan secara keseluruhan, demikian pula pada tahun anggaran 1990/1991 dan tahun anggaran 1991/1992, semuanya telah terealisasi sesuai target yang telah ditentukan yakni mencapai 100,00 %.

Disisi lain realisasi target pelaksanaan pembangunan Desa di Kelurahan Labessi dapat dilihat dari bidang pembangunan. Dari ketiga bidang pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan Labessi, nampaknya yang paling tinggi tingkat efektivitas pelaksanaannya adalah pembangunan di bidang sosial, hal ini dapat terlihat dengan adanya rata-rata realisasi pencapaian target pelaksanaannya mencapai 100,00 %, kemudian pembangunan di bidang perhubungan dengan rata-rata realisasi pencapaian target pelaksanaan pembangunan mencapai 99,60 % dan pembangunan di bidang produksi dengan pencapaian realisasi rata-rata 98,43 %.

Berdasarkan hasil pembahasan analisis tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa secara kuantitatif tingkat pelaksanaan pembangunan dilihat dari realisasi pencapaian target tergolong sudah "efektif" dengan dasar bahwa semua target yang direncanakan setiap

tahun rata-rata hampir mencapai 100,00%.

Dalam pengukuran selanjutnya mengenai efektivitas pelaksanaan pembangunan desa di Kelurahan Labessi, dapat dilihat dari tanggapan responden sebagai hasil wawancara, hasil wawancara tersebut merupakan data lapangan yang secara kualitatif dinilai dari beberapa unsur yang terlibat dalam pembangunan desa.

Sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan Desa di Kelurahan Labessi, dapat dinyatakan bahwa secara kualitatif mutu pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Labessi relatif masih tergolong cukup efektif, hal ini dapat dibuktikan dengan sebagian besar responden yang menjadi unsur terlibat langsung dalam pembangunan desa Kelurahan Labessi relatif masih "cukup baik", penilaian tersebut dilihat dari pelaksanaan kegiatan fisik proyek, menggerakkan swadaya dan gotong-royong. Namun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL X

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN
FISIK SELURUH PROGRAM/PROYEK PEMBANGUNAN
DI KELURAHAN LABESSI

No. : Tanggapan Responden	: Frekuensi :	%
1. : Sangat baik pelaksanaanya	: 5	: 8,33 ;
2. : Baik pelaksanaanya	: 14	: 23,33 ;
3. : Cukup baik pelaksanaanya	: 37	: 61,67 ;
4. : Kurang baik pelaksanaanya	: 4	: 6,67 ;
5. : Tidak baik pelaksanaanya	: -	: - ;
Jumlah	: 60	: 100,00 ;

Sumber : Hasil wawancara responden, Agustus, 1992

Kenyataan menunjukkan bahwa pada tabel tersebut di atas, yakni dari keseluruhan jumlah responden terdapat sebanyak 37 orang atau 61,67 % menganggap pelaksanaan fisik seluruh program/proyek pembangunan desa di Kelurahan Labessi tergolong cukup baik pelaksanaanya, ditambah dengan responden yang mengatakan tergolong baik pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan sebanyak 14 orang atau 23,33 % dan yang menganggap sangat baik pelaksanaanya lima orang atau 8,33 % dari seluruh jumlah responden. Sedangkan responden yang menganggap kurang baik pelaksanaanya sebanyak 4 orang atau 6,67 % .

Dalam berbagai penjelasan yang diberikan oleh



responden terdapat beberapa diantaranya dapat dipetik sebagai argumentasi yang mendukung kasus 60 tanggapan responden diatas, antara lain :

1. Responden No. 19, mengemukakan bahwa "apabila salah satu proyek dinilai setelah selesai dilaksanakan dapat digolongkan baik. Namun dalam proses pelaksanaan pada dasarnya masih dinilai kurang baik, karena kadang kadang masih ada kegiatan yang kurang tepat waktu pelaksanaannya, antara lain dalam pembangunan irigasi dan saluran air biasanya dimulai saat air diperlukan, oleh karena musim tanam padi, sehingga saluran air kurang lancar".
2. Responden No.42, memberikan komentar bahwa "dalam pelaksanaan pembangunan saya nilai tidak tergolong baik dan tidak pula tergolong kurang baik, karena ditinjau dari aspek tujuan yang akan dicapai, sangat baik, akan tetapi bila ditinjau dari aspek perkembangan kurang cepat antara lain beberapa jalan di desa hanya dibersihkan saja tiap tahun tanpa diberikan timbunan dan atau "pengerasan jalan".

Sebagaimana ditegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan desa pada dasarnya merupakan suatu pembangunan dari oleh dan untuk masyarakat, sehubungan dengan itu maka pelaksanaan pembangunan mutlak digerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat desa.

Khususnya di Kelurahan Labessi tampaknya tingkat swadaya dan gotong royong masyarakat bila dilihat dari

realisasi anggaran yakni mencapai 80 % lebih, hal ini dapat dinilai positif tergolong "efektif" namun dipihak lain bila dinilai tingkat swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nampaknya relatif masih tergolong "cukup efektif, hal ini terlihat dengan adanya sebagian besar responden masih menilai cukup baik. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

TABEL XI

TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG SWADAYA DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT DALAM MEREALISASIKAN PROYEK/PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

No.:	Tanggapan Responden	Fekkuensi:	%
1.	Sangat baik pelaksanaan swadaya dan gotong royong	3	5,00
2.	Baik pelaksanaan swadaya dan Gotong royong	19	31,67
3.	Cukup baik	31	51,67
4.	Kurang baik	5	8,33
5.	Tidak baik	2	3,33
Jumlah		60	100,00

Sumber : diolah dari wawancara responden, Agustus 1992

Dalam mengerakkan swadaya gotong royong masyarakat, nampaknya dari seluruh responden terdapat sebanyak 31 orang (51,67 %) menganggap cukup baik dalam menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat, diikuti dengan responden yang menganggap bahwa sudah tergolong baik

pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebanyak 19 orang atau 31,67 % dan yang menganggap sangat baik pelaksanaan swadaya dan gotong royong sebanyak 3 orang atau 5 %. Sedangkan responden yang menganggap masih kurang baik dalam menggerakkan swadaya dan gotong royong baik dalam menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat untuk merelaisasikan proyek/program pembangunan desa sebanyak 5 orang atau 8,33 % dan yang menganggap tidak baik hanya 2 orang atau 3,33 %.

Dari pendapat umum responden yang menyatakan cukup baik pelaksanaan dan menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat tersebut, didukung dengan adanya kasus responden sebagai berikut :

Responden No. 13 menyatakan bahwa "swadaya dan gotong royong masyarakat, dibagi dalam dua bagian pokok namun semuanya dinilai dengan uang yaitu :

- a. Untuk masyarakat yang mempunyai kemampuan memberikan dana atau bahan, biasanya diwajibkan memberikan sumbangan uang atau bahan.
- b. Untuk masyarakat yang kurang mampu hanya diwajibkan menyumbangkan tenaganya.

Klasifikasi tersebut menurut responden terkadang menimbulkan kecemburuan sosial antara lain tuan-tuan tanah yang tidak pernah memberikan sumbangan langsung dalam pembangunan irigasi dan pengairan desa tidak pernah diwajibkan terlibat langsung dalam perbaikan saluran

irigasi. Demikian pula bagi keluarga-keluarga bangsawan dan pegawai hampir tidak pernah terlibat dalam kerja bakti dan dianggapnya sebagai kegiatan yang tidak sesuai dengan derajat kebangsawanan.

Dari penjelasan responden di atas, dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya upaya menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik dan diterima oleh sebagian besar masyarakat, namun dalam menunjukkan masyarakat yang diwajibkan bekerja keras masih kurang baik. Alasan inilah menurut penjelasan responden No. 13 secara tegas menilai pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam merealisasikan proyek/program pembangunan desa di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo cukup baik, karena suatu sisi tujuannya dinilai baik dan disini lain proses pelaksanaannya kurang baik.

Apabila ketiga tabel tersebut di atas diamati kemudian direlevansikan dengan beberapa komentar responden yang menjadi kasus, maka dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan dari pelaksanaan pembangunan desa bahwa, pelaksanaan pembangunan desa di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo, secara kualitatif realisasi pencapaian target sudah tergolong "efektif" dimana seluruh target dapat terelasisasi sesuai rencana. Di pihak lain secara kwalitayif pelaksanaan pelaksanaan pembangunan desa masih tergolong relatif

'cukup baik' hal ini di lihat dari tanggapan responden tentang kegiatan fisik dan penggerakan sehingga swadaya dan gotong royong masyarakat yang didukung dari beberapa kasus komentar responden yang mempertegas bahwa masih tergolong cukup efektif.

B. Kendala-kendala yang menjadi Faktor Penghambat

Dalam usaha untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo Kabupaten Daerah Tingkat II Sopeng, masih dihadapkan pada beberapa kendala sebagai faktor penghambat yaitu terbatasnya dana, kurangnya tenaga skill dan faktor tradisi masyarakat.

1. Terbatasnya Dana

Pada pembahasan dahulu telah dijelaskan bahwa sumber biaya yang terbesar dalam anggaran pembangunan desa di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo adalah bersumber dari hasil swadaya dan gotong royong masyarakat, yakni setiap tahun rata-rata mencapai sekitar 80 % dari seluruh jumlah anggaran pembangunan.

Sebagai bahan perbandingan pada lampiran IIe, pada tahun 1991/1992 jumlah anggaraan penerimaan di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo yang terealisasi sebanyak Rp 35.331.000,-. Dari jumlah tersebut terdapat sisa jumlah anggaran tahun anggaran yang selalu sebanyak Rp. 1.279.000,- atau 3,26 % dari

seluruh jumlah anggaran penerimaan yang direalisasikan, kemudian dana ganjaran Rp15.000,- atau 0,04 %, sumbangan dan bantuan Pemerintah Pusat sebanyak Rp.2.500.000,- atau 7,08 % yang bersumber dari Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan sebanyak Rp.2.400.000,- atau 6,80 %, sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Instansi lain sebanyak Rp. 2.250.000,- atau 6,37 %, sedangkan sumber dana yang terbesar adalah dari swadaya dan partisipasi masyarakat yang dinilai dengan uang sebanyak Rp. 27.865.000,- atau 78,92 % dari seluruh anggaran.

Perlu dipertegas bahwa sumber dana yang diperoleh dari swadaya dan gotong royong masyarakat tersebut hanya di lambangkan dengan nilai uang, antara lain setiap orang yang ikut bergotong royong dinilai Rp.5000,- /hari sudah termasuk uang makan dan transport, bahkan menurut informasi yang diperoleh bahwa sebagian besar dari nilai tersebut hanya bersumber dari tenaga, di mana masyarakat dianjurkan terlibat bekerja secara gotong royong untuk melaksanakan pembangunan. Terkecuali dalam pembangunan bidang sosial khususnya dalam pembangunan prasarana ibadah secara nyata cukup besar swadaya masyarakat yang berbentuk uang dan bahan. Namun sebelum diperjelas tentang persoalan masalah kurangnya dana

sebagai faktor penghambat, terlebih dahulu dijelaskan mengenai bentuk swadaya dan partisipasi masyarakat yang sering disumbangkan dalam pelaksanaan pembangunan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikutini :

TABEL XII

BENTUK SWADAYA DAN PARTISIPASI YANG TERBANYAK
DIBERIKAN OLEH RESPONDEN DALAM PELAKSANAAN
TIAP BIDANG PEMBANGUNAN [ADA TAHUN
ANGGARAN 1991/1992

No. Bentuk swadaya dan partisipasi masy.	Bidang pembangunan			rata-rata (%)
	Produksi (%)	Perhubungan (%)	Sosial (%)	
1. Fikiran	9 (6,67)	2 (3,33)	6 (10,00)	6,67
2. Bahan	2 (3,33)	8 (13,33)	18 (30,00)	15,55
3. Uang	1 (1,67)	1 (1,67)	22 (36,67)	13,33
4. Tenaga	34 (56,66)	47 (78,34)	14 (23,33)	52,78
5. Tidak ada	9 (31,67)	2 (3,33)	-	11,67
Jumlah	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	100,00

Sumber : Hasil wawancara responden N. 60, Agustus 1992

Catatan : * Jumlah responden 60 orang, masing masing menilai setiap bidang pembangunan.

* Pembangunan bidang prasarana pemasaran tidak diprogramkan selama 5 tahun.

* Prasarana pemerintahan Desa dan lainnya digabungkan dalam anggaran pembangunan bidang

prasarana sosial.

Dalam kenyataan menunjukkan pada tabel tersebut bahwa pada tahun anggaran 1991/1992 rata-rata sebagian besar responden dalam kegiatan pembangunan masih memberikan swadaya dan partisipasinya dalam bentuk bahan 15,55 %, bentuk pikiran 6,67 % dan dalam bentuk uang 13,33 %. Sedangkan yang menyatakan tidak ada swadaya dan partisipasinya dalam bentuk apapun yakni mencapai sebanyak 11,67 %.

Dengan demikian dari jumlah dana anggaran yang direalisasikan dalam pelaksanaan pembangunan desa Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo sekitar 55 % dalam bentuk tenaga yang dinilai dengan uang, perhitungan anggaran 1991/1992 sebanyak Rp. 27.865.200,- x 55 % = Rp.15.325.860,-. Dan kasusnya yang dapat berpengaruh langsung adalah swadaya dan partisipasi dalam bentuk bahan dan uang hanya sebanyak Rp. 15,55 % + 13,33 % x Rp.27.865.200 = Rp.8.847.469,-.

Dari keseluruhan dana yang tersedia dalam pelaksanaan proyek pembangunan ini, nampaknya masih dinilai kurang memadai, baik yang bersumber dari bantuan pemerintah sebagai dana penggerak maupun dana yang bersumber dari swadaya masyarakat. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL XIII

TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KEMAMPUAN DANA
YANG TERSEDIA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DI KELURAHAN LABESSI

No.:	Tanggapan Responden	Fekuensi	%
1.	Sangat memadai untuk pengembangan	-	-
2.	Memadai untuk pengembangan	4	6,67
3.	Cukup memadai untuk pengembangan	19	31,67
4.	Kurang memadai untuk pengembangan	31	51,66
5.	Tidak memadai untuk pengembangan	2	10,00
Jumlah		60	100,00

Sumber : diolah dari wawancara responden, Agustus 1992

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sementara sehubungan dengan dana yang tersedia dalam pelaksanaan proyek pembangunan desa di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa tingkat swadaya dan gotong royong masyarakat tergolong tinggi tingkat partisipasi swadaya masyarakat, namun hanya sebagian besar berbentuk tenaga masyarakat yang digerakkan, kemudian dinilai dalam bentuk uang pada anggaran pembangunan. Dalam kenyataannya, sehingga pada tabel XIII, nampak sekitar 51,66 % responden memberikan tanggapan terhadap kemampuan dana tersedia masih kurang memadai untuk pengembangan, dan yang

menyebabkan tidak memadai untuk pengembangan sekitar 10%. Tanggapan lain yang ditegaskan responden yang menyatakan cukup memadai dan memadai untuk pengembangan masing-masing sebanyak 31,67 % dan 6,67%.

Penilaian responden tersebut di atas membuktikan bahwa salah satu faktor penghambat yang menjadi kendala pelaksanaan pembangunan desa di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo adalah kurangnya memadainya dana, terutama sumber dana yang berupa uang dan bahan, sebab hal ini merupakan dana yang memancing/mendorong kegiatan masyarakat desa yang lebih besar lagi.

2. Kurang Berfungsinya Lembaga-Lembaga Desa

Pelaksanaan pembangunan desa di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo dewasa ini tergolong lebih cukup efektif, ini berarti masih perlu peningkatan berbagai kegiatan. Namun dalam usaha untuk meningkatkan efektifitas kegiatan pembangunan masih dihadapkan kurang berfungsinya lembaga-lembaga masyarakat desa terutama keterbatasan dan penggerak seperti telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu.

Sebagaimana diketahui ditengah-tengah masyarakat sekarang ini, lembaga lembaga masyarakat semakin banyak tumbuh, bagaikan jamur baik yang dibetuk berdasarkan keputusan keputusan pemerintah, maupun

yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo sekarang ini terdapat sekitar 64 lembaga atau organisasi masyarakat. Jumlah organisasi lembaga masyarakat tersebut bergabung secara integral melaksanakan pembangunan masyarakat desa dalam Lembaga-lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD). Setiap seksi dalam LKMD masing-masing mempunyai lembaga yang langsung ditengah-tengah masyarakat, ini berarti lembaga-lembaga atau organisasi dalam masyarakat merupakan ujung tombak yang menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat desa itu sendiri.

Fungsi pokok lembaga-lembaga masyarakat desa tersebut adalah menyalurkan ide-ide atau keinginan-keinginan masyarakat dalam proses pembangunan. Namun dalam kenyataan yang ada berdasar hasil pengumpulan data di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo masih relatif kurang melaksanakan fungsinya dengan baik. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :



TABEL XIV

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP TINGKAT PELAKSANAAN
FUNGSI LEMBAGA-LEMBAGA MASYARAKAT DESA DALAM
PEMBANGUNAN DI KELURAHAN LAMBESSI

No. Tanggapan	Klasifikasi Lembaga Masyarakat Desa F/(%)				Rata- rata (%)
	F(%)	P(%)	K(%)	L(%)	
1. Sangat berfungsi	-	16 (26,67)	20 (33,33)	1 (1,67)	15,42
2. Berfungsi dengan baik	-	19 (31,67)	26 (43,33)	5 (8,33)	20,83
3. Cukup berfungsi	2 (3,33)	20 (33,33)	14 (23,33)	11 (18,33)	19,58
4. Kurang berfungsi	37 (61,67)	5 (8,33)	-	27 (45,00)	28,75
5. Tidak berfungsi	21 (35,0)	-	-	16 (26,67)	15,42
Jumlah	60 (100%)	60 (100%)	60 (100%)	100,00	

Sumber : Hasil wawancara responden N. 60, Agustus 1992

Catatan : E = Ekonomi
P = Pendidikan
K = Keagamaan
L = Lain-lain

* Jumlah responden 60 orang masing-masing menilai klasifikasi lembaga desa.

* Jenis Lembaga Desa dapat dilihat pada Tabel Bab III.

Keberaan lembaga masyarakat desa masih dirasakan kurang melaksanakan fungsinya oleh rata-rata sekitar 28,35 % + responden yang mengatakan tidak berfungsi 15,42%. Dalam hal pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga

masyarakat tersebut terdapat sebanyak 19,58 % responden yang menganggap sudah cukup berfungsi, kemudian yang menganggap berfungsi dengan baik dan sangat berfungsi, masing-masing sebanyak 20,83 % dan 15,42 %.

Keempat klasifikasi lembaga masyarakat desa tersebut nampaknya masih banyak sebagian diantaranya kurang berfungsi dan sebagian pula sudah tergolong berfungsi. Untuk klasifikasi lembaga masyarakat desa yang tergolong berfungsi yaitu lembaga-lembaga keagamaan antara lain panitia pembangunan masjid, pengurus masjid, pengurus remaja masjid, lembaga masyarakat desa yang tergolong cukup berfungsi yaitu lembaga-lembaga pendidikan terdiri dari : Tamann Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Taman Pendidikan Al-Quran.

Sedangkan lembaga desa yang tergolong kurang berfungsi yaitu lembaga ekonomi desa yang terdiri dari Koperasi Unit Desa, nampaknya belum melayani masyarakat di daerah ini, dan lumbung desa, kemudian lembaga-lembaga lain terdiri dari kelompok pencapir, kelompok wanita tani dan kelompok kerja Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Adanya variasi penilaian responden yang berbeda terhadap setiap klasifikasi lembaga masyarakat desa tersebut secara keseluruhan masih dinalai rata-rata

cenderung kurang berfungsi. Sehingga dalam proses pembangunan masyarakat desa terkadang masyarakat tidak mempunyai saluran aspirasi.

Penyebab kurang berfungsinya lembaga masyarakat desa tersebut adalah terutama dipengaruhi oleh faktor kurangnya kemampuan pengurus lembaga masyarakat desa, ditambah adanya perangkapan jabatan kepengurusan pada 2 - 3 kepengurusan lembaga masyarakat desa, termasuk kurangnya dana penggerak lembaga masyarakat desa seperti yang telah dibahas pada sub bab pembahasan yang lain.

3. Kurangnya Tenaga Terampil

Disamping kurangnya dana dan kurang berfungsinya lembaga masyarakat desa, kurangnya tenaga terampil menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo. Kurangnya tenaga terampil tersebut dirasakan secara nyata dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan potensi desa antara lain dalam perencanaan pembangunan belum ada tenaga yang mampu menyusun rencana pemanfaatan potensi pembangunan dengan baik, begitu pula dalam pelaksanaan serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Berbagai potensi yang layak ada ditengah-tengah ternyata belum digali dengan efektif, hal ini

disebabkan karena kurangnya tenaga terampil untuk mengelola secara tetap. Namun untuk lebih jelasnya mengenai kemampuan tenaga terampil dalam mengelola potensi pembangunan masyarakat desa, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL XV

TANGGAPAN RESPONDEN
TENTANG KEMAMPUAN TENAGA TERAMPIL
YANG MENGELOLA POTENSI PEMBANGUNAN
DI KELURAHAN LABESSI

No.:	Tanggapan Responden	Fekuensi:	%
1.	Sangat terampil	-	-
2.	Terampil	1	1,67
3.	Cukup terampil	8	13,33
4.	Kurang terampil	32	53,33
5.	Tidak terampil	19	31,67
Jumlah		60	100,00

Sumber: diolah dari wawancara responden, Agustus 1992

Kenyataan menunjukkan bahwa dari seluruh responden dalam peneliitian ini sebahagian besar berpendapat bahwa di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo tenaga terampil masih kurang, hal ini nampak dengan adanya 53,33 % responden menyatakan bahwa pengelola pembangunan masyarakat desa yang kurang terampil, ditambah lagi adanya responden yang menganggap pengelola pembangunan masyarakat desa

tergolong tidak terampil 31,67 %. Untuk responden yang menganggap sudah cukup terampil 13,33 % dan terampil 1,67 %. Sedangkan kategori sangat terampil tidak ada.

Adanya sebahagian besa responden yang menyatakan bahwa pengelola pembangunan masyarakat masyarakat desa tergolong relatif kurang terampil ini membuktikan bahwa hal tersebut merupakan salah satu kendala yang menghambat pelaksanaan pembangunan desa di , Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo.

C. Langkah-Langkah Pemecahan Faktor Kendala Pembangunan

1. Mengatasi Keterbatasan Dana

Seperti yang telah dibahas dalam Bab IV Sub B.1 yang menekankan masih kurangnya dana sebagai kendala yang menghambat pelaksanaan pembangunan masyarakat desa di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo, untuk mengatasi masalah tersebut, menurut hasil analisis data, dapat ditempuh beberapa langkah sebagai berikut :

- a. Menggali sumber-sumber pendapatan dari masyarakat
 - Dengan tidak mengurangi nilai kekeluargaan dan gotroyong masyarakat, perlu diupayakan sumber pendapatan pembangunan dari masyarakat masyarakat, bukan hanya mengharapkan tenaga masyarakat yang dinilai dengan uang, melainkan menggali sumber-sumber pendapatan melalui

pemungutan desa, antara lain pungutan pemeliharaan jalan desa, yakni setiap kendaraan tertentu yang melewati poros jalan desa perlu diberikan pungutan pemeliharaan jalan.

- Kecenderungan besar masyarakat untuk memberikan swadaya dalam bentuk uang dan bahan hanya pada pembangunan bidang sosial terutama pembangunan bidang prasarana ibadah. Kecenderungan pola berfikir masyarakat tersebut perlu dirubah dengan memberikan penyuluhan atau pendekatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat secara moril melihat pembangunan di daerahnya adalah pembangunan secara umum, anggapan masyarakat yang menyatakan pembangunan jalan, jembatan dan gedung-gedung kantor, serta prasarana lain diluar prasarana ibadah adalah hanya kewajiban pemerintah dan amalnya belum jelas dalam memberikan bantuan, hal tersebut lah perlu dirubah, sehingga totalitas pembangunan masyarakat desa didukung dengan adanya partisipasi masyarakat secara merata melalui swadaya dan gotong royong masyarakat dan bukan hanya cenderung pada pembangunan bidang sosial saja.

b. Menjalin koordinasi antara pemerintah Kelurahan dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Soppeng dan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat, serta Instansi Vertikal agar dana proyek pembangunan desa dapat dialokasikan dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo.

- c. Mengadakan suatu kegiatan usaha ekonomi desa yang produktif, antara lain merupakan kebun desa, pengadaan mesin pompa air untuk penyewaan dan usaha desa lainnya yang produktif.

Dari ketiga alternatif di atas apabila diusahakan agar dengan melalui berbagai kebijaksanaan yang dituangkan dalam rencana Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, memungkinkan persoalan dana yang relatif kurang dapat lebih bertambah, untuk mendorong pelaksanaan pembangunan desa.

2. Mengfungsikan Lembaga /Organisasi Masyarakat

Dalam Bab IV SUB B.2 telah diusahakan pula masalah kurang berfungsinya lembaga/organisasi masyarakat desa sebagai salah satu kendala yang menghambat efektifitas pelaksanaan pembangunan. Untuk itu perlu upaya yang positif lebih meningkatkan pelaksanaan fungsi lembaga/organisasi masyarakat desa, terutama lembaga ekonomi dan lembaga lain yaitu kelompok pencapir, kelompok kerja Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan kehar usaha, serta kelompok tani. Adapun

langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan pembinaan kepengurusan lembaga-lembaga masyarakat desa, berarti setiap pengurus diberikan pendidikan kader, dimana dewasa ini daerah telah memberikan pendidikan kader pembangunan desa.
- b. Meningkatkan kerja sama antar lembaga desa, untuk itu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang bertugas untuk mengkoordinir seluruh lembaga desa di wilayahnya, perlu lebih memperjelas lembaga kerja sama antar lembaga desa baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan. Sehingga lembaga-lembaga desa tidak berjalan sendiri-sendiri yang hanya mengharapkan pemerintah dari instansi yang membina masing-masing lembaga desa. Hal tersebut akan mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan antar lembaga-lembaga desa di wilayah kerjanya.

3. Meningkatkan Tenaga Terampil

Kurangnya tenaga terampil dalam pelaksanaan pembangunan di pembangunan masih menjadi kendala, sehingga potensi desa kurang digali dan dimanfaatkan, demikian juga dalam pelaksanaan pembangunan, terkadang kurang efektif, hal ini semua dipengaruhi oleh keterbatasan tenaga terampil. Untuk mengatasi kendala

tersebut, dapat ditempuh beberapa alternatif pemecahan sebagai berikut :

a. Memilih beberapa putra desa yang dapat diberikan biaya siswa desa, untuk mengikuti kursus-kursus sehubungan dengan latar belakang potensi, antara lain kursus ketrampilan kerajinan, ketrampilan bidang teknologi tepat guna.

b. Menjalin hubungan koordinasi antara pemerintah Kelurahan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, antara lain : mengadakan koordinasi dalam pelaksanaan pendidikan kader pembangunan desa, kader pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan kader tenaga sosial.

Dari beberapa alternatif apabila diupayakan pelaksanaannya, memungkinkan seluruh kendala-kendala yang dianggap dominan, dapat teratasi, sehingga pelaksanaan pembangunan desa di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo berjalan lebih efektif lagi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa hasil penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara kuantitatif tingkat pelaksanaan pembangunan desa dilihat dari realisasi pencapaian target rata-rata efektif.
2. Secara kualitatif tingkat pelaksanaan pembangunan desa dilihat dari pembagian kerja dan penggerakan swadaya dan gotong royong masyarakat desa tergolong relatif "cukup efektif".
3. Dalam pelaksanaan pembangunan desa di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo masih dihadapkan pada beberapa kendala yang menjadi penghambat yaitu:
 - Terbatasnya dana terutama sumber dana yang berbentuk uang dan bahan, kendatipun nilai swadaya dan gotong royong masyarakat tinggi hanya dalam bentuk tenaga yang dinilai dengan uang.
 - Kurang berfungsinya lembaga-lembaga masyarakat desa terutama lembaga ekonomi, dan lembaga lain, selain lembaga sosial keagamaan.
 - Kurangnya tenaga terampil terutama tenaga yang dapat mendorong produktifitas masyarakat desa.
4. Untuk mengatasi kendala-kendala yang menjadi faktor

penghambat pelaksanaan pembangunan masyarakat desa ditempuh beberapa alternatif antara lain :

- Mengadakan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang menjadi donatur keuangan dan mengadakan hubungan dengan putra-putri kelahiran desa, memberikan partisipasi langsung dalam bentuk uang atau bahan, sehingga sumber dana tersebut dapat menjadi dana penggerak swadaya masyarakat terutama dalam bentuk uang atau bahan.
- Lembaga-lembaga masyarakat desa yang ada diberikan pembinaan secara bertahap, terutama pada tahap pertama adalah dengan mengatur dan memperjelas kedudukan dan fungsi setiap lembaga desa dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, kemudian mengadakan pembinaan pengurus dengan mengusahakan peningkatan ketrampilan pengurus dan meniadakan perangkapan kepengurusan (Ketua) dalam wilayah desa yang bersangkutan.
- Untuk meningkatkan dan menambah tenaga terampil di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo, perlu mengadakan tenaga koordinasi dengan lembaga pendidikan dan ketrampilan baik yang diselenggarakan oleh swasta maupun oleh pemerintah sehingga putra-putri desa yang putus sekolah diikut sertakan dalam program pendidikan dan latihan kerja.

B. Saran-saran

Adapun saran penulis sehubungan dengan upaya peningkatan pelaksanaan pembangunan desa di Kelurahan Labessi Kecamatan Mario-Riwawo adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam menggerakkan kekuatan potensi swadaya dan gotong royong masyarakat, dilaksanakan secara merata tanpa mengecualikan beberapa golongan tertentu dalam masyarakat, sehingga kecemburuan sosial tidak terlalu nampak.
2. Sejogyanya sumber dana dari masyarakat lebih diorientasikan pada swadaya masyarakat dalam bentuk uang atau bahan, bukan hanya dominan dalam bentuk tenaga.
3. Mengingat belum adanya lembaga ekonomi terutama Koperasi Unit Desa di daerah ini, untuk itu hendaknya tokoh masyarakat di daerah ini segera membentuk koperasi atau kejar usaha. Begitu pula lembaga-lembaga desa yang ada lainnya dikoordinir dengan baik dalam wadah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tersebut dapat lebih berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4. Hendaknya Pemerintah Kelurahan Labessi sebagai Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa mengarahkan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa untuk merumuskan program khusus untuk meningkatkan ketrampilan pemuda pedesaan, khususnya pemuda yang putus sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Amrullah, Zainal, Wali, 1975, Brosur Pembangunan Desa, Sulawesi Selatan : Direktorat Pembangunan Desa
- Beratha I. Nyoman, 1982, Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Handhayaningrat, Soewarno, 1982, Administrasi Pemerintahan Pembangunan Nasional, Jakarta : Pt. Gunung Agung
- Kansil, C.S.T., 1982, Desa Kita Dalam Tata Pemerintahan dan Peraturan Desa, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Kuswanto R. Agustoha, 1985, Manajemen Pembangunan Desa, Jakarta : Grafindo Utama
- Marbun, B.N., 1983, Proses Pembangunan Desa Menyongsong Tahun 2000, Jakarta : Erlangga
- Ndraha, Talizidulu, 1982, Metode Penelitian Pembangunan Desa, Jakarta : Bina Angkasa
- Poewadarminto, W.J.S., 1979, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka
- Siagian, S.P., 1985, Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional, Jakarta : PT. Gunung Agung
- ,...., 1980, Filsafat Administrasi, Jakarta : PT. Gunung Agung
- ,...., 1982, Administrasi Pembangunan, Jakarta : Gunung Agung
- Singarimbun, Masri dan Soyan Effendy, 1981, Metode Penelitian Survei, Jakarta : LP3S
- Suryaningrat, Bayu, 1981, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, Jakarta : Aksara Baru
- Suwignyo, 1986, Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1984, Perencanaan Pembangunan, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Tjoroamidjojo, 1983, Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta : LP3ES

Dokumen-Dokumen

Garis-Garis Besar Haluan Negara, Ketetapan MPR, No. II/1988

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Desa, Jakarta : Ghalia Indonesia

Soppeng Dalam Angka, Tahun 1991

LAMPIRAN IIIa

TARGET DAN REALISASI FISIK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
 BIDANG PRASARANA PRODUKSI DI KELURAHAN LABESSI
 TAHUN ANGGARAN 1987/1988 - 1991/1992

No.	Jenis proyek	Target fisik /volume	Realisasi	
			Fisik .	%
<u>A. Tahun Anggaran 1987/1988</u>				
1.	Rehabilitasi bendungan Lantai II (Balajenne)	900 m	900 m	100,00
2.	Pembuatan bendungan/saluran air Labessi	475	465 m	97,50
3.	Pemeliharaan bendungan lingkungan Cangko	1.557	1.557 m	100,00
4.	Tambahan modal kerja PKK (piring)	12 lusin	12 lusin	100,00
	Rata-rata	tahun 1987/1988		99,37
<u>B. Tahun Anggaran 1988/1989</u>				
1.	Perbaikan saluran air bendungan Lantai I	270 m	213 m	79,0
2.	Perbaikan saluran air bendungan lantai II	900 m	900 m	100,0
3.	Saluran air lingkungan/Cangko/Labessi	1.555 m	1.555 m	100,0
4.	Pengadaan tanah untuk pembibitan kebun desa	600 m	600 m	100,0
	Rata-rata tahun	1988/1989		94,75
<u>C. Tahun 1989/1990</u>				
1.	Pemeliharaan saluran air dan bendungan Labessi	475 m	475 m	100,0
2.	Pemeliharaan saluran air dan bendungan Lantai I	270 m	270 m	100,0
3.	Pemeliharaan saluran air			

dan bendungan lantai II	900 m	900 m	100,0
4. Pemeliharaan lingkungan Cangko	1.555 m	1.555 m	100,0
Rata-rata tahun 1989/1990			100,0

D. Tahun Anggaran 1990/1991

1. Pemeliharaan bendungan/ Saluran air Lantai I	160 m	160 m	100,0
2. Pemeliharaan bendungan/ saluran air Lantai II	500 m	500 m	100,
3. Pemeliharaan bendungan/ saluran air Labessi	475 m	475 m	100,0
4. Pemeliharaan bendungan/ saluran air bare-bare	760 m	760 m	100,0
5. Pemeliharaan bendungan/ saluran air Polejenne	685 m	685 m	100,0
6. Tambahan modal kerja PKK (kursi sewa)	50 buah	50 buah	100,0
Rata-rata tahun 1990/1991			100,0

E. Tahun Anggaran 1991/1992

1. Pemeliharaan 5 buah ben- dungan/saluran irigasi	2.765 m	2.765 m	100,0
2. Pemeliharaan kebun desa 3 Ha	3 Ha	3 Ha	100,0
3. Tambahan modal untuk P3K			
4. Pengadaan bibit swasta (koker)	500 phn	500 phn	100,0
Rata-rata tahun 1991/1992			100,0

Jumlah rata-rata A,B,C,D,E 98,43 %

LAMPIRAN IIIb

**TARGET DAN REALISASI FISIK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DIBIDANG PRASARANA PERHUBUNGAN DI KELURAHAN LABESSI
TAHUN ANGGARAN 1987/1988-1991/1992**

No.	Jenis Proyek	Volume .		Realisasi
		Target	Volume	Persen
A. Tahun Anggaran 1987/1988				
1.	Pemeliharaan jalan Desa dalam lingkungan Labessi/Congko	2,5 Km	2,5Km	100,00
2.	Pemeliharaan jalan Desa Poros Medek kang Lagosi	2100m	2100m	100,00
3.	Pemeliharaan jalan Desa Poros Ulange - JaraE	2000m	2000m	100,00
4.	Pemeliharaan jalan Desa Poros	1750m	1750m	100,00
5.	Pemeliharaan jalan sawah RW I	800m	800m	100,00
6.	Pemeliharaan jembatan	10 buah	10 buah	100,00
Rata-rata Tahun 1987/1988				100.00
B. Tahun Anggaran 1988/1989				
1.	Pembangunan Driker jalan Bhakti	2 buah	2 buah	100.00
2.	Lanjutan Pembangunan jalan poros Congko-Lagosi	3500m	3000m	100,00
3.	Lanjutan Pembangunan desa Kantor Kalurahan Polelolo	450m	450m	100,00
4.	Pemeliharaan Jalan Desa Lingkungan Cengko dan Labessi	2500m	2500m	100,00
Rata-rata Tahun 1988/1989				98.00

No.	Jenis Proyek	Volume	Realisasi	
		Target	Volume	Persen
<u>C. Tahun Anggaran 1989/1990</u>				
1.	Pemeliharaan jalan Desa poros Congko-Lagosi	2500m	2500m	100,00
2.	Pemeliharaan jalan Desa Poros Labessi-Atakka	1700m	1700m	100,00
3.	Pemeliharaan jalan Desa Poros Kapiring-Masumpu	2000m	2000m	100,00
Rata-rata Tahun 1989/1990				100.00
<u>D. Tahun Anggaran 1990/1991</u>				
1.	Pemeliharaan jalan Labessi Atakka	795m	795m	100.00
2.	Pemeliharaan jalan Pekuburan LalangE	850m	850m	100,00
3.	Pemeliharaan jalan Pekuburan Lajanggo	475m	475m	100,00
4.	Rehabilitasi Jembatan Kebun desa 2 buah	2 buah	2 buah	100,00
5.	Gotong royong kebersihan jalan Jalan propinasi	1600m	1600m	100,00
Rata-rata Tahun 1990/1991				100.00
<u>E. Tahun Anggaran 1991/1992</u>				
1.	Pembangunan Jembatan Kayu	2 buah	2 buah	100,00
2.	Pemeliharaan jalan Desa Poros Labessi - Atakka	3400m	3400m	100,00
3.	Pemeliharaan jalan desa poros Kuburan LalangE	750m	750m	100,00
4.	Pemeliharaan jalan desa poros Pekuburan Lajanggo	450m	450m	100,00
5.	Pembangunan Druiker	2 buah	2 buah	100,00
Rata-rata Tahun 91/92				100,00
Total rata-rata A,B,C,D,E				99,60 %

LAMPIRAN IIIc

TARGET DAN REALISASI FISIK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DIBIDANG PRASARANA SOSIAL DI KELURAHAN LABESSI
TAHUN ANGGARAN 1987/1988-1991/1992

No.	Jenis Proyek	Volume Target	Realisasi	
			Volume	Persen
A. Tahun Anggaran 1987/1988				
1.	Lanjutan pembangunan Pondasi Masjid Congko	30 m ²	30m ²	100,00
2.	Lanjutan pembangunan menara mesjid Labessi	1buah	1buah	100,00
3.	Pembuatan pagar besi kantor Kelurahan	15m	15m	100,00
4.	Rehabilitasi mesjid Lalange (plapond)	40m ²	40m ²	100,00
5.	Rehabilitasi mushallah Maddekang (cet)	semua	semua	100,00
6.	Pembuatan pagar kawat mesjid MattirowaliE	keliling	keliling	100,00
7.	Pembuatan pagar kawat Pekuburan BeccuranggeE	keliling	keliling	100,00
8.	Pembuatan papan pengenal lapangan RW dan RT	21 buah	21 buah	100,00
9.	Rehabilitasi Balai Pertemuan	1 Unit	1 Unit	100,00
10.	Pengadaan mesin ketik Kantor Kelurahan	1 buah	1 Buah	100,00
11.	Pembebasan tanah Kantor Kelurahan	295 m ²	195 m ²	100,00
12.	B.P.3 SD	6 buah	6 buah	100,00
			Tahun 1987/1988	100,00

No.	Jenis Proyek	Volume Target	Realisasi	
			Volume	Persen
<u>B. Tahun Anggaran 1988/1989</u>				
1.	Pengadaan Hendy	1 buah	1 buah	100,00
2.	Pembuatan batas lingkungan, RW dan Nama jalan	55 buah	55 buah	100,00
2.	Pemasangan Pelapos Masjid Labessi	35 M ²	35 m ²	100,00
4.	Rehabilitasi Mesjid LalanE	1 unit	1 unit	100,00
5.	Pemasangan kawat Taman- Kanak	keliling	keliling	100,00
6.	Pemasangan pagar tembok Kantor kelurahan Labessi	25m ²	25m ²	100,00
7.	Penyelesaian pembebasan tanah kantor Kelurahan	53m ²	53m ²	100,00
8.	Pembuatan alat Peraga Taman Kanak-kanak	5 unit	5 unit	100,00
9.	Pemasangan tegel Balai Pertemuan Masyarakat	21m ²	21m ²	100,00
10.	Swadaya gotong royong tenaga	15proyek	15proyek	100,00
Rata-rata Tahun 1988/1989				100,00
<u>C. Tahun Anggaran 1989/1990</u>				
1.	Rehabilitasi Fos Ronda	3 buah	5 buah	100,00
2.	Pembanunan Fos Ronda	1 buah	1 buah	100,00
3.	Lanjutan pembanunan mesjid Labessi	1 unit	1 unit	100,00
4.	Lanjutan pembanunan mesjid Lalange	1 unit	1 unit	100,00
5.	Lanjutan pembanunan mesjid Congko	1 unit	1 unit	100,00
6.	Kursus Dasar Wisma PKK	2 orang	2 orang	100,00

No.	Jenis Proyek	Volume Target	Realisasi	
			Volume	Persen
7.	Bulan Bakti LKMD (baju Kaos)	40 Lbr	40 Lbr	100,00
8.	Pengembangan /kelompok Pengajian	3 Kelmp	3 Klmp	100,00
9.	Pengaktifan pos perondaan Malam	559 kk	559 kk	100,00
10.	Kebersihan keindahan kota	Masyarakat	Masy.	100.00
11.	Penggantian tanaman Penghijauan kota yang telah mati	150 Phn	150 phn	100,00
12.	Kursus kader kesehatan/Gisi dan Pembentukan PKMD	3 orang	3 orang	100,00
13.	Lanjutan Pembangunan Kantor PKK	1 unit	1 unit	100,00
14.	Inpres Bantuan Desa	3 unit	3 unit	100,00
15.	Inpres Bantuan PKK	1 unit	1 unit	100,00
16.	Rehabilitasi kantor Lingkungan Laebessi	1 unit	1 unit	100,00
17.	Honorarium guru Taman Kanak-kanak LKMD	2 orang	1 orang	100,00
18.	Pemasangan Lanjutan Tembok Kantor Desa	27 m ²	27 m ²	100,00

D. Tahun Anggaran 1990/1991

1.	Pembangunan Poskamling R WIII/RTW	1 buah	1 buah	100,00
2.	Rehabilitasi Poskamling	2 buah	2 buah	100,00
3.	Lanjutan Pembangunan mesjid LalangE	1 unit	1 unit	100,00
4.	Lanjutan Pembangunan Mesjid Labessi	1 unit	1 unit	100,00
5.	Bulan Bhakti LKMD 600 orang	60 oang	1 unit	100,00
6.	Pengedaran buku baca Klompen-capir	150 buah	150 buah	100,00

No. Jeni Proyek	Volume. Target	Realisasi	
		Volume	%
7. Kebersihan dan KEindahan kota	Masya.	Masya.	100,00
8. Pemugaran lingkungan Perumahan	555 kk	555 kk	100.00
9. Inpres Bantuan PKK	1 unit	1 unit	100,00
10. Honorarium Guru TK Labessi	2 orang	2 orang	100,00
11. Lanjutan Pembangunan pagar Kantor Kelurahan	32 m ²	32 m ²	100,00
12. Pengembangan Kelompok pengajian	4 klp	4 klp	100,00
13. Pembangunan POSYANDU	2 buah	2 buah	100,00
14. Pembangunan Sanggar Tani	1 buah	1 buah	100,00

Rata-rata Tahun 1990/1991 100,00
=====

No. Jenis Proyek	Volume Target	Realisasi	
		Volume	%
1. Pembangunan POS Kamling	1 buah	1 buah	100,00
2. Rehabilitasi Pos Kamling	2 buah	2 buah	100,00
3. Lanjutan Pembangunan mesjid LalangE	1 unit	1 unit	100,00
4. Lanjutan Pembangunan mesjid Labessi	1 unit	1 unit	100,00
5. Pengadaan sarana bacaan Kelompencapir	100 buah	100 buah	100,00
6. Perayaan hari raya Nasional Islam	20 kali	20 kali	100,00
7. Pembinaan pemuda/Olag raga	12 klp	12 klp	100,00
8. Penataran P4 dan PKK	15 orang	15 orang	100,00

Rata-rata tahun 1991/1992 100,00

Sumber : Kantor Kelurahan Labessi, Agustus 1992

**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI DESA LAGASA
KECAMATAN KATOBU KABUPATEN OAEAN
TINGKAT II MUNA**



O L E H :

MUH. ARSYAD HARIKI

**Skripsi sebagai salah sa'u syarat untuk menempuh
Ujian Sarjana Negara Jurusan Administrasi Negara**

pada

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS " 45 " UJUNG PANDANG**

1990

HALAMAN JUDUL

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI DESA LAGASA
KECAMATAN KATOBU KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MUNA



O L E H

MUH. ARSYAD HARIKI

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menempuh
Ujian Sarjana Negara Jurusan Administrasi Negara

p a d a

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG

1 9 9 0

HALAMAN PENGESAHAN

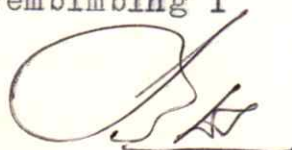
Judul Skripsi : PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI
DESA LAGASA KECAMATAN KATOBU KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MUNA.

Nama Mahasiswa : MUH. ARSYAD HARIKI

Nomor Stb/NIRM : 4586020119/871133159

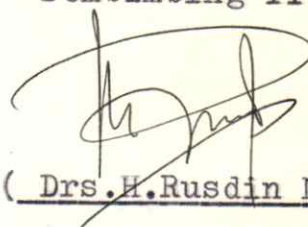
Menyetujui

Pembimbing I



(Drs. Misbahuddin Achmad, MS)

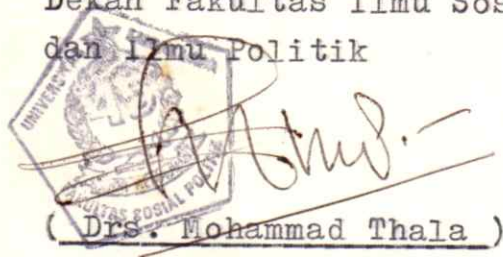
Pembimbing II



(Drs. H. Rusdin Nawi)

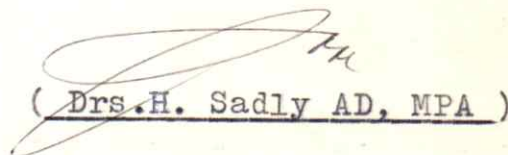
Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik



(Drs. Mohammad Thala)

Ketua Jurusan Ilmu Adminis-
trasi Negara



(Drs. H. Sadly AD, MPA)

Tanggal Pengesahan : 13 Desember 1990

HALAMAN PENERIMAAN

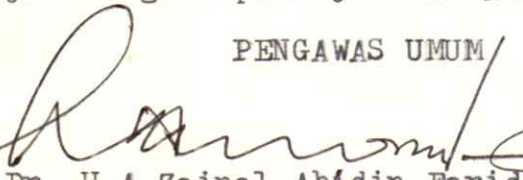
Pada hari/tanggal : Kamis/ 27 Desember 1990

Skripsi atas nama : Muh. Arsyad Hariki

Nomor Stambuk / NIRM : 4586020119 / 871133159

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung
Pandang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Negara pada jurusan Administrasi Negara.

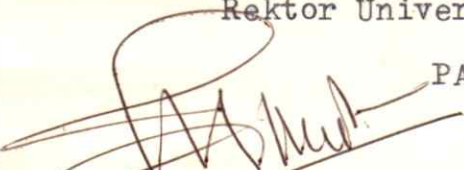
PENGAWAS UMUM


(Prof. Mr. Dr. H.A. Zainal Abidin Farid) . (Drs. H. Sadly AD, MPA)


Rektor Universitas "45"

Dekan Fak. Isipol Unhas


PANITIA UJIAN SKRIPSI


(Drs. H. Mohammad Thala)

K e t u a


(Drs. Guntur Karnani)

Sekertaris


(Prof. Dr. H.M. Syukur Abdulah)

A n g g o t a

T I M P E N G U J I :

1. Prof. Dr. H.M. Syukur Abdulah (.....)
2. Drs. La Nafie, M.Ed. Adm. (.....)
3. Dra. H. Hasyah Haneng, MPA (.....)
4. Drs. Misbahuddin Ahmad, MS (.....)

KATA PENGANTAR

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan pada pembahasan skripsi ini, mungkin hanya merupakan sebuah serpihan kerikil ilmu dari perjalanan panjang menelusuri samudera ketepian pantai ilmu pengetahuan yang sangat luas, kompleks serta rumit.

Rasa kekecilan pada diri rupanya dapat terbawah, namun dibalik itu rasa terharu tetap bersama penulis, karena segalanya adalah sebagai pengakuan manusia terhadap penciptanya untuk lebih banyak mengetahui kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itu ucapan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa penulis patut panjatkan, karena atas segala limpahan rahmat-Nya penulis dapat melaksanakan tugas karya tulis ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan judul : Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Menunjang Pembangunan di Desa Lagasa Kecamatan Katobu Kabupaten Daerah Tingkat II Muna.

Namun penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan serta kehilafan, maka mungkin dari berbagai segi skripsi ini masih terasa jauh dari tingkat kesempurnaan, karenanya dengan kerendahan hati penulis menyatakan bahwa semua ini sudah merupakan pencerminan batas kemampuan yang dimiliki. Akan tetapi tidaklah berarti penulis kehilangan harapan serta tetap optimis kepada keridhoan Allah semoga skripsi ini dapat memenuhi tugas dan persyaratan untuk

mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas "45" Ujung Pandang.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang dijumpai, baik kesulitan dalam mengumpulkan data dan informasi maupun keterbatasan yang penulis miliki.

Namun berkat bantuan serta kemauan akhirnya semua kesulitan yang dihadapi dapat diatasi selama penulisan skripsi ini.

Oleh karena itu kiranya tidaklah berlebihan pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya disertai memohon keihlasan, kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Mohammad Thala, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang yang dengan segala keihlasan telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
2. Bapak Drs. Misbahuddin Achmad, MS dan bapak Drs. Rusdin Nawi, yang penuh dengan keihlasan dan ketekunan telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis didalam penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.
3. Bapak dan ibu dosen pengasuh penulis selama perkuliahan serta bapak dan ibu selaku karyawan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik yang telah membantu dan melayani penulis selama pendidikan.
4. Bapak Drs. La Ode Sefu, Kepala Bahagian Direktorat Sosial Politik Kabupaten Muna yang telah melayani dan mengarahkan

penulis dalam mengumpulkan data dan informasi.

5. Bapak Drs. La Ode Rachman. K, Camat Katobu yang telah berkenaan memberikan arahan serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak La Ode Hariki, Kepala Desa Lagasa beserta aparatnya yang telah banyak membantu guna kelancaran pelaksanaan penelitian.
7. Kepada Ayah dan Ibu tercinta yang telah membesarkan penulis dan senantiasa memberikan doa restu serta disertai berbagai pengorbanan yang tidak sedikit dalam rangka kesuksesan penulis dalam mengikuti pendidikan.
8. Bapak Andi Surman Mapatang dan Ibu yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan bantuan selama penulis mengikuti pendidikan.
9. Kakak La Ode Gazali, BA yang telah banyak membantu penulis dalam mengikuti pendidikan.
10. Ucapan terima kasih juga kupersembahkan kepada adikku Tity Hasma yang senantiasa penuh kesetiaan dan ketabahan yang sukar untuk dilukiskan didalam memberikan dorongan kepada penulis selama mengikuti pendidikan hingga detik-detik penyelesaiannya.
11. Yang terakhir tentunya tak lupa diucapkan terima kasih kepada Saudaraku Basri Oner dan Herry Maxon serta rekan-rekan lainnya yang tak sempat disebutkan satu per-

satu-satu yang telah banyak membantu dalam rangka penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Pada akhirnya semoga skripsi ini akan dapat memberikan manfaat yang cukup berarti bagi akademis, nusa dan bangsa khususnya bagi Pemerintah Desa Lagasa yang hingga saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional yakni masyarakat adil dan makmur merata materil dan sprituil.

Kiranya hanya Tuhan Yang Maha Esa jualah yang memberikan imbalan amal bakti kepada semua pihak yang telah disebutkan diatas, serta tetap berlapang dada untuk menerima segala keritikan dari semua pihak yang bersifat membangun dengan harapan semoga dari semua pihak bersepakat untuk meniti kemuara penyempurnaan skripsi ini.

Ujung Pandang ,

1990

P e n u l i s

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Metode Penelitian	4
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Administrasi	11
B. Pengertian Pemerintahan Desa	13
C. Pengertian Administrasi Pemerintahan Desa	15
D. Pengertian Pembangunan	16
BAB III. GAMBARAN UMUM DESA LAGASA	20
A. Keadaan Geografi	20
B. Keadaan Demografi	21

	Hal
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Peme - rintahan Desa Lagasa	26
D. Kegiatan-kegiatan Pembangunan Desa Lagasa	33
BAB IV. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	35
A. Pelaksanaan Administrasi Umum	35
B. Pelaksanaan Administrasi Kependudukan	41
C. Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa ,...	45
D. Kendala-kendala yang dihadapi	48
1. Sarana Administrasi Pemerintahan Desa ..	48
2. Kemampuan Personil	53
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	56
A. KESIMPULAN	56
B. SARAN-SARAN	57
DAFTAR KEPUSTAKAAN	59
L A M P I R A N	

DAFTAR TABEL

TABEL	Hal
1. Jumlah Dusun dan Rukun Kampung (RK)	20
2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin	22
3. Komposisi Penduduk Menurut Golongan Umur	23
4. Buku-buku Administrasi Pemerintahan Desa Lagasa	51
5. Keadaan Pendidikan Personil Pemerintahan Desa Lagasa ..	55

ABSTRAK

Meningkatnya tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan membawa akibat peningkatan tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu komponen dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Daerah adalah Pemerintah Desa sebagai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat.

Tugas Pemerintah Desa merupakan suatu hal yang sangat rumit karena selain menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan juga melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan lainnya.

Kerumitan tugas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dipandang perlu adanya pelaksanaan administrasi secara baik dan terarah sehingga mampu berfungsi sebagai soko guru pembangunan. Dalam rangka pelaksanaan administrasi ini banyak hambatan dan masalah yang dihadapi seperti halnya Pemerintah Desa Lagasa. Masalah-masalah tersebut berkaitan dengan masalah kualitas personil, arah dan kebijaksanaan pembangunan yang ditempuh, koordinasi pembangunan yang dilakukan serta sarana dan fasilitas pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Faktor-faktor penyebab timbulnya masalah itupun serba majemuk yang secara keseluruhan membutuhkan penanganan secara tuntas, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas-tugas yang diemban oleh pemerintah desa.

Analisa terhadap masalah-masalah tersebut diharapkan da-

pat membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada dan cara serta alternatif pemecahannya, sehingga akan dapat memperlancar proses pencapaian tujuan yang diharapkan.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Peta Desa Lagasa
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lagasa
3. Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Lagasa kepada Lembaga Musyawarah Desa Lagasa Tahun 1990

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pembangunan Nasional Indonesia yang telah, sedang dan akan terus berlangsung, merupakan salah satu rangkaian perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara ditegaskan bahwa dalam rangka membina kesatuan bangsa, maka hubungan kerja yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus dikembangkan atas dasar keutuhan Negara Kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi yang dapat mendorong kemajuan dan pembangunan daerah.

Bertitik tolak pada prinsip serta arah kebijaksanaan diatas, maka jelas bahwa kegiatan pembangunan tidak hanya terpusat pada suatu wilayah tertentu melainkan harus menyebar keseluruhan pelosok wilayah negara terutama di daerah pedesaan dan bahkan daerah pedesaan merupakan ujung tombak dalam menunjang keberhasilan Pembangunan Nasional.

Oleh karena kegiatan pembangunan sifatnya kompleks, maka upaya penanganannyapun tidak terlepas dari beraneka macam masalah atau hambatan-hambatan yang mempengaruhinya. Untuk itu maka dalam pelaksanaan pembangunan di daerah pedesaan dipan -

dang perlu adanya usaha-usaha memperkuat pemerintahan desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pembangunan diperlukan pelaksanaan administrasi pemerintahan, khususnya administrasi pemerintahan desa terutama pelaksanaan administrasi umum, administrasi kependudukan dan administrasi keuangan secara baik dan terarah. Dengan tercapainya kondisi ini, maka pemerintah desa sebagai pelaksana pemerintahan terendah langsung dibawah Camat diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai soko guru pembangunan.

Didalam hubungan inilah akan dicoba untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dalam menunjang pembangunan di Desa Lagasa Kecamatan Katobu sebagai salah satu desa di Indonesia, mengingat :

1. Kemajuan dan kelancaran kegiatan dibidang pemerintahan ikut ditentukan oleh sistem pelaksanaan administrasi yang baik dan terarah dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan.
2. Untuk lebih mengefektifkan kegiatan pemerintahan desa sebagai ujung tombak dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu adanya sistem pelaksanaan administrasi pemerintahan secara teratur.

B. Batasan Masalah.

Mengingat bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan desa merupakan masalah yang sangat kompleks, maka dalam penelitian ini akan dirumuskan batasan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan administrasi pemerintahan desa Lagasa Kecamatan Katobu Kabupaten Daerah Tingkat II Muna ?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa Lagasa ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan administrasi pemerintahan desa Lagasa.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Lagasa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desanya.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Sebagai sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Muna, khususnya kepada Pemerintah Desa Lagasa Kecamatan Katobu sehingga hambatan selama ini dapat diatasi dan dipecahkan.
- b. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam proses penyelesaian studi pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas "45" Ujung Pandang.

D. Metode Penelitian.

1. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Desa Lagasa Kecamatan Katobu Kabupaten Daerah Tingkat II Muna. Desa ini terletak pada bahagian selatan Ibukota Kabupaten Muna yang berjarak kurang lebih 5 Kilo meter.

Desa Lagasa dijadikan sebagai obyek penelitian berdasarkan pemilihan secara purposive dari 6 (enam) desa yang ada di Kecamatan Katobu. Dasar pemilihan karena Desa Lagasa pernah berhasil meraih juara II dalam lomba desa se-propinsi Sulawesi Tenggara, dan juga pada tahun 1990 desa ini merupakan tempat berlangsungnya Pekan Orientasi Bulan Bakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) se-propinsi Sulawesi Tenggara.

Selain itu Desa Lagasa juga merupakan desa percontohan dalam hal penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Muna, dan lebih banyak dikenal oleh orang luar bila dibanding dengan desa-desa lainnya. Sehingga pemilihan desa ini benar-benar akan dapat mewakili desa-desa lainnya di Kecamatan Katobu mengingat ciri-ciri yang dimilikinya lebih banyak daripada yang ada pada desa-desa lainnya tersebut.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut sehingga penulis

terdorong untuk mengambil desa tersebut sebagai lokasi daripada penelitian ini.

2. Metode Pengumpulan Data.

Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif, karena metode ini mampu memberikan gambaran serta melukiskan realita secara kompleks pada suatu situasi tertentu.

3. Sumber Data.

Data yang disajikan dalam penulisan skripsi ini bersumber dari :

a. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan merupakan suatu cara dalam memperoleh data dengan jalan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, peraturan-peraturan, media massa/surat kabar serta dokumen-dokumen yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan.

Penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan data pada obyek yang diteliti, baik menyangkut data primer maupun data sekunder yang meliputi geografis, demografis, pelaksanaan administrasi pemerintahan desa seperti diuraikan dalam bab III dan bab IV.

4. Populasi dan Sampel.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh apa - rat termasuk Kepala-kepala Dusun dan Kepala-kepala Rukun

Kampung dalam lingkungan Desa Lagasa.

Sampel yang ditarik dari populasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa Lagasa.
2. Sekertaris Desa Lagasa.
3. Kepala-kepala Urusan yang berjumlah 5 (lima) orang.
4. Kepala-kepala Dusun sebanyak 3 orang.
5. Kepala-kepala Rukun Kampung 3 orang.
6. Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Secara keseluruhan jumlah responden yang diambil adalah sejumlah 14 orang. Responden yang diambil ini adalah orang-orang yang penulis anggap tepat dan mampu untuk dimintai informasi serta memiliki kesanggupan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan juga dipandang mampu dalam menafsirkan pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagaimana yang penulis inginkan.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Data yang disajikan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Interview.

Teknik ini dilakukan dengan panduan wawancara dengan responden yang telah ditentukan dengan maksud untuk mengetahui pandangan serta pendapat mereka yang

berhubungan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dalam menunjang pembangunan.

b. Observasi.

Teknik ini dilaksanakan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan tentang seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, khususnya aktivitas yang berhubungan dengan batasan permasalahan yang akan dibahas didalam penulisan skripsi ini.

6. Metode Analisa Data.

Data yang telah dikumpulkan dianalisa dan diinterpretasikan dengan menggunakan metode analisa data kualitatif deskriptif. Dengan metode ini akan diuraikan sejumlah kegiatan yang dilakukan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan dari sejumlah kegiatan yang dilakukan.

E. Sistematika Pembahasan.

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini, maka akan diuraikan secara sistematis yaitu sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan.

Pada bab ini akan dibahas mengenai la-

tar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II. Tinjauan Pustaka.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian administrasi, pengertian pemerintahan desa, pengertian administrasi pemerintahan desa, serta pengertian pembangunan.

BAB III. Gambaran Umum Desa Lagasa.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai keadaan geografi, keadaan demografi, struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa Lagasa serta kegiatan-kegiatan pembangunan di desa Lagasa.

BAB IV. Pembahasan Hasil Penelitian.

Pada bab ini akan dibahas tentang pelaksanaan administrasi pemerintahan desa Lagasa yang meliputi pelaksanaan administrasi umum, pelaksanaan administrasi kependudukan, pelaksanaan administrasi keuangan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa Lagasa yang meliputi sarana administrasi pemerintahan desa Lagasa dan kemampuan personil dalam melaksanakan administrasi pemerintahan.

BAB

V. Kesimpulan dan Saran-saran.

Bab ini merupakan akhir dari seluruh pembahasan yang hanya berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Administrasi.

Kata administrasi berasal dari bahasa Latin (Romawi) yang terdiri dari kata " AD " yang berarti intensif dan " MINISTER " yang berarti melayani. Jadi secara etimologi maka administrasi berarti melayani secara intensif. Dalam bahasa Indonesia istilah administrasi sering disamakan dengan kegiatan tata usaha yakni suatu kegiatan yang bertalian dengan kegiatan tulis menulis. Istilah ini sesungguhnya hanya menunjukkan pengertian administrasi dalam arti yang sempit.

Menurut Prof. DR. S Prajudi Atmosudirdjo dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Administrasi yang dikutip oleh Drs. Ano Karno Latief, menyebutkan bahwa :

"Sistem administrasi di Negara Romawi ialah sistem administrasi yang berfungsi menurut pola tertentu didalam menyelenggarakan kegiatan masyarakat dan negara yang teratur dan terorganisir. Unit organisasi ini dipimpin oleh seorang administrator, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya maka administrator berke-wajiban melakukan administer (membantu, melayani) pada majikan dan juga melaksanakan administrare (menyelenggarakan tata usaha)" (Drs. Ano Karno Latief, 1981 : 4).

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka pada abad XIX administrasi telah menjadi disiplin ilmu tersendiri, bahkan dalam abad moderen ini ilmu administrasi merupakan bahagian terpenting dalam mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kegiatan administrasi tidak hanya terbatas pada kegiatan tata

usaha saja.

Rumusan yang memberikan pengertian administrasi ini dalam arti yang luas dikemukakan oleh S. P. Siagian (1986 : 2) yaitu sebagai berikut :

"Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya".

Rumusan lain juga dikemukakan oleh H.A. Simon dan kawan-kawan sebagaimana yang dikutip oleh Drs. Soewarno Handayaningrat (1985 : 2) yaitu :

"Administrasi dalam arti luas dapat diartikan sebagai kegiatan daripada kelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan bersama".

Dalam uraian definisi seperti tersebut diatas maka untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan administrasi akan dijumpai orang-orang sebagai pelaksana, yaitu :

1. Orang-orang yang menetapkan dan memperhatikan tujuan yang disebut administrator.
2. Orang-orang yang mengendalikan dan memimpin usaha agar supaya tujuan dapat tercapai disebut manager.
3. Orang-orang yang kerjanya membantu manager dengan pikiran-pikiran yang sangat berguna bagi pengendalian usaha disebut dengan staf ahli.
4. Orang-orang yang langsung terjun dalam bidang pekerjaan

yang disebut pekerja.

Dalam pada itu menyangkut pengertian administrasi pemerintahan dapat dikemukakan pendapat para ahli sebagai berikut :

Drs. Soewarno Handayani (1986 : 4) mengemukakan bahwa :

"Administrasi pemerintahan pada hakekatnya adalah kegiatan-kegiatan daripada pemerintah (badan eksekutif) dalam menyelenggarakan pemerintahan".

The Liang Gie (1960 : 20) memberi definisi tentang administrasi pemerintahan sebagai berikut :

"Administrasi pemerintahan daerah adalah segenap proses dalam menyelenggarakan wewenang daerah otonom untuk kepentingan penduduk atau wilayah".

B. Pengertian Pemerintahan Desa.

Di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah pada pasal 1 sub a berbunyi sebagai berikut :

"Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah prangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya".

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemerintah adalah aparat atau organ sebagai pelaksana untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah sebagai organ dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu :

1. Pemerintah dalam arti luas, seperti teori Trias Politica Montesquieu yang menggambarkan pemerintah sebagai :
 - "1. Pembuat Undang-undang (Legislatief)
 2. Pelaksana Undang-undang (Eksekutief)
 3. Pengadilan (Yudikatif)" (C.S.T. Kansil, 1976 : 17).

Sedangkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia menyebutkan bahwa pemerintah dalam arti luas meliputi; Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Mahkamah Agung (MA) serta Menteri-menteri.

2. Pemerintah dalam arti sempit, adalah penyelenggaraan kekuasaan yang lazimnya dilaksanakan oleh badan eksekutif. Pengertian pemerintah dalam arti yang sempit ini akan lebih jelas bila dikaitkan dengan pengertian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat adalah Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden dan para Menteri Negara. Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah menyebutkan bahwa :

"Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas-dinas Daerah".

Menyangkut Pemerintah Daerah berarti tidak terlepas kaitannya dengan Pemerintah Desa, karena Pemerintah Desa merupakan rangkaian daripada kegiatan pemerintahan

secara keseluruhan.

Pengertian Desa menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa, adalah sebagai berikut :

"Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dalam pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 juga menyebutkan :

1. Pemerintah Desa terdiri atas ;
 - a. Kepala Desa
 - b. Lembaga Musyawarah Desa (LMD)
2. Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh prangkat desa.
3. Prangkat Desa terdiri dari ;
 - a. Sekertaris Desa
 - b. Kepala-kepala Dusun".

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 seperti tersebut diatas, dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-undang tersebut disebutkan bahwa :

"Pemerintahan Desa adalah seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa".

Dengan berdasar pada pengertian seperti diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa pemerintahan desa adalah kumpulan dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

C. Pengertian Administrasi Pemerintahan Desa.

Sebagaimana telah dijelaskan mengenai pengertian ad-



ministrasi dan pengertian pemerintahan desa, berikut ini akan diuraikan tentang pengertian administrasi pemerintahan desa.

Administrasi pemerintahan desa pada hakekatnya merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. I Nyoman Beratha (1982 : 36) memberikan defenisi Administrasi Pemerintahan Desa sebagai berikut :

"Semua kegiatan atau proses yang berhubungan dengan pelaksanaan daripada Pemerintahan Desa yang terdiri atas tiap-tiap kewajiban dan tanggung jawab dan hubungan kerjanya".

Berdasarkan uraian defenisi seperti tersebut diatas, maka kegiatan-kegiatan daripada administrasi pemerintahan desa merupakan keseluruhan proses dari pranata pedesaan atau tata pemerintahan desa. Setiap aparat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan desa harus sesuai dengan bidang tugas dan kewajiban masing-masing berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja yang ada. Namun tidaklah berarti para aparat dalam melaksanakan tugasnya tidak dilandasi hubungan kerja sama, karena dalam kegiatan administrasi ini hubungan kerja sama sangat dibutuhkan guna mempercepat proses pencapaian tujuan sebagaimana yang diharapkan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam administrasi pemerintahan desa pada umumnya meliputi :

1. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Umum.

2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan.
3. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Keuangan.

Berdasarkan jenis-jenis kegiatan yang dilakukan dalam administrasi pemerintahan desa seperti tersebut diatas dapat pula diketahui tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, yaitu meliputi :

1. Tugas Pemerintahan.
2. Tugas Pembangunan.
3. Tugas Pelayanan.
4. Tugas Ketatausahaan.
5. Tugas Sosial Kemasyarakatan.

D. Pengertian Pembangunan.

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berkeinginan untuk maju serta tidak pernah merasa puas dengan kata lain bahwa manusia selalu ingin merubah keadaan dirinya kearah suatu perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.

Pembangunan pada prinsipnya merupakan suatu proses yang berjalan secara terus-menerus baik yang berorientasi pada saat sekarang maupun pada masa-masa yang akan datang.

Menurut S. P. Siagian (1987 : 2-3) memberikan defenisi tentang pembangunan sebagai berikut :

"Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)".

Sedangkan Bintoro Tjokroamidjojo (1985 : 25) memberi-

kan defenisi sebagai berikut :

"Pembangunan adalah suatu usaha perubahan dari suatu keadaan atau kondisi kemasyarakatan tertentu kepada suatu keadaan atau kondisi kemasyarakatan yang dianggap lebih baik".

Apabila defenisi-defenisi tersebut diatas dianalisa lebih lanjut ada beberapa ide pokok yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu :

1. Pembangunan merupakan suatu proses artinya merupakan suatu kegiatan yang terus menerus dilaksanakan dan berkesinambungan.
2. Pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan serta dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan perencanaan.
4. Pembangunan pada dasarnya mengarah kepada modernitas, maksudnya diarahkan kepada keadaan yang lebih baik dari sebelumnya.
5. Modernitas yang akan dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional dalam arti modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara.
6. Usaha-usaha yang akan dicapai dalam pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa.

Jika dilihat dari segi tujuan daripada pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Negara Republik Indone -

sia, maka dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dengan jelas disebutkan bahwa :

"Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Repoblik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai".

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional seperti tersebut diatas, maka berbagai program pembangunan harus dilaksanakan oleh pemerintah. Program-program pembangunan tersebut sebahagian besar diarahkan kedaerah-daerah pedesaan, karena daerah pedesaan merupakan ujung tombak dalam menunjang keberhasilan Pembangunan Nasional.

Seperti dijelaskan dalam Himpunan Peraturan Pelaknaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa secara rinci disebutkan program-program pembangunan yang dilaksanakan di daerah pedesaan, yaitu :

1. Pembangunan Prasarana Pemerintahan Desa.
2. Pembangunan Prasarana Perhubungan.
3. Pembangunan Prasarana Pemasaran.
4. Pembangunan Prasarana Sosial.
5. Pembangunan Prasarana Produksi.
6. Pembangunan Prasarana lain-lain sesuai kebutuhan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pembangunan itu adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sadar

untuk menciptakan suatu keadaan yang dipandang lebih baik dari keadaan sebelumnya.

BAB. III

GAMBARAN UMUM DESA LAGASA

A. Keadaan Geografi.

Desa Lagasa adalah suatu wilayah pemerintahan yang terletak kurang lebih 5 Kilo Meter dari Ibukota Kabupaten Muna yaitu kota Raha, tepatnya terletak di Kecamatan Katobu.

Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 25 KM² yang terdiri dari 5 buah dusun. Dengan demikian desa ini mempunyai pembagian wilayah yang telah ditata sedemikian rupa. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pemerintahan dalam mengelola pembangunan.

Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian wilayah desa Lagasa berikut ini disajikan dalam tabel.

TABEL 1

JUMLAH DUSUN DAN RK DALAM WILAYAH DESA LAGASA TAHUN 1990

Nomor	Nama Dusun	Jumlah
		R K
1.	Wabahara	2 Buah
2.	Kantea Laut	2 Buah
3.	Kantea Darat	2 Buah
4.	K a s a k a	2 Buah
5.	Kontu Kadea	2 Buah

Sumber Data : Kantor Desa Lagasa Tahun 1990.

Adapun batas-batas wilayah desa Lagasa adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Palangga dan Kelurahan Raha I.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Buton.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Wapunto.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Wapunto.

Keadaan alam desa Lagasa mempunyai struktur tanah datar dan berbukit yang komposisinya sebahagian bercampur dengan batu-batuan dan pasir. Tanah-tanah tersebut merupakan tanah keras dan sebahagian merupakan tanah berawa-rawa karena letaknya ditepi pantai.

Dari segi kondisi iklim desa ini dapat dikatakan sama dengan kondisi iklim di Indonesia pada umumnya dan khususnya kondisi iklim di Kabupaten Daerah Tingkat II Muna, yakni memiliki iklim tropis dengan mengenal adanya dua jenis musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Biasanya pada tiap tahun musim kemarau berlangsung lebih lama dibanding dengan musim hujan. Musim hujan biasanya berlangsung sekitar bulan Pebruari sampai bulan Juni sedang musim kemarau berlangsung sekitar bulan Juli sampai dengan bulan Januari.

B. Keadaan Demografi.

1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk.

Dengan luas wilayah seperti disebutkan diatas, desa Lagasa didiami oleh 1.475 jiwa penduduk yang terdiri dari laki-laki 715 jiwa dan perempuan 760 jiwa. Penduduk tersebut tersebar dalam 5 buah dusun dengan penyebaran sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 2
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN
DI DESA LAGASA TAHUN 1990

No.	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Wabahara	146 jiwa	164 jiwa	310
2.	Kantea Laut	140 jiwa	148 jiwa	288
3.	Kantea Darat	143 jiwa	147 jiwa	290
4.	K a s a k a	144 jiwa	150 jiwa	294
5.	Kontu Kadea	142 jiwa	151 jiwa	293

Sumber Data : Kantor Desa Lagasa Tahun 1990

Berdasarkan data seperti tertera pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa diantara dusun yang ada di desa Lagasa terdapat adanya penyebaran penduduk yang hampir merata. Dan dusun yang paling menonjol jumlah penduduknya adalah dusun Wabahara.

Sesuai dengan jumlah penduduk yang mendiami wilayah desa Lagasa dengan luas wilayahnya 25 KM²,

maka kepadatan penduduk rata-rata/KM2 adalah sekitar 59 jiwa.

2. Komposisi Penduduk Menurut Golongan Umur dan angkatan Kerja.

Dengan jumlah penduduk yang ada maka dapat pula diklasifikasikan komposisi penduduk menurut golongan umur dan angkatan kerja sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Lagasa.

Adapun komposisi penduduk desa Lagasa menurut golongan umur dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 3

KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT GOLONGAN UMUR
DI DESA LAGASA TAHUN 1990

No.	Golongan Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0 s/d 9	242 jiwa	232 jiwa	674
2.	10 s/d 17	178 jiwa	193 jiwa	371
3.	18 s/d 24	83 jiwa	122 jiwa	205
4.	25 s/d 40	124 jiwa	132 jiwa	256
5.	41 s/d 55	68 jiwa	63 jiwa	131
6.	56 ke atas	20 jiwa	18 jiwa	38
Jumlah		715 jiwa	760 jiwa	1.475

Sumber Data : Kantor Desa Lagasa Tm. 1990

Berdasarkan data seperti tabel diatas dapatlah diketahui angkatan kerja yang ada di Desa Lagasa.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Tenaga Kerja, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah "Setiap orang yang telah berumur 15 tahun sampai dengan 54 tahun".

Berdasarkan penjelasan daripada undang-undang tersebut diatas, maka potensi tenaga kerja yang ada di Desa Lagasa cukup potensial sehingga dapat menunjang pembangunan di wilayah desa Lagasa.

3. Mata Pencaharian Penduduk.

Mata pencaharian penduduk desa Lagasa pada umumnya adalah nelayan, hal ini ditunjang dengan letak wilayahnya yang berada ditepi pantai. Selain itu juga ada yang bermata pencaharian sebagai pegawai, pedagang, tukang batu dan tukang kayu.

Sesuai dengan data yang diperoleh pada kantor Desa Lagasa tentang jumlah dan jenis mata pencaharian penduduknya adalah sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri/Swasta	: 10 orang.
b. P e d a g a n g	: 5 orang.
c. Tukang batu dan tukang kayu	: 11 orang.
d. N e l a y a n	: 301 orang.

4. Agama dan Kepercayaan Penduduk.

Agama adalah merupakan sendi daripada kehidupan manusia, karena hukum agama adalah hukum yang

mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan antara manusia dengan manusia sesamanya.

Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 menyatakan :

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan hal inilah sehingga masyarakat Indonesia pada umumnya, dan khususnya masyarakat di Desa Lagasa dapat melaksanakan kegiatan keagamaan dengan baik.

Melihat kondisi penganut agama di Desa Lagasa umumnya (100 %) beragama Islam. Untuk melaksanakan kehidupan beragama oleh Pemerintah Desa Lagasa telah mengusahakan sarana peribadatan (mesjid) sebanyak dua buah yang dilokasikan pada dusun Wabahara dan dusun Kasaka.

5. Pendidikan.

Sesuai dengan jiwa dan maksud yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka hak untuk mengikuti atau memperoleh pendidikan adalah hak dari seluruh warga negara Republik Indonesia. Pendidikan disini dimaksudkan sebagai salah satu indikator dalam menunjang keberhasilan pembangunan, khususnya dari segi keterbelakangan.

Memenuhi kandungan amanat Undang-undang Dasar 1945, di Desa Lagasa telah ada fasilitas pendidikan berupa :

- a. Taman Kanak-kanak dengan jumlah guru 4 orang dan 50 orang murid.
- b. Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2 buah dengan jumlah guru 13 orang dan 363 orang murid.

G. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Lagasa.

Organisasi merupakan suatu wadah untuk berlangsungnya kegiatan administrasi dan alat bagi manajemen untuk mencapai tujuan. Kegiatan suatu organisasi haruslah ditata secara baik, agar dapat menciptakan mekanisme kerja yang teratur dan terarah dan biasanya dituangkan dalam suatu bentuk struktur organisasi. Begitu pula halnya dengan tata kerja dalam suatu organisasi akan memungkinkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang-bidang tugas yang diperoleh dapat berlangsung secara efisien dan efektif.

Secara garis besarnya dalam struktur organisasi menggambarkan adanya :

1. Tugas-tugas dan pekerjaan untuk mencapai tujuan.
2. Fungsi-fungsi yang terdapat didalamnya.
3. Hubungan antara fungsi yang satu dengan fungsi-fungsi yang lainnya.

4. Wewenang dan tugas masing-masing fungsi bagi setiap anggota.
5. Penyaluran perintah atau tugas.

Desa Lagasa Kecamatan Katobu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dibentuk struktur organisasi dan tata kerjanya sebagai berikut :

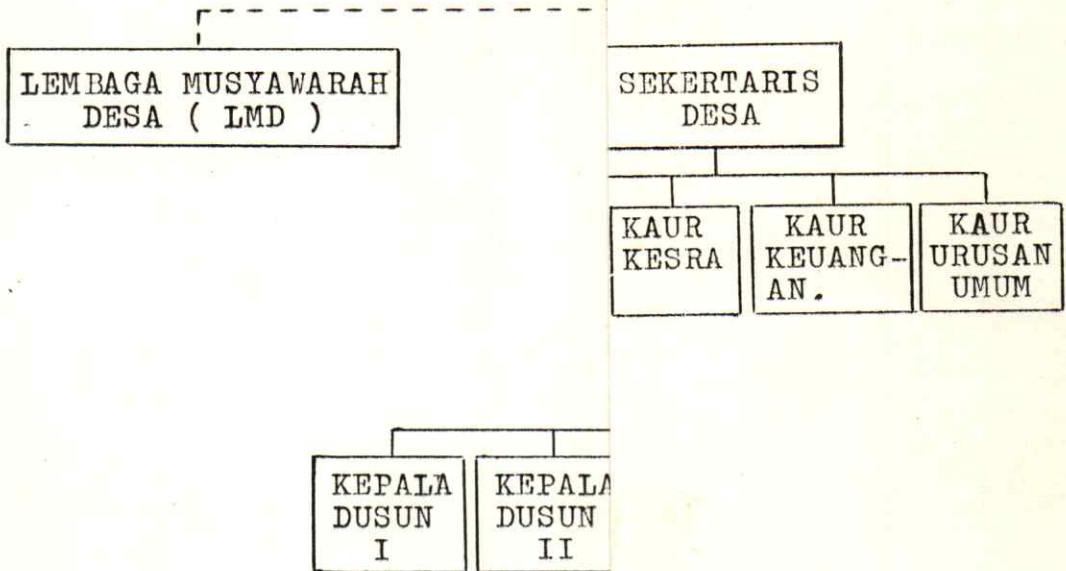
a. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lagasa.

Struktur organisasi pemerintahan desa Lagasa ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang terdiri dari :

1. Kepala Desa Lagasa.
2. Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Desa Lagasa.
3. Prangkat Desa Lagasa yang terdiri dari ;
 - Sekertaris Desa Lagasa.
 - Kepala-kepala Dusun (lima kepala dusun).
 - Kepala-kepala Urusan yang meliputi ;
 - 1). Kepala Urusan Pemerintahan
 - 2). Kepala Urusan Pembangunan
 - 3). Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
 - 4). Kepala Urusan Keuangan
 - 5). Kepala Urusan Umum.

Bagan struktur organisasi pemerintahan Desa Lagasa dapat dilihat seperti terlampir.

STRUKT



Keterangan : Dusun I = V
Dusun II = R
Dusun III = R
Dusun IV = R
Dusun V = R

Sumber Data : Kantor Desa Lag

b. Tata Kerja Pemerintahan Desa Lagasa.

Berdasarkan penentuan struktur organisasi seperti tersebut diatas sekaligus menggambarkan tata kerja dan kegiatan administrasi pemerintahan desa Lagasa dalam pembangunan, dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Kepala Desa Lagasa, yang memiliki tugas dan fungsi :
 - a. Sebagai top manajemen dalam desanya yang merupakan penanggung jawab dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, dan menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah desanya.
 - b. Berkedudukan sebagai alat pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan di desanya.
 - c. Mempunyai fungsi untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayahnya, melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan melaksanakan kegiatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakatnya, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan kegi -

atan dalam rangka urusan pemerintahan lainnya.

Selain itu Kepala Desa Lagasa mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

1. H a k

- a. Mengajukan pencalonan pengangkatan/pemberhentian prangkat desanya kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan.
- c. Mengatur tata tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan desanya.
- d. Mewakili desanya dalam rangka kerja sama dengan desa lain.

2. Wewenang

- a. Menyelenggarakan rapat Lembaga Musyawarah Desanya.
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakatnya dalam pembangunan melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Lagasa.
- c. Melaksanakan pungutan terhadap masyarakatnya baik berupa uang maupun benda dan atau barang untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan tetap

memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakatnya dan diatur melalui penetapan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desanya.

- d. Menumbuhkan dan mengembangkan serta membina jiwa gotong royong masyarakatnya.
- e. Menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Desanya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kewajiban

- a. Melaksanakan tertib administrasi desanya.
- b. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayahnya.
- c. Menggali dan memelihara sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desanya.
- d. Bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakatnya.
- e. Melaksanakan Keputusan Desanya.
- f. Menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi di desanya.
- g. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Bupati Kepala

Daerah Tingkat II Muna melalui Camat Kato -
bu.

- h. Memberikan keterangan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dalam tahun anggaran bersang -
kutan kepada Lembaga Musyawarah Desa (LMD).
2. Lembaga Musyawarah Desa (LMD), yang mempunyai ke-
dudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Berkedudukan sebagai wadah permusyawaratan/
permufakatan dari pemuka-pemuka masyarakat
yang ada di Desa Lagasa.
 - b. Lembaga Musyawarah Desa Lagasa mempunyai tugas
sebagai berikut :
 1. Membahas Rencana Keputusan Desa yang disam-
paikan oleh Kepala Desa Lagasa untuk dite -
tapkan menjadi Keputusan Desa.
 2. Melaksanakan pelaksanaan pencalonan dan pe-
milihan Kepala Desa dalam kedudukannya se -
bagai panitia.
 3. Menampung dan menyalurkan aspirasi dan pen-
dapat masyarakat di Desa Lagasa.
 4. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa
Lagasa terhadap calon Sekertaris Desa, Ke -
pala Urusan maupun Kepala Dusun.
 - c. Mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiat-

an musyawarah/mufakat dalam rangka penetapan kebijaksanaan Pemerintah Desa Lagasa melalui Keputusan Desa.

3. Sekertaris Desa, dalam kedudukannya sebagai pembantu Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa.
 - b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi urusan/kegiatan sekretariat.
 - c. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretariat dan keadaan umum wilayah Desa Lagasa.
 - d. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan.
 - e. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil rapat yang diadakan oleh Pemerintah Desa Lagasa.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa Lagasa.
4. Kepala Dusun, berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa Lagasa mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.
5. Kepala Urusan, dalam kedudukannya sebagai pembantu Sekertaris Desa Lagasa mempunyai tugas pokok membantu pelaksanaan tugas-tugas Sekertaris Desa.

D. Kegiatan-kegiatan Pembangunan Desa Lagasa.

Berbagai kegiatan pembangunan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lagasa bersama-sama dengan masyarakatnya sejak awal memasuki Pelita V hingga sekarang ini, baik pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik.

Berbicara mengenai pembangunan yang dilaksanakan di Desa Lagasa erat sekali hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna.

Sehubungan dengan hal tersebut melalui kebijaksanaan Pemerintah Daerah mengenai Anggaran Pembangunan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Desa Lagasa telah dilaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, seperti :

1. Pembangunan Prasarana Pemerintahan Desa, meliputi :
 - a. Rehabilitasi Gedung Kantor Desa dan Balai Pertemuan.
 - b. Pembuatan Pedoman Kerja.
 - c. Peningkatan Fasilitas Kerja.
 - d. Peningkatan Disiplin Kerja Aparat.
2. Pembangunan Prasarana Perhubungan, meliputi :
 - a. Rehabilitasi Jalan Desa sepanjang 1.200 Meter.
 - b. Pembuatan Tanggul sepanjang 800 Meter.

- c. Pembuatan Deker sebanyak 2 (dua) buah.
3. Pembangunan Prasarana Pemasaran dan Prasarana Pro -
duksi, meliputi :
- a. Pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) Suka Maju.
 - b. Pengolahan Lahan untuk Pertambakan.
 - c. Pembentukan Kelompok-kelompok Tani Nelayan.
 - d. Penyuluhan Bidang Pertanian, khususnya petani tambak.
4. Pembangunan Prasarana Sosial, meliputi :
- a. Penyuluhan Bidang Keagamaan dengan jalan pengaji-an.
 - b. Pelaksanaan Kejar Paket A.
 - c. Penyuluhan Bidang Kesehatan, meliputi :
 - 1). Pemantapan Pelaksanaan Keluarga Berencana.
 - 2). Penggunaan Air Bersih.
 - 3). Menggalakan Posiandu.
 - 4). Penimbangan Balita.
 - d. Pemugaran rumah-rumah penduduk yang kurang mampu.
 - e. Penyuluhan Lingkungan Hidup.



BAB. IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Administrasi Umum.

Pelaksanaan Administrasi Umum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lagasa dalam rangka melaksanakan aspek-aspek pemerintahan desa, terutama kegiatan yang menyangkut pencatatan data mengenai penyelenggaraan pemerintahan desanya.

Dalam usaha melaksanakan administrasi umum tersebut, Pemerintah Desa Lagasa senantiasa berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1982 tentang Jenis-jenis dan Pelaksanaan Administrasi Umum di Desa.

Dengan demikian, maka pelaksanaan daripada administrasi umum tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat berjalan dengan baik dan terarah dan juga akan mempermudah tercapainya tujuan yang diharapkan.

Dalam rangka pelaksanaan administrasi umum ini, Pemerintah Desa Lagasa telah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan, antara lain :

- a. Pembuatan Keputusan Desa, yang kutipannya dimuat dalam Buku Keputusan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa Rancangan Keputusan Desa yang akan dibuat disusun oleh Kepala Desa, lalu disampaikan pada Lembaga Musyawarah Desa

Lagasa untuk dibahas dalam rapat Lembaga Musyawarah Desa. Setelah Rancangan Keputusan Desa tersebut disepakati kemudian ditanda tangani oleh Kepala Desa Lagasa, Ketua dan Sekertaris Lembaga Musyawarah Desa kemudian dikirim kepada Camat Katoibu untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muna guna mendapatkan pengesahan.

Keputusan Desa yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muna tersebut, oleh Pemerintah Desa Lagasa dijadikan sebagai pedoman dan dasar dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban.

Menyangkut penyusunan Rancangan Keputusan Desa mengenai bidang pembangunan, Kepala Desa Lagasa dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Lagasa. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengetahui keinginan masyarakatnya. Untuk itu Kepala Desa Lagasa dalam hal penyusunan Rancangan Keputusan Desa dalam bidang pembangunan ini terlebih dahulu mengadakan rapat dengan masyarakat. Rapat ini dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakatnya sebagai bahan bagi Kepala Desa Lagasa dalam penyusunan Rancangan Keputusan Desa yang akan dibuat, terutama dalam penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

- b. Kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan Keputusan Kepala Desa, kutipannya dimuat dalam buku Keputusan Kepala Desa.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan didapatkan informasi bahwa dalam melaksanakan Keputusan Desa yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muna, bila dipandang perlu Kepala Desa Lagasa dapat menetapkan suatu Keputusan Kepala Desa.

Keputusan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa Lagasa merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Keputusan Desa yang telah ditetapkan.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Desa, Kepala Desa Lagasa dibantu oleh para aparatnya dan bekerja sama dengan Lembaga Kemandirian Masyarakat Desa (LKMD). Hal ini dimaksudkan agar Keputusan Kepala Desa yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan aspirasi dan kondisi masyarakatnya, sehingga didalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Kegiatan Pencatatan data-data mengenai tanah desa dan prasarana pemerintahan, prasarana produksi, prasarana pemasaran serta prasarana sosial.

Untuk lebih memperlancar pelaksanaan daripada administrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lagasa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, maka salah satu aktivitas yang dilakukannya adalah melakukan pencatatan kekayaan yang dimiliki oleh Desanya.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah, jenis, serta keadaan segala fasilitas sarana dan prasarana kekayaan yang dimiliki. Dengan terciptanya kondisi seperti ini akan memudahkan Pemerintah Desa Lagasa dalam melakukan inventarisasi atas kekayaan yang dimiliki oleh desanya, yang dengan sendirinya secara langsung dapat pula memperlancar pelaksanaan tugas-tugas yang diemban baik tugas pemerintahan maupun tugas pembangunan.

d. Kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan surat dan dokumen yang masuk maupun yang keluar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan diperoleh data adanya pelaksanaan administrasi pemerintahan desa yang berkaitan dengan pencatatan surat dan dokumen-dokumen yang masuk maupun yang keluar.

Hal ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan dalam mengetahui surat dan dokumen yang masuk dan yang keluar, baik yang berasal dari instansi mau-

pun ke instansi. Dengan jalan ini akan memudahkan dalam mengetahui surat-surat atau dokumen-dokumen yang masuk dan yang keluar, sehingga akan dapat menciptakan tertib administrasi. Terciptanya tertib administrasi mengenai surat atau dokumen yang masuk atau keluar akan dapat memperlancar proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan.

e. Kegiatan Pelaksanaan Ekspedisi.

Untuk lebih tertibnya pengiriman surat-surat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lagasa, maka dipandang perlu dilakukan kegiatan pencatatan melalui buku ekspedisi. Buku ini merupakan buku yang memuat tentang hal-hal yang menyangkut pengiriman surat atau dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lagasa.

Sesuai hasil penelitian pada kantor Desa Lagasa diperoleh fakta mengenai buku ekspedisi yang terdapat pada Pemerintah Desa Lagasa dimana buku tersebut berisi tentang :

1. Nomor urut surat yang dikirim.
2. Tanggal pengiriman surat.
3. Penjelasan singkat isi surat yang dikirim.
4. Badan/Instansi yang dituju.

Dengan tertibnya pencatatan tentang surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Lagasa-

sa akan memungkinkan arus informasi surat menyurat dapat berjalan dengan lancar dan tertib, sehingga akan dapat menunjang daripada pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

f. Kegiatan Pencatatan Keadaan Aparat.

Untuk mengetahui data jumlah aparatur pemerintahannya, maka upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Desa Lagasa adalah melaksanakan pencatatan data aparat.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui secara rinci tentang keadaan setiap aparat yang merupakan salah satu indikator pendukung daripada pelaksanaan administrasi pemerintahan desanya. Hal ini sangat perlu dilakukan agar supaya memudahkan dalam usaha melaksanakan fungsi dan kewajiban yang diemban oleh setiap aparat.

g. Kegiatan Pencatatan Tanah Desa.

Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lagasa dalam rangka mengetahui luas tanah, status tanah dan penggunaan tanah yang ada di wilayahnya adalah melakukan pencatatan tanah desa.

Dengan jalan seperti tersebut diatas, akan memudahkan Pemerintah Desa Lagasa dalam mengalkasikan pembangunan terutama pembangunan fisik.

B. Pelaksanaan Administrasi Kependudukan.

Pelaksanaan daripada administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lagasa menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Lagasa, diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaannya tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk di Desa.

Administrasi Kependudukan ini merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lagasa dalam rangka usaha pendataan penduduk yang ada di wilayahnya.

Untuk itu Pemerintah Desa Lagasa dalam mengemban tugas dalam rangka pelaksanaan daripada administrasi kependudukan ini telah melakukan berbagai kegiatan, seperti :

a. Pencatatan Data Penduduk.

Kegiatan ini dilakukan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan oleh penduduknya secara lengkap dan benar dengan jalan mendatangi setiap rumah penduduknya. Data penduduk yang diperoleh dicatat pada Buku Induk Penduduk yang memuat tentang identitas penduduk yang bersangkutan yang meliputi :

- Nama Lengkap / Nama Panggilan.
- Tempat dan Tanggal Lahir.
- Jenis Kelamin dan Status.

- Agama.
- Pendidikan.
- Pekerjaan.
- Kemampuan Membaca.
- Kewarganegaraan.
- Tanggal Mulai Tinggal di Desa.
- Kedudukan dalam Keluarga.

Dengan diketahuinya data dari setiap penduduk seperti tersebut diatas, akan memungkinkan pelaksanaan dari tugas-tugas yang diemban dapat berjalan dengan baik dan terarah.

b. Pencatatan Perubahan Penduduk.

Untuk mengetahui daripada perubahan penduduk yang terjadi di wilayah desa Lagasa baik yang disebabkan oleh karena pindah, meninggal, datang maupun lahir Pemerintah Desa Lagasa melaksanakan kegiatan pencatatan perubahan penduduk.

Dalam usaha memperlancar pelaksanaan daripada kegiatan ini, Pemerintah Desa Lagasa menem -
puh suatu kebijaksanaan yakni mewajibkan kepada setiap Kepala Keluarga yang ada di wilayahnya wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau anggota keluarganya kepada Pemerintah Desa. Begitu pula kepada setiap penduduk yang berpindah tempat tinggal dari desa lain wajib me-

laporkan diri kepada Pemerintah Desa Lagasa se -
lambat-lambatnya dalam waktu 14 hari.

c. Pencatatan Perkembangan Penduduk.

Setiap akhir bulan yang bersangkutan Peme -
rintah Desa Lagasa melakukan pencatatan atas per-
kembangan penduduk di wilayahnya dan menyesuaikan -
kannya dengan pencatatan data penduduk dan peru -
bahan penduduk, untuk kemudian dilaporkannya ke -
pada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muna melalui
Camat Katobu.

d. Pencatatan Penduduk Melalui Kartu Keluarga.

Untuk mengetahui jumlah daripada kepala ke-
luarga, anggota keluarga dan identitas masing-ma-
sing anggota keluarga yang ada di wilayahnya, Pe-
merintah Desa Lagasa melakukan pencatatan melalui
Buku Kartu Keluarga. Buku Kartu Keluarga tersebut
oleh Pemerintah Desa Lagasa dijadikan dasar dalam
penyusunan Kartu Keluarga.

e. Pelayanan Pemberian Kartu Tanda Penduduk.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa Lagasa dalam pelaksanaan daripada
administrasi kependudukan adalah memberikan pela-
yanan kepada penduduknya dalam memperoleh Kartu
Tanda Penduduk (KTP).

Setiap penduduk desa Lagasa yang telah ber-

usia 17 tahun atau yang telah kawin/pernah kawin wajib memiliki kartu tanda penduduk.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah penduduk menurut komposisi umur dari 17 tahun ke atas dan juga untuk mengetahui jumlah penduduk yang telah kawin/pernah kawin, sehingga dengan mudah dapat diketahui jumlah angkatan kerja produktif dan jumlah pasangan usia subur yang ada di Desa Lagasa.

f. Melaksanakan Pencatatan Jumlah Penduduk.

Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Desa dan para prangkatnya, diperoleh data bahwa setiap tiga bulan sekali pada akhir bulan yang bersangkutan dilaksanakan pencatatan keadaan jumlah penduduk yang dicatat dalam Buku Jumlah Penduduk.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui jumlah penduduk pada setiap triwulannya. Kutipan dari buku jumlah penduduk tersebut dilaporkan oleh Kepala Desa Lagasa kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muna melalui Camat Katobu pada setiap tiga bulan sekali pada akhir bulan yang bersangkutan.

Dengan pendataan jumlah penduduk seperti tersebut diatas, maka laju pertumbuhan penduduk dapat dipantau secara teratur dan terarah.



C. Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa.

Pelaksanaan administrasi yang menyangkut keuangan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lagasa senantiasa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982. Peraturan tersebut secara terperinci mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa.

Pelaksanaan administrasi keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lagasa meliputi pelaksanaan Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan. Pelaksanaan daripada Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan oleh Pemerintah Desa Lagasa dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu meliputi Anggaran Penerimaan dan Anggaran Pengeluaran.

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Lagasa erat kaitannya dengan program pembangunan yang dilaksanakannya dalam satu tahun anggaran. Program pembangunan merupakan rencana kerja yang disusun oleh Pemerintah Desa Lagasa yang mencakup kegiatan - kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakannya pada tahun kerja yang bersangkutan. Untuk mencapai tujuan program pembangunan tersebut sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan, Pemerintah Desa Lagasa lebih dahulu melaku-

kan perencanaan pembiayaan atas program pembangunan tersebut yang disusun dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Lagasa. Hal ini menunjukkan bahwa Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa sangat memegang peranan penting dalam menunjang suksesnya pelaksanaan daripada program pembangunan.

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa Lagasa ditetapkan setiap tahun anggaran yaitu setiap tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya melalui Keputusan Desa.

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Lagasa meliputi Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan. Anggaran Rutin Pemerintah Desa Lagasa sesuai dengan data yang diperoleh dalam penelitian meliputi dua komponen yaitu Penerimaan dan Pengeluaran, begitu pula halnya dengan Anggaran Pembangunan Desa Lagasa. Namun pos-pos daripada Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan pada hakekatnya terdapat perbedaan. Untuk lebih jelasnya tentang pos-pos Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan ini dapat dilihat sebagaimana terlampir pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Lagasa.

Proses penetapan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lagasa adalah :

1. Rancangan Keputusan Desa mengenai APPKD disu - sun oleh Kepala Desa Lagasa setelah terlebih dahulu mengadakan Rapat Desa dan musyawarah dengan LKMD Desa Lagasa sepanjang mengenai bi - dang pembangunan.
2. Rancangan Keputusan Desa mengenai APPKD terse - but lebih lanjut dimusyawarahkan dengan LMD Desa Lagasa guna tercapainya kesatuan pendapat dan pikiran secara musyawarah/mufakat.
3. Setelah Rancangan Keputusan Desa tersebut di - sepakati bersama, maka Rancangan Keputusan De - sa itu berubah menjadi Keputusan Desa mengenai APPKD dan ditanda tangani oleh Kepala Desa La - gasa, Ketua dan Sekertaris LMD Desa Lagasa.
4. Setelah itu Keputusan Desa tersebut dikirim kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muna melalui Camat Katobu untuk mendapatkan penge - sahan.
5. Setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati Ke - pala Daerah Tingkat II Muna, maka Keputusan Desa tersebut telah dapat dilaksanakan.

Untuk menjamin kelancaran daripada pelaksa-

naan administrasi keuangan desa, oleh Pemerintah Desa Lagasa melaksanakan tata usaha keuangan desanya secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan-kegiatan yang menyangkut pelaksanaan administrasi keuangan di Desa Lagasa dicatat dalam buku Administrasi Keuangan Desa.

Buku Administrasi Keuangan Desa yang ada pada Pemerintahan Desa Lagasa, meliputi :

1. Buku Anggaran Desa, terdiri dari dua jenis yaitu :
 - a. Buku Anggaran Rutin
 - b. Buku Anggaran Pembangunan
2. Buku Kas Umum, yang memuat tentang pencatatan data yang berhubungan dengan Keuangan Desa Lagasa baik Rutin maupun Pembangunan.
3. Buku Kas Pembantu, yang berfungsi sebagai buku pembantu dari Buku Kas Umum. Buku Kas Pembantu ini oleh Pemerintah Desa Lagasa dijadikan sebagai alat kontrol terhadap keadaan uang tunai pada kas.

D. Kendala-kendala Yang Dihadapi.

1. Sarana Administrasi Pemerintahan Desa.
 - a. Buku-buku.

Untuk lebih menjamin kelancaran daripada pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dibutuhkan sejumlah sarana administrasi. Hal ini mutlak harus ada dan tersedia pada setiap pemerintahan desa, agar da-

lam melaksanakan tugas-tugas yang diemban dapat berjalan secara baik dan terarah.

Begitu pula Pemerintah Desa Lagasa dalam mekanisme pelaksanaan tugas-tugas yang diembannya, telah menyiapkan beberapa sarana administrasi pemerintahan seperti buku-buku yang menyangkut pedoman dan catatan tentang penyelenggaraan administrasi pemerintahan desanya.

Akan tetapi hal ini belum seluruhnya tersedia secara baik, karena masih ditemukan beberapa buku-buku yang belum terisi dengan baik dan juga adanya beberapa buah buku yang dinyatakan hilang. Keadaan ini secara langsung akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan administrasi pemerintahan desanya, baik pelaksanaan administrasi umum, administrasi kependudukan dan pelaksanaan administrasi keuangan.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, telah disebutkan beberapa buah buku yang harus ada pada setiap pemerintahan desa. Buku-buku tersebut adalah :

1. Buku Keputusan Desa.
2. Buku Keputusan Kepala Desa.
3. Buku Kekayaan Desa dan Inventaris Desa.
4. Buku Agenda.
5. Buku Ekspedisi
6. Buku Aparat.

7. Buku Tanah Desa.
8. Buku Induk Penduduk.
9. Buku Penduduk Sementara /buku tamu.
10. Buku Perubahan Penduduk.
11. Buku Perkembangan Penduduk.
12. Buku Kartu Keluarga.
13. Buku Jumlah Penduduk.
14. Buku Anggaran Desa, yang meliputi :
 - a. Buku Anggaran Rutin.
 - b. Buku Anggaran Pembangunan.
15. Buku Kas Umum.
16. Buku Kas Pembantu.

Adapun buku-buku yang ada pada Pemerintahan Desa Lagasa dapat dilihat pada tabel 4. Melihat keadaan buku-buku seperti tertera pada tabel tersebut, maka pada Pemerintahan Desa Lagasa masih ditemukan beberapa buah buku yang tidak ada dan tidak terisi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh karena terbatasnya kemampuan dari beberapa personil dan juga diakibatkan oleh masih terbatasnya sarana-sarana lain, sehingga sebahagian dari buku-buku tersebut dinyatakan hilang.

Keadaan tersebut merupakan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Lagasa dalam melaksanakan tugas - tugas yang diemban. Untuk itu kiranya dibutuhkan beberapa perbaikan-perbaikan, sehingga kendala tersebut

dapat teratasi dengan baik.

TABEL 4
BUKU-BUKU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DESA LAGASA TAHUN 1990

No.	Jenis Buku	Keadaan	Keterangan
1.	Buku Keputusan Desa	Terisi	ada
2.	Buku Keputusan Kepala Desa	Terisi	ada
3.	Buku Kekayaan Desa	Terisi kurang jelas	ada
4.	Buku Agenda	Terisi	ada
5.	Buku Ekspedisi	-	tidak ada
6.	Buku Aparat	Terisi	ada
7.	Buku Tanah Desa	-	hilang
8.	Buku Induk Penduduk	Terisi	ada
9.	Buku Tamu	Terisi kurang jelas	ada
10.	Buku Perubahan Penduduk	-	hilang
11.	Buku Perkembangan Penduduk	Terisi kurang jelas	ada
12.	Buku Kartu Keluarga	Tidak Terisi	ada
13.	Buku Jumlah Penduduk	Terisi	ada
14.	Buku Anggaran Desa	Terisi	ada
15.	Buku Anggaran Rutin	Terisi	ada
16.	Buku Anggaran Pembangunan	Terisi	ada
17.	Buku Kas Umum	Terisi kurang jelas	ada
18.	Buku Kas Pembantu	Terisi kurang jelas	ada

Sumber Data : Kantor Desa Lagasa Tahun 1990.

b. Peralatan Perkantoran.

Kelancaran pekerjaan pemerintahan sangat tergantung pada peralatan kerja yang tersedia. Meskipun para aparat telah memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan, akan tetapi tanpa ditunjang oleh sarana dan peralatan kerja yang memadai, kelancaran kerja tidak akan terwujud.

Peralatan kerja bidang perkantoran yang ada pada Pemerintah Desa Lagasa, meliputi :

- Mesin Ketik 1 (satu) buah.
- Meja Biro 1 (satu) buah.
- Meja Setengah Biro 1 (satu) buah.
- Kursi Tamu 1 (satu) stel.
- Rak tempat bundel surat-surat 1 (satu) buah.
- Meja biasa 2 (dua) buah.
- Kursi biasa 4 (empat) buah.

Melihat kondisi peralatan perkantoran yang ada pada Pemerintahan Desa Lagasa tersebut, dapat dikatakan belum dapat menunjang pelaksanaan administrasi pemerintahannya, sehingga masih perlu dilakukan peningkatan. Hal ini perlu dilakukan mengingat tugas-tugas yang diemban oleh Pemerintah Desa semakin meningkat, yang semakin memerlukan dukungan peralatan perkantoran yang memadai.

2. Kemampuan Personil.

Sejalan dengan semakin meningkatnya beban tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, maka pemerintah desa sebagai pemerintahan terendah yang sekaligus merupakan tumpuan segenap urusan pemerintahan dan pembangunan dirasa perlu adanya dukungan dari personil-personil yang dapat diandalkan.

Dengan dukungan personil-personil yang mampu dan terampil, diharapkan pemerintah desa dapat melaksanakan administrasi pemerintahan desa dengan baik, terarah dan sesuai serta seimbang dengan laju perputaran roda pemerintahan dari atas sampai ke bawah.

Sebanding dengan beratnya beban tugas yang dihadapi oleh pemerintah desa, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 menekankan perlunya persyaratan tertentu yang harus dipenuhi terutama oleh Kepala Desa, antara lain adalah pendidikan minimal sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau berpengetahuan sederajat dengan itu.

Personil pemerintahan Desa Lagasa sebagai pendukung pelaksanaan administrasi pemerintahannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan serta tetap berpedoman pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, yang terdiri dari pada :

1. Kepala Desa Lagasa.

2. Sekertaris Desa Lagasa.
3. Kepala-kepala Urusan sebanyak 5 (lima) kepala urusan.
4. Kepala-kepala Dusun sebanyak 5 (lima) kepala dusun.
5. Kepala-kepala RK sebanyak 10 (sepuluh) kepala RK.

Melihat jumlah personil pendukung pemerintahan Desa Lagasa dalam melaksanakan administrasi pemerintahan - nya, maka dari segi kuantitatif dapat dikatakan telah memadai. Namun jika ditinjau dari segi kualitatif dari - pada kemampuan personil-personil tersebut sebahagian be - sar dapat dikatakan belum mampu memberikan prospek masa depan yang cerah dalam menunjang daripada pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa Lagasa.

Keadaan tersebut disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh sebahagian besar perso - nil pendukung tersebut masih sangat minim, utamanya Se - kertaris Desa dan Kepala-kepala Dusun serta Kepala-kepa - la Rukun Kampung (RK). Hal ini merupakan kendala pokok yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Lagasa dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang diemban, baik tugas peme - rintahan maupun tugas pembangunan.

Untuk itu kiranya perlu dilakukan usaha-usaha un - tuk meningkatkan keterampilan setiap personil, sehingga mampu dan dapat diandalkan dalam menelaah dan mengkaji setiap permasalahan yang dihadapi guna memperlancar pe - laksanaan administrasi pemerintahan desa dalam rangka



menunjang pelaksanaan pembangunan. Usaha ini, misalnya dengan jalan memberikan pendidikan dan latihan - latihan tentang berbagai orientasi baru terutama teknik - teknik pelaksanaan administrasi pemerintahan yang baik.

Adapun keadaan pendidikan personil pemerintahan Desa Lagasa, dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 5
KEADAAN PENDIDIKAN PERSONIL PEMERINTAHAN
DESA LAGASA TAHUN 1990

No.	N a m a	Umur (Th)	Pendidikan Personil	Jabatan
1.	La Ode Hariki	47	Tamat SLTA	Kepala Desa
2.	A b i d i n	33	Tamat SD	Sek. Desa
3.	N g a i n g	39	Tidak Tamat SD	Kepala Dusun
4.	S u l u n g	42	Tamat SR	Kepala Dusun
5.	A k i n g	33	Tamat SD	Kepala Dusun
6.	S i b a	40	Tidak Tamat SD	Kepala Dusun
7.	J u d i n g	29	Tamat SD	Kepala Dusun
8.	S e h a	35	Tamat SLTP	Kepala Urusan
9.	Maman. S	25	Tamat SLTP	Kepala Urusan
10.	Nahatia	28	Tamat SLTP	Kepala Urusan
11.	Rusdin Olo	30	Tamat SLTP	Kepala Urusan
12.	Suriati	27	Tamat SLTP	Kepala Urusan
13.	Tidak Tamat SD	Semua Kep. RK

Sumber Data : Kantor Desa Lagasa Tahun 1990.

BAB. V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan.

1. Pelaksanaan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lagasa secara umum telah dapat menunjang pelaksanaan pembangunan. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan administrasi pemerintahan desa baik administrasi umum, administrasi kependudukan, maupun pelaksanaan administrasi keuangan desanya dilaksanakan secara baik dan terarah.
2. Kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada dasarnya merupakan perpaduan yang tidak dapat dipisahkan, sebab kegiatan pemerintahan senantiasa berorientasi kepada pelaksanaan pembangunan.
3. Walaupun pelaksanaan pembangunan di Desa Lagasa telah dapat berjalan dengan baik, akan tetapi masih di temukan adanya hambatan-hambatan yang sifatnya dapat mengganjal kelancaran pembangunan, seperti kurangnya buku-buku administrasi pemerintahan desa dan peralatan kantor yang memadai serta rendahnya tingkat pendidikan dari beberapa personil pendukung administrasi pemerintahan desanya.
4. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lagasa mendapat respon yang positif ditengah-tengah masyarakatnya. Keadaan ini sangatlah dibu-

tuhkan dalam era pembangunan dewasa ini, karena akan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan.

5. Keterlibatan pemerintah selaku motivator dan masyarakat baik sebagai obyek maupun selaku subyek daripada pembangunan, merupakan syarat mutlak dalam rangka melaksanakan pembangunan.

B. Saran-saran.

1. Untuk lebih meningkatkan peranan administrasi pemerintahan desa dalam menunjang pembangunan, perlu dibarengi dengan penyediaan buku-buku yang menyangkut administrasi pemerintahan desa dan peralatan perkantoran yang memadai serta peningkatan keterampilan dan kemampuan personilnya. Begitu pula kiranya dengan Pemerintah Desa Lagasa dan Pemerintah Desa lainnya di Indonesia perlu dilakukan peningkatan misalnya dengan melalui program bantuan pembangunan dipedesaan serta dilakukan latihan-latihan dan pendidikan kepada setiap personil.
2. Untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan kiranya perlu diusahakan adanya keterpaduan program pembangunan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II maupun dengan Pemerintah Kecamatan selaku atasan langsung Pemerintah Desa maupun dengan Instansi terkait lainnya.

3. Untuk lebih mengefektifkan peranan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu adanya peningkatan dana pembangunan baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Pusat. Selain itu perlu pula dilakukan latihan-latihan kepada personil pemerintahan desa yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU - BUKU

- Atmosudirdjo, S. Prajudi. 1980. Dasar-dasar Ilmu Adminis - trasi, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- . 1982. Administrasi dan Management Umum, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Beratha, Nyoman. I. 1982. Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Handayaningrat, Soewarno. 1985. Pengantar Studi Ilmu Admi - nistrasi dan Managemen, Jakarta : Gunung Agung.
- . 1986. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional, Jakarta : Gunung Agung.
- Kansil, C.S.T. 1985. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakar - ta : Aksara Baru.
- Latief, Ano Karno. 1981. Pengantar Administrasi, Bandung : Sinar Baru.
- Mubyarto dan Sartono. K. 1988. Pembangunan Pedesaan di In - donesia, Yogyakarta : Liberti.
- Musanef. 1985. Sistem Pemerintahan di Indonesia, Jakarta : Gunung Agung.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1987. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.
- Siagian, S. P. 1987. Administrasi Pembangunan, Jakarta : Haji Masagung.
- Singarimbun, Masri dan Sofian-Effendi. 1981. Metode Peneli - tian Survey, Yogyakarta : LP3ES.

The Liang Gie. 1960. Pertumbuhan Pemerintahan di Negara Republik Indonesia, Yogyakarta : Nur Cahaya.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta : LP3ES.

Wahyu, MS dan Muhammad Masduki. 1987. Petunjuk Praktis Membuat Skripsi, Surabaya : Usaha Nasional.

B. D O K U M E N

Anonim. Himpunan Materi Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa, Jakarta : Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri.

Anonim. Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muna. Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Desa Makmur Merata di Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.

Anonim. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Anonim. Undang-undang Dasar 1945.

Anonim. Undang-undang No. 14 Tahun 1969, tentang Tenaga Kerja.

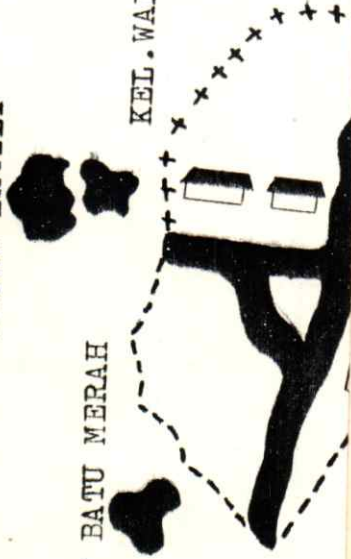
Anonim. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Anonim. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa.

PULAU LAGILI

PULAU BATU MERAH

KEL. WAPUNTO



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TK.II MUNA
KECAMATAN KATOBU
DESA LAGASA

KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA
DESA LAGASA PADA RAPAT LEMBAGA MUSYAWARAH
DESA (LMD) DESA LAGASA KECAMATAN KATOBU
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUNA TANGGAL
31 MARET 1990

PENGANTAR

Bismillahir Rakhmanir Rakhim

Yth. Bapak Kepala Wilayah Kecamatan Katobu
Yth. Bapak-bapak Anggota Tripika Kecamatan Katobu
Yth. Ibu Ketua Team Penggerak PKK Kecamatan Katobu
Yth. Saudara-saudara Anggota LMD, LKMD se Desa Lagasa
Yth. Ibu Ketua Team Penggerak PKK Desa Lagasa beserta anggota.

Serta para hadirin yang sama saya hormati
Assalamu Alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh.
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir bathin untuk bersama-sama ditempat ini menghadiri acara penyampaian keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa kepada Lembaga Musyawarah Desa Lagasa yang sekaligus dirangkaikan dengan acara penutupan kegiatan Bulan Bakti LKMD tahun 1989/1990.

Keterangan Pertanggung Jawaban yang disampaikan Kepala Desa Lagasa kepada LMD adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 tahun 1984 pasal (3) sub (c) point 11 yakni Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran diwajibkan menyampaikan keterangan pertanggung jawaban kepada LMD. Selain itu juga dalam pedoman teknis tata cara rapat LMD disebutkan bahwa rapat LMD diadakan sekurang-kurangnya satu kali satu tahun yakni dalam hal pemberian keterangan

pertanggung jawaban Kepala Desa.

Oleh karena itu dengan berakhirnya tahun anggaran 1989/1990 maka pada hari ini tepat tanggal 31 Maret 1990 kami menyampaikan keterangan pertanggung jawaban.

Bapak Kepala Wilayah Kecamatan Katobu bersama Tripika serta seluruh hadirin yang saya hormati.

Kita telah dapat menyelesaikan berbagai tugas yang menyangkut pelaksanaan Pemerintahan Desa dengan baik dan menggem-
birakan dimana hal ini terbukti bahwa Desa Lagasa berhasil meraih juara II dalam lomba desa sesulawesi tenggara, se-
hingga Pekan Orientasi LMD Tingkat Propinsi Sulawesi Teng-
gara tanggal 10 Pebruari 1990 dipusatkan di Desa Lagasa. Akan tetapi dibalik berbagai hasil yang dicapai selama ini masih terbentang sederetan tugas dan tanggung jawab yang perlu diselesaikan dan ditangani dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka menyosong era lepas landas Pembangunan Nasional dimana Desa sebagai basis pembangunan, maka pembangunan di Desa Lagasa terus dipacu dan lebih ditingkatkan melalui te-
robohan-terobosan yang lebih terarah dan terpadu dalam pe-
laksanaannya.

Dengan dicanangkannya strategi dan pendekatan pembangunan pedesaan terpadu GERSAMATA di Propinsi Sulawesi Tenggara yang secara operasional dirumuskan dalam sistem gotong ro-
yong semakin memberikan gambaran yang nyata dalam upaya me-
wujudkan tujuan pembangunan.

Bapak Kepala Wilayah Kecamatan Katobu bersama Tripikanya, saudara-saudara anggota LMD, LKMD serta seluruh hadirin yang saya hormati.

Untuk lebih memperjelas keterangan pertanggung jawaban yang akan kami sampaikan dalam tahun kerja 1989/1990 maka sistematika penyajiannya disusun berdasarkan Pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1984 yaitu sebagai berikut :

- I . P E N D A H U L U A N
- II . PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
- III . PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEU-
ANGAN DESA (APPKD) YANG MELIPUTI ;
 - 1. ANGGARAN RUTIN
 - 2. ANGGARAN PEMBANGUNAN
- IV . P E N U T U P

Ad.1. P e n d a h u l u a n.

Sebelum memasuki materi keterangan pertanggung jawaban, maka izinkanlah terlebih dahulu membacakan riwayat singkat keberadaan Desa Lagasa di wilayah Kecamatan Katobu.

Berdasarkan Keputusan DPRD Tk.II Muna No.10/ DPRD/M/64 tanggal 18 Maret 1964 serta Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26 tahun 1965, Desa Lagasa telah ditetapkan sebagai Desa yang defenitif. Pada saat itu Desa ini berkedudukan di Tobeia Kecamatan Tongkuno.

Akan tetapi akibat Restelemen Desa tahun 1969 penduduk Desa ini dan Desa Ondoke yang berada di wilayah Kecamatan Tongkuno dipindahkan di Motewe dan Sidodadi wilayah Kecamatan Katobu.

Dalam tahun 1977 sesuai dengan program Pemerintah Daerah Tingkat II Muna, dimana penduduk yang bertempat tinggal di pantai timur Pasar Senteral Raha dipindahkan dibagian selatan kota Raha. Penduduk yang dipindahkan tersebut berjumlah 178 KK dengan jumlah jiwa kurang lebih 700 orang. Berdasarkan jumlah tersebut telah memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi satu Desa, maka dengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Muna No.85/KDM/78 secara resmi menjadi sebuah desa dan diberi nama Desa Lagasa karena nama Desa tersebut sudah defenitif.

Dengan dikukuhkannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Muna tersebut, sampai saat ini Pemerintah Desa Lagasa dan segenap lapisan masyarakatnya telah melaksanakan berbagai upaya untuk memacu pembangunan desanya. Upaya tersebut mencerminkan dinamika masyarakat yang ingin maju dan berkembang.

Dalam rangka mewujudkan perkembangan dan peningkatan yang diharapkan, maka Pemerintah Desa perlu dilengkapi dengan prangkat-prangkat yang mampu dan fasilitas-fasilitas pendukung yang memadai agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya secara berdayaguna dan berhasilguna.

Oleh karena itu maka pada awal Pelita IV Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara telah mencanangkan strategi dan pendekatan pembangunan desa secara terpadu yaitu Gerakan Desa Makmur Merata. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memacu pembangunan desa dan masyarakatnya agar mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam arti mampu membiayai kegiatan rutin dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakatnya.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas-tugas tersebut, seorang Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan berbagai kegiatan demi terwujudnya tertib pemerintahan desa. Salah satu kewajiban bagi seorang Kepala Desa adalah memberikan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepada Lembaga Musyawarah Desa. Hal ini penting sekali artinya mengingat LMD sebagai pencerminan daripada aspirasi masyarakat perlu mengikuti dan mengetahui seluruh rangkaian kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Desanya.

Dengan demikian seorang Kepala Desa akan lebih berhati-hati dalam menjalankan segala tugas, fungsi

dan kewajiban yang dipercayakan kepadanya dan senantiasa mengikuti segala hasil keputusan desa dengan sebaik-baiknya. Mekanisme seperti ini dimaksudkan agar masyarakat desa melalui usul-usulnya di LMD dapat mengikuti dan mengetahui langsung kegiatan-kegiatan yang berlangsung.

Ad.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

1. Keadaan Desa.

(a). Geografi

Desa Lagasa terletak disebelah selatan Ibukota Kabupaten yang jaraknya kurang lebih 5 KM, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Palangga dan Kelurahan Raha I.
- Sebelah Timur dengan Selat Buton.
- Sebelah Selatan dengan Kelurahan Wapunto.
- Sebelah Barat dengan Kelurahan Wapunto.

(b). Luas Wilayah

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muna, luas wilayah Desa Lagasa berkisar 250 Ha atau 25 KM².

(c). Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Lagasa dalam tahun 1990 berjumlah 1.475 jiwa yang terdiri atas laki-laki 715 jiwa dan 760 jiwa wanita.

(d). Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Lagasa 99,5 % adalah nelayan dan 0,5 % adalah pegawai, pedagang/jual-jualan.

(e). Perhubungan

Perhubungan darat yang menghubungkan Desa Lagasa dengan wilayah-wilayah lainnya pada umumnya sudah berjalan dengan lancar karena sara-

na perhubungan darat sudah memadai.

2. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat dapat kami katakan cukup baik bila dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Namun kami akui pula bahwa di desa ini masih sering terjadi kekacauan kecil yang dilakukan oleh kalangan generasi muda, akan tetapi berkat kesadaran dari semua pihak hal ini selalu dapat teratasi dengan baik.

3. P o l i t i k.

Masalah politik di Desa Lagasa ini kami dapat katakan cukup stabil, dengan kenyataan menunjukkan tidak terdapatnya warga masyarakat yang terlibat dalam G.30.S/PKI. Namun sering pula terjadi permainan politik yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, akan tetapi hal ini merupakan suatu hal yang wajar dan kami anggap baik, karena dengan permainan politik yang sehat mengingatkan kepada kami akan kekeliruan-kekeliruan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

4. Sosial Budaya dan Spritual.

Pada umumnya masyarakat desa Lagasa ini beragama Islam. Oleh karena itu melalui kesempatan ini kami menghimbau kepada tokoh-tokoh agama di Desa Lagasa ini untuk selalu membina kegiatan keagamaan karena hal ini mempunyai peranan yang penting khususnya dalam membina generasi muda sebagai pelanjut perjuangan bangsa dan pelanjut pembangunan.

Pemerintahpun dalam usahameningkatkan kehidupan keagamaan ini senantiasa dibarengi dengan usaha-usaha pembangunan saran keagamaan. Salah satu bukti di Desa Lagasa ini tahun kerja 1989/1990

mendapatkan dana bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk rehabilitasi mesjid.

5. Bidang Ekonomi.

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Lagasa dalam tahun 1989/1990 khususnya kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok berjalan stabil.

Ad.3. Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).

Untuk mengetahui tentang anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa akan kami jelaskan dalam keterangan pertanggung jawaban kami dalam pelaksanaan APPKD untuk tahun anggaran 1989/1990, yaitu :

- Rencana Penerimaan Rutin sebesar Rp.3.937.000
- Rencana Penerimaan Pembangunan sebesar Rp.4.550.000,-

Untuk lebih memperjelas tentang rencana penerimaan dan realisasi penerimaan kami uraikan menurut pos-pos sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Undang-undang No.5 tahun 1979 yaitu sebagai berikut :

A. ANGGARAN RUTIN

No. Kode POS	No. Urut	Rencana Penerimaan	Realisasi Penerimaan (Rp)
		Uraian Rencana Penerimaan tiap jenis pendapatan Desa.	
I.	1.	Sisa kurang perhitungan tahun lalu dan anggaran tahun lalu.	-
II.	2.	Penerimaan dari Gae = Rp.2.040.000,-	1.670.000,-
	3.	Penerimaan dari Unit Penyelam=Rp.360.000,-	180.000,-
	4.	Penerimaan dari Unit Nelayan Rp.306.000,-	160.000,-

No. Kode POS	No Urut	Rencana Penerimaan	Realisasi Penerimaan (Rp)
		Uraian Rencana Penerimaan tiap jenis pendapatan Desa.	
III	5.	Penerimaan dari pengkaplingan tanah Rp.150.000.	150.000,-
	6.	Penerimaan dari jasa pantai = 125.000,-	-
	7.	Penerimaan dari Pemerintah = Rp.714.000,-	714.000,-
IV	8.	Penerimaan dari Pemda Tingkat I = Rp. -	250.000,-
V	9.	Penerimaan dari Pemda Tingkat II = Rp. -	1.950.000,-
VI	10.	Lain-lain Pendapatan Desa yang syah menurut peraturan yang berlaku antara lain :	
		- Penerimaan Uang Leges Rp.50.000,- - Penerimaan dari masyarakat tenaga kuat/pajak rodri Rp.193.000,-	28.000,- 180.000,-
J u m l a h		Rp. 3.938.000,-	5.072.000,-

Jika kita lihat rencana penerimaan sejumlah Rp.3.938.000, sedang realisasi penerimaan Rp.5.072.000 (lima juta tujuh puluh dua ribu rupiah) maka lebih besar realisasi penerimaan daripada rencana penerimaan. Hal ini diakibatkan bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I dan bantuan Daerah Tingkat II tidak diprogramkan dalam penetapan APPKD tahun 1989/1990.

Adapun penggunaan daripada uang tersebut perlu pula kami laporkan pada kesempatan ini, dan kami uraikan pula menurut pos-pos pengeluarannya yaitu sebagai berikut :

No. Kode POS	No. Urut	Jenis-jenis penge- luaran.	Jumlah (Rp)
I	1.	Sisa kurang perhitungan anggaran tahun lalu.	-
II	2.	Pembayaran tunjangan Kepala Desa dan Prang - kat Desa (Sekertaris Desa dan Kepala-kepala Urusan).	802.000
III	3.	Pembelanjaan untuk ke - lengkapan fasilitas perkantoran.	184.575
IV	4.	Biaya Rehabilitasi Kan- tor Desa dan Balai Per- temuan.	2.900.000
V	5.	Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Ketua Team Penggerak PKK Desa Lagasa mengikuti rapat kerja di Kecamatan La - dongi Kabupaten Kolaka.	230.000
VI	6.	Pembelian Pakaian Dinas Sekertaris Desa dan Ke- pala-kepala Urusan.	180.000
VII	7.	Biaya Lain-lain : a. Biaya Tamu Desa b. Biaya Peserta MTQ c. Upah kerja pember - sihan tempat-tempat Pemerintah Desa.	400.000 225.425 150.000
J u m l a h			5.072.000

B. ANGGARAN PEMBANGUNAN

No. Kode POS	No. Urut	Uraian Rencana Penerimaan.	Realisasi Penerimaan (Rp)
I	1.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu=Rp.	-
II	2.	Penerimaan dari swadaya untuk bangunan tanggul	2000.000,-

No. Kode POS	No. Urut	Jenis Rencana Penerimaan.	Realisasi Penerimaan (Rp)
	3.	Penerimaan Swadaya Rehabilitasi Mesjid Rp.1.675.000,-	350.000.
III	4.	Penerimaan Bantuan dari Pemerintah Pusat/Subsidi Desa = Rp.1.500.000,-	1.500.000.
IV	5.	Bantuan dari Pemerintah Daerah Tk.II Rp. -	1.950.000.
V	6.	Penerimaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I = Rp. -	250.000.
J u m l a h		Rp.4.800.000,-	4.550.000.

Berdasarkan uraian tersebut diatas tentang rencana penerimaan dan realisasi penerimaan, maka jelas kepada kita bahwa rencana penerimaan yang tidak terealisasi berjumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jika seandainya swadaya pembangunan tanggul dan rehabilitasi mesjid dapat dicapai sesuai dengan rencana maka Penerimaan Anggaran Pembangunan melampaui target. Hal ini terjadi sebagai akibat terjadinya penerimaan yang tidak ditetapkan dalam RAPPKD tahun 1989/1990.

Ad.4. P e n u t u p .

Bapak Kepala Wilayah Kecamatan Katobu, Bapak Tripika, Ketua Team Penggerak PKK Kecamatan Katobu, Saudara anggota LMD, LKMD serta para hadirin yang sama saya hormati.

Demikianlah Keterangan Pertanggung Jawaban yang kami sampaikan untuk tahun kerja 1989/1990. Segala upaya yang dilakukan selama ini sedikit banyaknya te-

lah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, walaupun harus diakui bahwa perjalanan mengantar masyarakat menjemput masa depan yang lebih cerah masih memerlukan perjuangan yang berat dan panjang.

Akhirnya melalui rapat Lembaga Musyawarah Desa ini saya mengajak seluruh anggota LMD, LKMD, Pimpinan-pimpinan organisasi kemasyarakatan, Tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh warga masyarakat untuk terus meningkatkan hubungan kerja sama yang sudah terjalin selama ini, saling membina dan memelihara kekompakan demi kepentingan dan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat di Desa Lagasa.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkati perjuangan kita dalam mengantar masyarakat kepintu gerbang kesejahteraan masyarakat adil dan makmur merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Atas kehadiran dan kesabaran dari bapak-bapak serta para hadirin dalam mengikuti Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Lagasa, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wabillahi Taufiq Walhidayah
Wassalam Alaikum Warakhmatullahi Wabarakathu
Kepala Desa Lagasa
t t d

LA ODE HARIKI

